

SEPUTAR AGRESI MILITER BELANDA II

19 DESEMBER 1948

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Theresia Alit Elia Kurniasari

011314004

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2006

SKRIPSI

SEPUTAR AGRESI MILITER BELANDA II

19 DESEMBER 1948

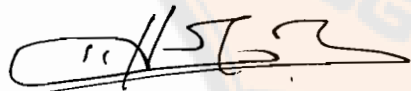
Oleh :

Theresia Alit Elia Kurniasari

NIM : 011314004

Telah disetujui oleh :

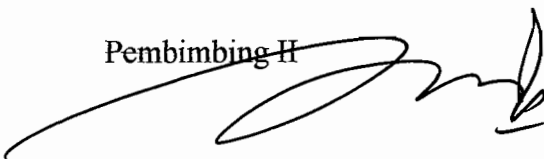
Pembimbing I



Prof. Dr. P.J. Suwarno., S.H.

Tanggal 13 Desember 2005

Pembimbing II



Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R., S.Th.

Tanggal 20 Desember 2005

SKRIPSI

SEPUTAR AGRESI MILITER BELANDA II 19 DESEMBER 1948

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Theresia Alit Elia Kurniasari

NIM : 011314004

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 13 Januari 2006

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua : Drs. Sutarjo Adisusilo. J.R., S. Th.

Sekretaris : Drs. B. Musidi, M. Pd.

Anggota : Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Anggota : Drs. Sutarjo Adisusilo. J.R., S. Th.

Anggota : Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

Yogyakarta, 13 Januari 2006

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma



Drs. T. S. Sarkim, M.Ed, Ph.D.

PERSEMBAHAN

***Skripsi ini aku persembahkan untuk Tuhan Yesus Pelindung
dan Kekuatanku, Santa Perawan Maria, Ayah dan Ibuku,
adikku Yuyun dan Yayan, sahabat-sahabatku, Bapak dan
Ibu Dosen Prodi Pendidikan Sejarah, Prodi Pendidikan
Sejarah Universitas Sanata Dharma, dan pembaca sekalian.***

MOTTO

Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang aku hadapi. Tak akan pernah dibiarkan-Nya, kubergumul sendiri sebab Allah “peduli”.

Hidup tiada mungkin; tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya.

Adalah normal untuk sesekali merasa tertekan, depresi, dan putus asa; tetapi percayalah, waktu-waktu buruk seperti itu akan berlalu.

Manusia sejati adalah manusia yang dapat memetik hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya sebagai bagian dari pembelajaran dan pendewasaan diri.

Lebih baik mati daripada hidup “terjajah”.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 6 Desember 2005

Penulis

Th. Alit Elia. K

ABSTRAK
SEPUTAR AGRESI MILITER BELANDA II 19 DESEMBER 1948

Oleh :Theresia Alit Elia Kurniasari
NIM : 011314004

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa seputar Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948. Dalam skripsi ini ada empat permasalahan yang akan dibahas, yaitu : (1) Faktor-faktor pendorong Belanda mengambil tindakan militer yang keduanya terhadap RI (Republik Indonesia), (2) Kesiapan RI dalam usahanya menghadapi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, (3) Reaksi yang muncul baik dari dalam maupun dari luar RI terhadap Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, (4) Akibat dari adanya reaksi tersebut bagi proses menuju kedaulatan Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang mencakup : heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah, politik, dan sosial. Penulisan skripsi ini dikaji secara diskriptif naratif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : (1) Faktor pendorong Belanda melancarkan serangan militer yang keduanya terhadap RI adalah kaum konservatif memegang tampuk kekuasaan di Negeri Belanda, keadaan Indonesia pasca Perjanjian Linggarjati, dan keadaan Indonesia pasca Perjanjian Renville (2) Pihak RI telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan adanya serangan militer dari Belanda, sehingga dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, Pemerintah RI tidak mengalami kesulitan yang berarti, (3) Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 dikecam oleh dunia Internasional karena Belanda berani melanggar Perjanjian Gencatan Senjata yang merupakan hasil Persetujuan Renville, (4) Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 justru menjadi bumerang bagi Belanda untuk menguasai Indonesia kembali, bahkan Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 berakhir dalam KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag, dengan hasil utama berupa Piagam Penyerahan Kedaulatan Belanda kepada RIS (Republik Indonesia Serikat) yang menjadi dasar bagi pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Hal ini menandakan bahwa RIS secara resmi telah menjadi negara merdeka dan berdaulat yang mendapat pengakuan *de facto* dan *de jure* dari dunia Internasional.

ABSTRACT

**DISCUSSION ON MATTERS CONCERNING THE DUTCH MILITARY
AGRESSION II AT DECEMBER 19TH 1948**

By: Theresia Alit Elia Kurniasari

This paper was written in order to describe and analyze matters concerning the Dutch military aggression II at December 19th 1948. In this paper, there are 4 issues to be discussed, which are: (1) the factors driving the Dutch to take military action for the second time against RI (The Republic of Indonesia); (2) RI's readiness in its efforts to confront the Dutch military aggression II at December 19th 1948; (3) the arousing reactions from both the internal and external of RI in responding to the Dutch military aggression II at December 19th 1948; (4) the effect of the reaction toward the process of coming into Indonesian's sovereignty.

The method being used in this research was historical method that covers: heuristic, resource critic, interpretation, and historiography. The approach being used in the research was historical, political, and social approach. To write this paper, a descriptive-analysis was applied.

The result gained from the research were: (1) the factors motivating Dutch to release military action toward RI for the second time were of the conservative that hold the power of reigning Netherlands; (2) RI had prepared itself in anticipating the possible military attack from Dutch so that in confronting the Dutch military aggression II, the RI forces didn't undergo too much suffer; (3) the Dutch military aggression II was condemned by the international world for the Dutch's violation on cessation of force agreement resulted from Renville Treaty; (4) the Dutch's military aggression II of December 19th 1948 had in fact been its hindrance for the Dutch in regaining its power over Indonesian land, and the Dutch's military aggression II of December 19th 1948 had ended in the Round Table Conference (*KMB*) in Den Haag that resulted primarily with the Charter to force Dutch to give up back its hold over Indonesia to RIS (The Republic of Indonesian Union). The charter had served to be the foundation of RIS's sovereignty admission by the Dutch at December 27th 1949. These implied that RIS had officially stood as independent and sovereign country that obtained the admission from international world *de facto* and *de jure*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus atas kasih, rahmat, dan penyertaannya, sehingga penulisan skripsi berjudul “Seputar Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948” ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
2. Bapak Prof. Dr. P.J. Suwarno., S.H, selaku pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis, serta memberi banyak saran, masukan, pikiran, dan referensi yang mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th, selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis, serta memberi banyak saran, masukan, pikiran, dan referensi yang mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Bapak Drs. Y.R. Subakti., M.Pd, selaku dosen pembimbing akademik, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, dan pihak Sekretariat Pendidikan Sejarah yang telah memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini khususnya dan dukungan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
5. Staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapatkan referensi dan pelayanan *workstation*.
6. Teman-teman Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 2001, serta semua sahabat dan kenalan; atas dukungan, persahabatan, kerjasama, dan kebersamaannya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian pada umumnya dan bagi Universitas Sanata Dharma pada khususnya.

Yogyakarta, 6 Desember 2005

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Landasan Teori	15
G. Hipotesis Penelitian	17
H. Metode Penelitian dan Pendekatan	20
I. Sistematika Penulisan	29

**BAB II FAKTOR PENDORONG BELANDA MENGAMBIL TINDAKAN
MILITER YANG KEDUAKALINYA TERHADAP RI**

A. Faktor Pendorong Belanda mengambil tindakan militer yang kedua kalinya terhadap RI	32
1. Kaum Konservatif Memegang Tampuk Kekuasaan di Negeri Belanda	32
2. Keadaan Indonesia Pasca Perjanjian Linggarjati	36
3. Keadaan Indonesia Pasca Perjanjian Renville	42
B. Meletusnya Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948	49

**BAB III KESIAPAN PEMERINTAH RI DALAM USAHANYA
MENGHADAPI AGRESI MILITER BELANDA II 19 DESEMBER
1948**

A. Persiapan dalam Bidang Militer	60
1. Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia	61
2. Siasat Pertahanan RI dalam Menghadapi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948	64
B. Persiapan dalam Bidang Politik	68
1. Konsolidasi RI terhadap wilayah di luar kekuasaan <i>de facto</i>	70
2. Konsolidasi RI terhadap wilayah yang diakui secara <i>de facto</i>	72

C. Persiapan dalam Bidang Sosial	74
--	----

D. Persiapan dalam Bidang ekonomi	77
---	----

BAB IV REAKSI-REAKSI YANG MUNCUL BAIK DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR RI TERHADAP AGRESI MILITER BELANDA II 19 DEEMBER 1948

A. Reaksi dari dalam RI	81
-------------------------------	----

1. Dalam Bidang politik, dengan pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)	81
---	----

2. Dalam Bidang Militer :

a. Pembentukan Pemerintahan Militer	90
---	----

b. <i>Ofensif</i> Angkatan Perang Republik Indonesia	97
--	----

B. Reaksi dari luar RI

1. Diadakan Konferensi Asia Mengenai Indonesia	103
--	-----

2. Diadakan Perundingan Rum-Van Roijen atas Prakarsa UNCI	106
--	-----

3. PBB dan Dunia Internasional Mengecam Tindakan Belanda	115
---	-----

4. BFO Berbalik Menentang Belanda	119
---	-----

BAB V AKIBAT DARI ADANYA REAKSI YANG MUNCUL TERHADAP AGRESI MILITER BELANDA II 19 DESEMBER 1948 BAGI PROSES MENUJU PENGAKUAN KEDAULATAN

A. Konferensi Inter Indonesia (KII)	123
---	-----

B. Konferensi Meja Bundar (KMB)	126
---------------------------------------	-----

BAB VI KESIMPULAN	140
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN	150



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SILABUS	150
LAMPIRAN 2 : PETA GARIS VAN MOOK	158
LAMPIRAN 3 : PETA HIJRAH DIVISI SILIWANGI	159
LAMPIRAN 4 : PETA GERAKAN TENTARA BELANDA DALAM AGRESI MILITERNYA YANG KEDUA TERHADAP REPUBLIK DI PULAU JAWA	160
LAMPIRAN 5 : PETA GERAKAN TENTARA BELANDA DALAM AGRESI MILITERNYA YANG KEDUA TERHADAP RI DI PULAU SUMATERA	161
LAMPIRAN 6 : PETA <i>LONG MARCH</i> DIVISI SILIWANGI	162
LAMPIRAN 7 : PETA WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT PADA TANGGAL 27 DESEMBER 1949	163

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah kita ketahui bahwa Belanda pernah menjajah Indonesia sebelum Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Tjarda Van Strakenborg Stachouwer dan di bawah Panglima Tentaranya Jenderal Ten Porten menyerah di Lapangan Terbang Kalijati, dihadapan penguasa militer Jepang Jen Hitoshi Imamura dan stafnya pada tanggal 9 Maret 1942.¹ Dengan demikian Hindia Belanda jatuh di bawah penguasaan Jepang dan tamatlah riwayat penjajahan Belanda pada hari itu. Namun bara api belum padam, arang kayu berganti arang tempurung, sehingga lepasnya kekuasaan Belanda di Indonesia tidak berarti bahwa Belanda tidak berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. Belanda tetap berusaha untuk menguasai Indonesia kembali dengan berbagai cara.

Dalam rangka merealisasikan cita-citanya tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk *Nederlandsch Indies Civil Administrations* (NICA) di Australia semasa Perang Dunia II dengan maksud untuk sewaktu-waktu menerima kembali pemerintahan di Indonesia, setelah pendudukan tentara sekutu selesai.² Akan tetapi sebelum rencana Belanda tersebut terlaksana, bangsa Indonesia telah lebih dulu berhasil mendirikan sebuah negara yang

¹ Muhammad Ridhwan Indra dan Sophan Marthabaya, 1987, *Peristiwa-peristiwa di Sekitar Proklamasi 17-8-1945*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

² Seskoad, 1990, *Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta Latar Belakang Dan Pengaruhnya*, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, hlm. 56.

merdeka dan berdaulat, ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 pagi WIB bertempat di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta,³ sehingga Belanda harus berhadapan dengan Republik Indonesia.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan semenjak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, diwarnai oleh pasang surutnya perjuangan yang meminta banyak korban jiwa dan harta benda. Namun dengan semangat dan tekad “merdeka atau mati”, rela berkorban, dan cinta tanah air, maka semua usaha lawan untuk meruntuhkan negara dan memporakporandakan kesatuan dan persatuan bangsa dapat diatasi.

Keberhasilan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan kelangsungan hidup negara dilandasi dengan nilai-nilai dan semangat perjuangan yang tinggi. Kekuatan bangsa Indonesia yang paling dahsyat adalah keyakinan akan kebenaran dan kemenangan perjuangan yang tinggi, kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan, persatuan serta sikap yang tidak kenal menyerah. Maka ketika Belanda ingin menguasai Indonesia kembali, bangsa Indonesia mempertahankan secara mati-matian. Dalam hal ini bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.

Dalam Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947, Belanda ingin menghancurkan RI dengan menghilangkan *de facto* RI (dengan cara

³ Muhammad Ridhwan dan Sophian Marthana, *op.cit.*, hlm. 1.

mengepung ibu kota RI dan menghapus RI dari peta), mengadakan blokade ekonomi (dengan cara merebut daerah-daerah penghasil bahan makanan dan bahan ekspor terpenting), dan menghancurkan TNI.⁴ Berkat jasa baik PBB, Perang Kemerdekaan tersebut berhasil diakhiri dengan Persetujuan Renville. Sebagai akibat dari penandatanganan Persetujuan Renville, terjadi beberapa peristiwa yang menyulitkan kedudukan Republik Indonesia; karena untuk memenuhi Persetujuan Renville, pasukan TNI yang berada di daerah pendudukan Belanda (daerah kantong), harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia.⁵

Sementara itu, RI harus menghadapi pemberontakan PKI Madiun yang meletus pada tanggal 18 September 1948. Pada tanggal ini PKI menduduki kota Madiun dan mendirikan suatu pemerintahan "Soviet" Indonesia di bawah pimpinan Muso.⁶ Untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun, Pemerintah RI menugaskan Divisi Siliwangi dan Divisi Brawijaya. Selain menentang Belanda, PKI juga menentang pimpinan nasional, terutama Kabinet Hatta yang dibentuk pada tanggal 29 Januari 1948. Sikap Hatta yang akomodatif terhadap Belanda dan modal asing menimbulkan kemarahan PKI.

Belum lagi pemberontakan PKI dapat diselesaikan secara tuntas, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua terhadap RI dengan cara menyerbu kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, mulai pukul 05.30 WIB. Penyerangan dilakukan dengan pemboman atas Lapangan

⁴ G. Moedjanto, 1988, *Indonesia Abad ke-20 jilid 2*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 15.

⁵ V. Sardjono dan GL. Marsadji, 1982, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Penyelamat Negara Dan Bangsa Indonesia*, Tintamas, Jakarta, hlm. 1.

⁶ Nugroho Notosusanto, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 155.

Terbang Maguwo dan beberapa bangunan penting di Yogyakarta; lalu diikuti dengan penerjunan satu batalyon pasukan Baret Hijau dan pasukan-pasukan boneka.⁷ Belanda mencontoh cara Agresi Nazi terhadap Nederland pada tanggal 10 Mei 1940 dan cara Jepang menyerang Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941. Menyerang secara mendadak, sebelum lawan diberitahu akan adanya permakluman perang. Jadi nampak jelas di sini bahwa Persetujuan Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 antara RI dengan Belanda merupakan taktik Belanda untuk menyudutkan TNI ke salah satu daerah *Killing Ground*. Dan setelah TNI dalam keadaan lemah, Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua.

Latar belakang Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua adalah melanjutkan agresi militernya yang pertama, yaitu untuk menghancurkan RI. Belanda sejak semula menganggap bahwa Republik Indonesia merupakan sumber dan biang keladi kesulitan politik dan militer mereka, oleh karena itu Republik Indonesia harus dihapuskan dari muka bumi.

Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 yang dilancarkan terhadap RI mendapat reaksi keras dari RI karena RI sama sekali tidak menginginkan kehadiran Belanda ke tanah air tercinta, dalam rangka mewujudkan keinginannya untuk menguasai RI kembali. Reaksi RI dalam bidang politik adalah segera dibentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) di Sumatera oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara, dengan tujuan untuk menghindarkan RI dari kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) karena para

⁷ Badan Musyawarah Musea, 1985, *Yogyakarta Benteng Proklamasi*, Perwakilan, Yogyakarta, hlm. 130-131.

pemimpin RI ditawan oleh Belanda; sehingga secara politis pemerintah RI berjalan terus dan tidak pernah putus.⁸

Reaksi RI dalam bidang militer adalah segera dibentuk pemerintahan militer di Jawa dan Sumatera serta melakukan *ofensif*.⁹ *Ofensif* APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia), dilakukan dengan melancarkan perang gerilya yang dipimpin oleh Panglima Besar APRI Letnan Jenderal Sudirman. Perjuangan dilakukan dengan cara bergerilya dikarenakan TNI tidak mungkin menghadapi Belanda dengan serangan frontal sebab dibandingkan dengan tentara Belanda, TNI kalah dalam segalanya; kecuali dalam hal motivasi dan semangat juang yang tinggi untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Reaksi dalam bidang militer mencapai puncaknya pada tanggal 1 Maret 1949, ditandai dengan Serangan Umum yang dilancarkan oleh tentara dan rakyat di bawah pimpinan Letnan Kolonel Suharto. Ide Serangan Umum 1 Maret 1949 dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.¹⁰

Dunia mengecam tindakan Belanda yang berani melanggar persetujuan yang disponsori oleh PBB, dalam hal ini KTN (Komisi Tiga Negara); apalagi pelanggaran tersebut dilakukan di muka hidung KTN.¹¹ Sebagai bentuk kepedulian akan nasib perjuangan RI dalam mempertahankan kemerdekaan, diadakan Konferensi Asia mengenai Indonesia (*Asian Conference on Indonesia*) di New Delhi, yang diadakan atas ide dari Pemerintah Birma.¹²

Konferensi dilaksanakan pada tanggal 20-23 Januari 1949, diketuai oleh

⁸ V. Sardjono dan GL. Marsadji, *op.cit.*, hlm. x.

⁹ Seskoad, *op.cit.*, hlm. 118.

¹⁰ Mohamad Roem, dkk, 1982, *Tahta Untuk Rakyat*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 79-80.

¹¹ G. Moedjanto, *op cit.*, hlm. 42-43.

¹² P.R.S. Mani, 1989, *Jejak Revolusi*, PT. Pustaka Utama Grafika, Jakarta, hlm. 163.

Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dan dihadiri oleh 19 negara; termasuk tuan rumah, Mesir, Australia, dan New Zealand. Wakil RI juga datang ke New Delhi, antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Soemitro Djojjo Hadikoesoemo, Haji Rasyidi, Idham, dll.¹³ Konferensi ini menghasilkan resolusi yang ternyata berpengaruh terhadap resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949.

Sementara itu PBB segera turun tangan untuk menyelesaikan pertikaian antara RI dengan Belanda, dengan mengeluarkan resolusi-resolusi, seperti resolusi 24 Desember 1948, resolusi 28 Desember 1948, dan resolusi 28 Januari 1949, yang pada intinya mendesak Belanda untuk segera membebaskan Presiden, Wakil Presiden dan Pemimpin Pemerintah RI lainnya yang ditawan oleh Belanda, serta mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta.¹⁴ Dalam resolusi DK PBB tertanggal 28 Januari 1949 disebutkan bahwa KTN diganti namanya menjadi UNCI (*United Nations Commission for Indonesia* atau Komisi PBB untuk Indonesia) dengan kekuasaan yang lebih besar dan hak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar mayoritas.¹⁵ UNCI diberi kuasa untuk memberi rekomendasi (anjaran) kepada Dewan Keamanan PBB dan pihak-pihak yang bersengketa, membantu mereka mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi DK.

Realisasi UNCI dalam usahanya untuk membantu menyelesaikan pertikaian antara Belanda dengan RI adalah dengan mengadakan perundingan

¹³ Aboe Bakar Loebis, 1992, *Kilas Balik Revolusi*, Universitas Indonesia (UI), Jakarta, hlm. 289-290.

¹⁴ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 43-46.

¹⁵ Sekretaris Negara, 1981, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, PT. Tira Pustaka, Jakarta, hlm. 205.

antara Mr. Moh. Rum atas nama Republik dengan Dr.J.H.Van Roijen atas nama Belanda pada tanggal 14 April-7 Mei 1949 di Hotel Des Indes (Jakarta) yang pada akhirnya berhasil mencapai persetujuan dan tersusun apa yang kemudian disebut dengan *Rum-Roijen Statement*.¹⁶ Tidak dapat disangkal bahwa Pernyataan Rum-Roijen merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam perkembangan politik Indonesia pada umumnya dan pertikaian RI dengan Belanda pada khususnya, yang pada akhirnya membuka jalan bagi terselenggaranya perundingan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, yang diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949. KMB menghasilkan Piagam Penyerahan Kedaulatan oleh Belanda kepada RIS, yang kemudian menjadi dasar pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

Sebelum KMB, diadakan Konferensi Inter Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta dan dilanjutkan pada tanggal 31 Juli-2 Agustus 1949 di Jakarta.¹⁷ Konferensi ini bertujuan untuk menciptakan suatu front yang kuat antara RI dengan BFO (*Bijeenkomst Federal Overlag* atau Badan Permusyawaratan Federal), untuk menghadapi Belanda, dalam rangka mewujudkan pembentukan Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat menuju ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai

¹⁶ Sri Endang Sumiyati, dkk, 2001, *Pelurusan Sejarah Serangan Oemoem I Maret 1949*, Media Pressindo Yogyakarta, hlm.134-135.

¹⁷ George Mc Turnan Kahin, 1995, *Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 546.

dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.¹⁸ Konferensi Inter Indonesia merupakan wujud dari adanya kesatuan langkah sebagai bangsa Indonesia untuk mencapai kemenangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Front yang terbentuk dalam KII akhirnya menjadi jalan pembuka bagi penyelesaian masalah Indonesia-Belanda, walaupun dengan konsensus yang tidak menyenangkan yaitu penyerahan kedaulatan atas Indonesia dari Belanda kepada Negara Indonesia Serikat.

Konferensi Meja Bundar (KMB) berlangsung dari tanggal 23 Agustus-2 November 1949 di Den Haag, diketahui oleh PM Belanda Dr. W. Drees. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen, Delegasi RI dipimpin oleh Hatta, dan BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II; dalam hal ini UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*) bertindak sebagai mediator.¹⁹ Konferensi ini menghasilkan naskah yang lengkap mengenai hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Isi KMB yang terpenting adalah Piagam Penyerahan Kedaulatan atas Indonesia oleh Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat). Penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Negara RIS dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949, di Den Haag dari Ratu Juliana kepada Drs. Moh. Hatta; di Jakarta dari Dr.L.J.H. Lovink kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX.²⁰ Dengan begitu maka RI menjadi negara yang merdeka dan berdaulat baik secara *de facto* maupun *de jure* yang diakui oleh dunia Internasional.

¹⁸ Ide Anak Agung Gde Agung, 1983, *Renville*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 284.

¹⁹ Notosetardjo, 1956, *Dokumen-dokumen Konferensi Meja Bundar Sebelum, Sesudah, dan Pembubarannya*, NV Pustaka dan Endang, Jakarta, hlm. 68.

²⁰ Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 171-172.

Penulis tertarik untuk meneliti sejarah Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, karena dengan mengkaji kembali peristiwa ini, kita dapat melihat bahwa Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 justru menjadi bumerang bagi Belanda untuk menguasai Indonesia kembali. Memang dari segi militer Belanda, agresi militernya yang kedua terhadap RI telah berhasil dan mengenai sasaran, karena pada hari pertama Belanda melancarkan serangan militernya terhadap RI, Belanda berhasil mencapai target. Sukarno-Hatta serta sejumlah menteri dan Pejabat Pemerintah RI berhasil ditangkap dan ditawan; dalam tempo dua minggu seluruh kota-kota penting di Jawa dan Sumatera berhasil dikuasai oleh Belanda. Namun demikian, kemenangan sementara yang diperoleh Belanda telah mengancam kedudukan mereka di Indonesia secara keseluruhan.

Sejarah selanjutnya membuktikan bahwa gagasan Dr. L.J.M. Beel (selaku Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia periode 3 November 1948-19 Mei 1949) yang dijadikan dasar kebijakan Pemerintah Belanda untuk memperoleh penyelesaian masalah di Indonesia justru menjadi malapetaka bagi Pemerintah Belanda; sebaliknya menguntungkan RI.²¹ Hal ini dapat dilihat dari perkembangan politik di Indonesia sesudah Belanda melancarkan aksi militernya yang kedua terhadap RI. Pukulan balik datang dari dua arah yaitu : perlawanan RI melalui PDRI dan yang kedua disusul dengan perang gerilya yang terjadi di Jawa dan Sumatera, dan ditambah dengan tekanan dari dunia Internasional; menyebabkan kedudukan Belanda di dalam negeri

²¹ Ide Anak Agung Gde Agung, 1994, *Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949*, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, hlm. 89.

Indonesia dan bidang diplomasi Internasional sangat terkucil. Dari kedua arah serangan tadi membuat kemenangan yang telah diperoleh Belanda menjadi berantakan; sebaliknya secara perlahan-lahan tapi pasti membawa kemenangan bagi pihak RI yang ditandai dengan penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Untuk selanjutnya Belanda harus meninggalkan Indonesia tanpa mendapat jaminan apa pun mengenai kepentingan-kepentingan di Negeri Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong Belanda mengambil tindakan militer yang kedua kalinya terhadap Republik Indonesia ?
2. Sejauhmana kesiapan Pemerintah RI dalam usahanya menghadapi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948?
3. Apa reaksi yang muncul baik dari dalam maupun dari luar RI terhadap Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948?
4. Apa akibat dari adanya reaksi-reaksi tersebut bagi proses menuju pengakuan kedaulatan Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang mendorong Belanda mengambil tindakan militer yang keduanya terhadap RI.
2. Mendiskripsikan dan menganalisa kesiapan Pemerintah RI dalam usahanya menghadapi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948.
3. Mendiskripsikan dan menganalisa reaksi yang muncul baik dari dalam maupun dari luar RI terhadap Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948.
4. Mendiskripsikan dan menganalisa akibat dari adanya reaksi-reaksi tersebut bagi proses menuju pengakuan kedaulatan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang “Seputar Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948” ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain :

1. Bagi Ilmu Sejarah, untuk memperkaya penulisan Sejarah khususnya Sejarah Indonesia Baru; memberikan sumbangan pemikiran lebih lanjut untuk penulisan dan penelitian lainnya yang lebih luas dan mendalam terhadap penulisan Sejarah Nasional.
2. Bagi dunia pendidikan, diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan bahan pengajaran di sekolah pada umumnya sehingga dapat menambah pengetahuan siswa.

3. Bagi pembaca sekalian, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948; dan khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dapat berperan bagi penanaman sikap nasionalisme dan patriotisme.
4. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan perbandingan apabila penelitian yang sama dilakukan pada waktu yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Sumber tulisan maupun lisan dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari para saksi mata atau pelaku peristiwa itu sendiri yang menyaksikan secara langsung peristiwa itu terjadi; atau berupa dokumen resmi dan penting pada masa peristiwa itu terjadi. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapa pun yang bukan saksi pandangan mata atau hasil karya orang lain yang berasal dari kesaksian seorang saksi.²²

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder, untuk memperoleh data atau informasi. Buku yang termasuk kategori sumber primer, dalam hal ini adalah buku yang ditulis oleh orang yang menyaksikan secara langsung suatu peristiwa (hidup seaman dengan peristiwa). Buku tersebut adalah :

²² Louis Gotsschalk, 1986, *Mengerti Sejarah (terjemahan)*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, hlm. 30.

Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949, karya Ide Anak Agung Gde Agung, diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, tahun 1995. Dalam buku ini dijelaskan mengenai faktor utama yang mendorong Belanda melancarkan serangan militer yang keduanya terhadap RI, yaitu kaum konservatif (orang-orang Partai Katolik, merupakan partai pemenang dalam pemilu di Negeri Belanda tahun 1948) memegang tampuk kekuasaan di Negeri Belanda. Kaum konservatif mempunyai pendirian yang sangat reaksioner dan konservatif mengenai masalah Indonesia. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai pelaksanaan Perundingan Rum-Roijen dan isi dari *Rum-Roijen Statement*, serta pelaksanaan dan hasil dari Konferensi Inter Indonesia (KII). Buku ini oleh penulis digunakan sebagai sumber utama untuk membahas bab II, bab IV, dan bab V.

Buku yang termasuk kategori sumber sekunder dalam hal ini adalah buku yang ditulis oleh orang yang tidak menyaksikan secara langsung suatu peristiwa terjadi, menulis berdasarkan kesaksian dari orang lain. Buku tersebut adalah :

1. *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Penyelamat Negara Dan Bangsa Indonesia*, karangan V. Sardjono dan GL. Marsadji, diterbitkan oleh Tintamas, Jakarta, tahun 1982. Dalam buku ini dijelaskan mengenai kesiapan Pemerintah RI dalam bidang militer dan politik untuk menghadapi kemungkinan sewaktu-waktu Belanda melancarkan serangan militer terhadap RI. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai pembentukan PDRI oleh Syafruddin Prawiranegara di Sumatera. Buku ini

oleh penulis digunakan sebagai sumber utama untuk membahas bab III dan bab IV.

2. *Yogyakarta Benteng Proklamasi*, yang dihimpun oleh Badan Musyawarah Musea, diterbitkan oleh Penerbit Perwakilan, Jakarta, tahun 1986. Dalam buku ini dijelaskan mengenai serangan militer Belanda yang keduakalinya terhadap RI pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai kesiapan RI dalam bidang sosial dan ekonomi untuk menghadapi kemungkinan sewaktu-waktu Belanda melancarkan serangan militer terhadap RI. Buku ini oleh penulis digunakan sebagai sumber utama untuk membahas bab II, bab III, dan bab V.
3. *Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta Latar Belakang Dan Pengaruhnya*, yang dihimpun oleh Seskoad, diterbitkan oleh PT. Citra Gung Persada, Jakarta, tahun 1990. Dalam buku ini dijelaskan mengenai keadaan Yogyakarta sewaktu Belanda melancarkan serangan militer yang keduakalinya terhadap RI. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai kesiapan RI dalam bidang militer untuk menghadapi kemungkinan sewaktu-waktu Belanda melancarkan serangan militer terhadap RI, salah satunya dengan melaksanakan Program Re-Ra di lingkungan Angkatan Perang. Reaksi RI dalam bidang militer terhadap Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, dengan membentuk pemerintahan militer di Jawa dan Sumatera serta melakukan ofensif APRI, juga dibahas dalam buku ini. Buku ini oleh penulis digunakan sebagai sumber utama untuk membahas bab II, bab III, dan bab IV.

4. *Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia*, karya George Mc Turnan Kahin, diterjemahkan oleh Nin Bakdi Soemanto, diterbitkan oleh Sinar Harapan, Jakarta, tahun 1995. Dalam buku ini dijelaskan mengenai sikap PBB dan dunia Internasional yang mengecam tindakan Belanda dalam agresi militernya yang kedua terhadap RI, karena Belanda berani melanggar Persetujuan Gencatan Senjata yang merupakan hasil Persetujuan Renville yang disponsori oleh PBB (KTN). Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai pelaksanaan Konferensi Inter Indonesia (KII) di Yogyakarta dan Jakarta, dan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Buku ini oleh penulis digunakan sebagai sumber utama untuk membahas bab IV dan bab V.

F. Landasan Teori

Sebelum masuk pada pembahasan masalah, penulis akan menguraikan beberapa hal seputar judul dan istilah yang sering muncul. Konsep-konsep tersebut adalah agresi, perjuangan, kemerdekaan, dan kedaulatan. Penjelasan beberapa konsep tersebut penting karena merupakan landasan berpikir dan sebagai pembatasan masalah. Dengan demikian diharapkan nantinya ada kesamaan persepsi mengenai konsep-konsep yang dikemukakan.

Konsep Agresi adalah penyerangan atau serangan suatu negara terhadap negara lain; perasaan marah atau tindakan kasar sebagai akibat kekecewaan atau kegagalan di dalam mencapai suatu tujuan yang ditujukan kepada pihak lain; perbuatan bermusuhan yang bersifat penyerangan fisik atau pun psikis

terhadap pihak lain.²³ Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 adalah serangan militer yang dilancarkan Kerajaan Belanda terhadap Negara Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948, mulai pukul 05.30 WIB, dengan cara menyerbu kota Yogyakarta yang pada waktu itu berkedudukan sebagai ibu kota RI; sebagai akibat kekecewaan Belanda atas kegagalannya dalam serangan militer yang pertama terhadap RI pada tanggal 21 Juli 1947.

Konsep perjuangan adalah usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya untuk merebut sesuatu.²⁴ Dalam hal ini keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai, ditandai dengan penyerahan dan pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, yang menandakan bahwa RIS telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat baik secara *de facto* maupun *de jure* yang diakui oleh dunia Internasional.

Konsep kemerdekaan adalah keadaan berdiri sendiri; dalam artian bebas, lepas, dan tidak terjajah lagi.²⁵ Perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 bertujuan untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan dalam segala bidang kehidupan, tidak terikat oleh negara lain atau di bawah kekuasaan negara lain, bebas menentukan nasib sendiri, dan mempunyai sistem pemerintahan sendiri atau berdaulat. Konsep tentang kemerdekaan bagi Indonesia harus menjamin partisipasi rakyat dalam pemerintahan negerinya

²³ Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 13.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 478.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 736.

sendiri. Kemerdekaan harus tidak melahirkan suatu bangsa yang mayoritas rakyatnya tidak memiliki kekuasaan seperti pada periode kolonial.

Konsep kedaulatan adalah kemerdekaan suatu negara yang telah diakui oleh negara-negara lain (dunia Internasional); kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara.²⁶ Pengakuan kedaulatan RI dari dunia Internasional menjadi tujuan utama bagi RI dalam KMB (Konferensi Meja Bundar). KMB adalah perundingan antara Negara Indonesia dengan Kerajaan Belanda di Den Haag pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949 yang menghasilkan ketentuan penting berupa Piagam Penyerahan Kedaulatan dari Belanda kepada Pemerintah RIS yang menjadi dasar bagi pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, yang menandakan bahwa RIS telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat baik secara *de facto* maupun *de jure* yang diakui oleh dunia Internasional.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian. Hipotesis merupakan pedoman bagi peneliti, maka hipotesis harus dirumuskan sebelum penelitian dilakukan. Hipotesis akan dibuktikan dalam penelitian. Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Kalau kaum konservatif memegang tampuk kekuasaan di Negeri Belanda, maka Belanda mengambil tindakan militer yang keduakalinya terhadap Republik Indonesia.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 240.

Yang dimaksud dengan kaum konservatif di sini adalah orang-orang Partai Katolik yang pada prinsipnya mempunyai pendirian yang sangat konservatif dan reaksioner mengenai masalah Indonesia. Mereka berpandangan bahwa tidak perlu lagi diadakan perundingan dengan pihak Republik dan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah di Indonesia yang sesuai dengan keinginan Belanda adalah dengan melancarkan serangan militer terhadap RI.

2. Kalau Pemerintah RI sudah lebih dahulu mempersiapkan diri, maka dalam usaha menghadapi Belanda tidak mengalami kesulitan yang berarti.

Pemerintah RI telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan sewaktu-waktu Belanda melancarkan serangan militer terhadap RI. Dalam bidang militer, TNI menyusun rencana umum yang terkenal dengan nama Perintah Siasat No.1 atau Instruksi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia tertanggal 9 November 1948. Dalam bidang politik, Pemerintah RI membentuk Komisariat Pemerintah untuk Sumatera dan menempatkan perwira-perwira terpilih Angkatan Perang Republik Indonesia di Sumatera. Tokoh-tokoh ini secara mental telah dipersiapkan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan jika sewaktu-waktu Belanda menyerang dan Pemerintah RI di Yogyakarta tidak sanggup lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya.

3. Kalau negara-negara dari luar mendukung Negara RI, maka mereka akan bereaksi (menentang) Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948.

Pada dasarnya negara-negara di dunia mengecam tindakan Belanda yang berani melanggar Persetujuan Gencatan Senjata yang merupakan hasil perundingan antara RI dengan Belanda di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara (KTN), apalagi penyerangan tersebut dilakukan di muka hidung KTN. Mereka pun merealisasikan ancamannya terhadap Belanda dengan mengadakan konferensi-konferensi yang menghasilkan resolusi-resolusi yang diajukan kepada Dewan Keamanan PBB, dan Dewan Keamanan PBB pun menanggapi dengan serius. Resolusi-resolusi tersebut pada intinya mendesak Belanda untuk segera membebaskan para pemimpin politik RI yang ditawan dan mengembalikan Pemerintah RI ke Yogyakarta.

4. Kalau reaksi terhadap Belanda tersebut berhasil, maka Belanda akan mengakui Kedaulatan RI.

Pada dasarnya dengan adanya reaksi yang muncul baik dari dalam maupun dari luar RI terhadap Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, membuka jalan bagi terselenggaranya KMB di Den Haag pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949, yang menghasilkan Piagam Penyerahan Kedaulatan dari Negeri Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat tertanggal 27 Desember 1949 yang menandakan bahwa RIS menjadi negara yang merdeka dan berdaulat baik secara *de facto* maupun *de jure* yang diakui oleh dunia Internasional.

H. Metode Penelitian dan Pendekatan

1. Metode Penelitian

Penelitian Sejarah mempunyai ciri tersendiri dibanding dengan penelitian ilmu sosial. Penelitian Sejarah lebih menekankan pada dua hal pokok yaitu ruang dan waktu. Oleh karena itu setiap topik penelitian Sejarah yang kemudian menjadi historiografi harus mencakup kedua unsur tersebut. Penelitian ini secara eksplisit telah mencakup adanya dua unsur tersebut.

Metode penelitian secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam metode penelitian kuantitatif, data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis kemudian dikonversi dalam bentuk angka-angka. Sedangkan metode penelitian kualitatif, datanya berupa pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat. Karena skripsi ini datanya berupa pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat, maka termasuk penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif bisa ditempuh dengan dua cara yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian lapangan, peneliti mencari sumber dengan wawancara langsung, penyebaran kuesioner, dan sebagainya. Sedangkan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), peneliti mencari data-data yang telah dibukukan, seperti halnya dengan skripsi ini.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan penelitian kepustakaan, penulis ingin menggali teori-

teori dasar dan konsep-konsep yang telah dikemukakan para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder, dan menghindari duplikasi penelitian.²⁷

Dalam mencari sumber-sumber tulisan, penulis menggunakan data historis. Data historis yang dimaksud adalah pengumpulan keterangan yang berhubungan dengan proses perkembangan historis dari fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial dalam perurutan temporal yang mengandung dimensi waktu, yang memberikan sampel pembentuk sehingga terwujud keadaan sekarang.²⁸ Data Historis dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang ada di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma.

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan tentunya banyak buku-buku yang dibaca dalam rangka mengumpulkan dan menafsirkan gejala-gejala untuk diinterpretasikan guna menemukan generalisasinya. Penganalisaan digunakan untuk meramu data-data yang telah didapat guna mencari kesimpulan yang muncul. Pada dasarnya penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari beberapa permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

Yang dimaksud dengan metode sejarah disini adalah prosedur atau langkah-langkah kerja yang digunakan dalam proses menguji dan

²⁷ Masri Siarimbun dan Sofian Effendi (ed), 1987, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, hlm. 45.

²⁸ Kartini Kartono, 1980, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, ALUMNI, Bandung, hlm. 225-226.

menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif terhadap masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses tersebut disebut *historiografi* (penulisan sejarah). Dengan menggunakan metode sejarah dan *historiografi* (yang sering dipersatukan dengan nama metode sejarah), sejarawan berusaha untuk merekonstruksi masa lampau manusia sebanyak-banyaknya.²⁹ Menurut Louis Gottschalk, metode penelitian sejarah mempunyai empat tahap, yaitu : heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.³⁰

a. Heuristik

Heuristik adalah kegiatan peneliti memilih subyek untuk diteliti dan mengumpulkan sumber-sumber informasi yang relevan untuk keperluan subyek yang diteliti. Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Indonesia. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang ada di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, diantaranya adalah buku karangan Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville, Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat, Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949*; buku yang dihimpun oleh Badan Musyawarah Musea, *Yogyakarta Benteng Proklamasi*; buku yang dihimpun oleh Seskoad, *Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta Latar Belakang Dan Pengaruhnya*; buku karangan George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia*; buku

²⁹ Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 32.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 35-38.

karangan K.M.L. Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*; buku karangan D.R. A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 Agresi Militer Belanda II*, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 10 Perang Gerilya Semesta II*, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 11 Konferensi Meja Bundar*.

b. Kritik Sumber

Kritik sumber atau verifikasi merupakan uji keabsahan sumber.

Kritik sumber ada dua macam :

1) Kritik ekstern, untuk mengetahui *otentisitas* atau keaslian sumber.

Kritik ini dilakukan dengan cara meneliti jenis bahan, gaya penulisan, bahasa, dan jenis huruf yang digunakan.

2) Kritik intern, untuk mengetahui *kredibilitas* atau kebiasaan sumber untuk dipercayai.

Kritik ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang ada, sehingga dapat diperoleh fakta yang merupakan unsur untuk rekonstruksi.

Dalam penelitian ini, kritik ekstern tidak perlu dilakukan sebab *otentisitas* sumber yang digunakan tidak perlu diragukan. Dikatakan tidak diragukan karena sumber yang digunakan berupa buku pustaka asli yang merupakan hasil karya asli dari para pelaku sejarah atau saksi sejarah maupun bukan saksi atau pelaku sejarah. Kritik yang dilakukan

dalam penelitian ini adalah kritik intern, sebab *kredibilitas* sumber masih diragukan.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui *kredibilitas* suatu sumber digunakan metode perbandingan, yaitu membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain. Kesamaan informasi oleh beberapa sumber dipandang benar. Apabila terdapat perbedaan informasi tentang suatu masalah maka pemecahan yang ditempuh adalah mengikuti informasi yang disampaikan oleh kebanyakan sumber. Contoh : terdapat perbedaan informasi, mengenai sampai tidaknya mandat dari Presiden Sukarno kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Dalam buku karangan V. Sardjono dan GL. Marsadji, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Penyelamat Negara Dan Bangsa Indonesia* ditulis bahwa pembentukan PDRI didasarkan atas mandat dari Presiden Sukarno kepada Syafruddin Prawiranegara. Sedangkan dalam buku yang dikaji ulang oleh Abdurrachman Surjomihardjo dan JR. Chaniago, *PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Dikaji Ulang*; buku karangan Colin Wild dan Peter Carey, *Gelora Api Revolusi*; buku karangan Aboe Bakar Loebis, *Kilas Balik Revolusi*; buku karangan Ayib Rosidi, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT* ditulis bahwa pembentukan PDRI tidak didasarkan atas mandat dari Presiden Sukarno kepada Syafruddin Prawiranegara karena mandat belum sampai. Pemecahan yang



ditempuh oleh penulis adalah mengikuti informasi yang disampaikan lebih banyak sumber yaitu pembentukan PDRI di Sumatera tidak didasarkan atas mandat Presiden Sukarno kepada Syafruddin Prawiranegara karena mandat belum sampai.

c. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran merupakan tahap penting dalam penelitian sejarah karena tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Interpretasi ada dua macam :

- 1) Analisis, berarti menguraikan informasi atau data yang ditemukan dari berbagai sumber dan mengkaitkannya antara satu dengan yang lainnya.

Contoh : Dengan melihat kenyataan bahwa Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 berakhir dalam KMB yang menghasilkan keputusan tentang penyerahan kedaulatan atas RIS oleh Belanda, maka dapat kita analisis bahwa Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 menjadi bumerang bagi Belanda untuk menguasai Indonesia kembali. Dapat dikatakan pula bahwa Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 merupakan awal dari kekalahan Belanda yang pada akhirnya menyebabkan Belanda terusir dari Indonesia.

- 2) Sintesis, berarti mengelompokkan dan menyatukan informasi atau temuan data dari berbagai sumber.

Contoh : Penulis mendapat informasi dari buku karangan V. Sardjono dan GL. Marsadji, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Penyelamat Negara Dan Bangsa Indonesia*; buku karangan Saleh A. Djamhari, *MBKD (Markas Besar Komando Djawa) 1948-1949*; buku yang dihimpun oleh Badan Musyawarah Musea, *Yogyakarta Benteng Proklamasi*; buku yang dihimpun oleh Seskoad, *Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta Latar Belakang Dan Pengaruhnya*; dan buku yang dikaji ulang oleh Abdurrachman Surjomihardjo dan JR. Chaniago, *PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Dikaji Ulang* bahwa Pemerintah RI telah melakukan persiapan dalam bidang militer, politik, ekonomi, dan sosial untuk menghadapi kemungkinan sewaktu-waktu Belanda menyerang RI. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Pemerintah RI sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan sewaktu-waktu Belanda menyerang RI.

d. Historiografi (penulisan sejarah)

Historiografi merupakan penggambaran atau pengkisahan kembali suatu runtutan peristiwa yang telah terjadi berdasarkan data-data yang diperoleh dan telah diuji kebenarannya. Penulisan sejarah hendaknya dilakukan secara kronologis, sistematis, dan menggunakan gaya bahasa yang baku dan benar. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memenuhi kriteria suatu penulisan sejarah.

Penelitian tentang seputar Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 ini telah melalui tahap-tahap metode penelitian sejarah, yaitu : heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penulisan sejarah ini mencakup hal-hal penting yang diperhatikan oleh penulis seperti topik, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

Penelitian ini dikaji secara diskriptif analitis, sehingga tulisan merupakan hasil penggambaran dan pengkisahan tentang “Seputar Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948”; disini sumber-sumber yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensional, yaitu pendekatan yang menggunakan berbagai jenis konsep, hipotesis, dan teori sebagai kerangka referensi yang dipakai untuk mencari dan mengatur data; sehingga penulisan sejarah dapat lebih lengkap dalam mempelajari fenomena historis yang kompleks. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, politik, dan sosiologis.

Seseorang yang ingin menulis tentang masa lampau tepat kiranya menggunakan pendekatan historis. *History* itu sendiri menurut Louis Gottschalk berarti masa lampau umat manusia.³¹ Pengertian yang lebih

³¹ *Ibid.*, hlm. 27.

tajam diungkapkan oleh Sartono Kartodirdjo bahwa sejarah tidak hanya mengungkap peristiwa masa lampau saja tetapi juga mengungkap fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan dimana serta menerangkan bagaimana sesuatu telah terjadi. Pendekatan historis digunakan untuk mendiskripsikan dan menganalisa peristiwa Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948.

Pendekatan politik digunakan sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini, karena penelitian tentang “Seputar Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948” ini termasuk kategori sejarah politik. Pendekatan politik digunakan untuk mendiskripsikan dan menganalisa tentang faktor-faktor yang mendorong Belanda mengambil tindakan militer yang keduanya terhadap RI, kesiapan Pemerintah RI menghadapi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, reaksi yang muncul baik dari dalam maupun dari luar RI terhadap Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, dan akibat dari adanya reaksi-reaksi tersebut bagi proses menuju pengakuan kedaulatan Indonesia.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memberi gambaran mengenai kondisi masyarakat Indonesia sebelum, sewaktu dan sesudah terjadi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, kita mengetahui bahwa awal tahun 1948 sampai akhir tahun 1949 merupakan masa krisis bagi bangsa Indonesia terutama dalam bidang ekonomi karena adanya blokade ekonomi oleh Belanda terhadap daerah-daerah yang dikuasai RI. Hal ini membuat rakyat Indonesia hidup melarat, mereka kesulitan untuk

memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan kesehatan. Akan tetapi, kemiskinan yang menghimpit kehidupan rakyat Indonesia tidak menyurutkan semangat juang rakyat Indonesia untuk tetap berjuang melawan Belanda.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi berjudul “Seputar Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948” ini mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Mendiskripsikan dan menganalisa faktor pendorong Belanda mengambil tindakan militer yang keduanya terhadap RI dan meletusnya Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, dengan sub permasalahan :

A. Faktor Pendorong Belanda mengambil tindakan militer yang keduanya terhadap RI

1. Kemenangan Partai Katolik (*Katolieke Volks Partij*) dalam Pemilihan Umum di Negeri Belanda pada tanggal 7 Juli 1948
2. Keadaan Indonesia Pasca Perjanjian Linggarjati
3. Keadaan Indonesia Pasca Perjanjian Renville

B. Meletusnya Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948;

Bab III Mendiskripsikan dan menganalisa kesiapan Pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, dengan sub permasalahan :

A. Persiapan dalam Bidang Militer :

1. Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia
2. Siasat Pertahanan RI dalam Menghadapi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948

B. Persiapan dalam Bidang Politik :

1. Konsolidasi RI terhadap Wilayah di Luar Kekuasaan *De facto*
2. Konsolidasi RI terhadap Wilayah yang Diakui Secara *De facto*

C. Persiapan dalam Bidang Sosial

D. Persiapan dalam Bidang Ekonomi

Bab IV Mendiskripsikan dan menganalisa reaksi yang muncul baik dari dalam maupun dari luar RI terhadap Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, dengan sub permasalahan :

A. Reaksi dari dalam RI :

1. Dalam Bidang Politik, dengan pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera
2. Dalam Bidang Militer :
 - a. Pembentukan Pemerintahan Militer
 - b. *Ofensif* Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI)

B. Reaksi dari luar RI :

1. Diadakannya Konferensi Asia Mengenai Indonesia (*Asian Conference on Indonesia*)
2. Diadakan Perundingan Rum-Van Roijen atas Prakarsa UNCI
3. PBB dan Dunia Internasional Mengecam Tindakan Belanda
4. BFO (*Bijeenkomst Federal Overlag*) Berbalik Menentang Belanda

Bab V Mendiskripsikan dan menganalisa akibat dari adanya reaksi terhadap Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 bagi proses menuju pengakuan kedaulatan Indonesia, dengan sub permasalahan :

A. Konferensi Inter Indonesia (KII)

B. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Bab VI Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG BELANDA MENGAMBIL TINDAKAN MILITER YANG KEDUAKALINYA TERHADAP RI DAN MELETUSNYA AGRESI MILITER BELANDA II 19 DESEMBER 1948

A. Faktor-Faktor Pendorong Belanda Mengambil Tindakan Militer yang Keduakalinya Terhadap RI

1. Kaum Konservatif Memegang Tampuk Kekuasaan di Negeri Belanda

Pada tanggal 7 Juli 1948 di Negeri Belanda dilangsungkan pemilihan umum dengan hasil kemenangan bagi Partai Katolik (*Katolieke Volks Partij* atau KVP).³² Dengan ini maka Partai Katolik yang terdiri dari tokoh-tokoh yang sangat reaksioner pandangannya mengenai masalah Indonesia, mempunyai peluang besar untuk menempatkan orang-orang dari partainya untuk menduduki jabatan atau kedudukan yang mempunyai pengaruh dalam menentukan “merah hijaunya” sejarah Hindia Belanda. Dalam hal ini mereka membuat kebijakan atau keputusan menyangkut Hindia Belanda yang menguntungkan pihak Belanda supaya bisa tetap eksis di Indonesia.

Pada tanggal 7 Agustus 1948 dibentuk Kabinet Van Schaick-Dress, yang merupakan kabinet koalisi antara Partai Katolik dengan Partai Buruh. Susunan Kabinet Van Schaick-Drees adalah:

³² C. Smit, 1986, *Dekolonisasi Indonesia*, Pustaka Azet, Jakarta, hlm. 31.

Jabatan Perdana Menteri dipegang oleh Dr. W. Drees dari Partai Buruh; jabatan sebagai Menteri Urusan Daerah Seberang dipegang oleh Mr. E.M.J.A. Sassen dari Partai Katolik yang terkenal sebagai pengagum berat pemimpin Partai Katolik Prof. Romme yang mempunyai pandangan sangat reaksioner mengenai masalah Indonesia; jabatan sebagai Menteri Luar Negeri dipegang oleh Mr.D.U Stikker dari Partai Liberal (*Volkspartij voor Vrijheid en Democratie/VVD*); disetujui pula untuk mengangkat Dr.L.J.M. Beel sebagai pengganti Dr. H.J. Van Mook dengan jabatan dan gelar baru sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda (*Hoge Vertegen Woordinger Van Kroon/HVK*) di Indonesia.³³ Penggantian tersebut didasarkan pada alasan bahwa Dr.H.J. Van Mook dianggap oleh Partai Katolik mempunyai pandangan yang sangat progresif dalam pemecahan masalah di Indonesia dan dalam perundingan-perundingan dengan pihak Republik terlalu banyak memberi konsesi.

Dengan pengangkatan Beel sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia, terhitung mulai 3 November 1948, sudah dapat diramalkan akan terjalin kerjasama yang sangat erat antara Beel dengan Jenderal S. Spoor (Panglima Besar Pasukan Belanda di Indonesia, yang menurut anggapan umum adalah orang yang telah menasehati bahkan yang mendesak Pemerintah Belanda untuk melancarkan serangan militer yang pertama dan yang kedua terhadap Republik). Hal ini disebabkan pandangan dan pendirian politik dari kedua pejabat tinggi Pemerintah

³³ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 9.

Belanda tersebut boleh dikatakan identik yaitu menandakan bahwa pemecahan masalah di Indonesia harus bertolak pada pemulihan kembali kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia terlebih dahulu (*gezags herstel*) dan kalau perlu dengan tindakan militer dan kemudian baru diadakan perundingan dengan para pemimpin Republik yang berhaluan moderat.³⁴

Dengan bantuan Spoor dirumuskan oleh Beel suatu gagasan untuk melakukan serangan militer terhadap Republik Indonesia. Nampaknya Beel mendapat jaminan dari Spoor bahwa dengan aksi militer, Belanda pasti berhasil menduduki wilayah kekuasaan Republik di Jawa (yang belum dikuasai oleh pasukan Belanda pada aksi militer pertama). Dengan aksi militer, Yogyakarta serta wilayah lain dapat diduduki oleh karena pasukan Belanda yang berada di bawah komando Spoor sudah berjumlah 120.000 orang dengan perlengkapan berupa persenjataan yang canggih.³⁵

Sebagai kelanjutan politik aksi militer yang dianggap Beel pasti akan berhasil sesuai dengan rencana Spoor, menurut Beel harus diumumkan bahwa setelah Yogyakarta diduduki pasukan Belanda dan pemimpin-pemimpin pemerintah RI disingkirkan, Republik sudah tidak ada lagi (*heeft opgehouden te bestaan*).³⁶ Oleh karena itu Pemerintah Belanda mengambil prakarsa politik untuk mengumpulkan wakil-wakil pemerintah negara bagian dan daerah di luar wilayah kekuasaan Republik Indonesia

³⁴ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 10.

³⁵ K.M.L. Tobing, 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 79.

³⁶ Ide Anak Agung Gde Agung, 1983, *Renville*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 183.

untuk membentuk Pemerintah Federal Sementara (*federal interim government*) yang bekerjasama dengan Belanda untuk menyusun tatanan hukum baru di Indonesia dengan tujuan membentuk Negara Indonesia Serikat sesuai dengan konsep Belanda.

Sejarah Indonesia antara tahun 1945-1949 membuktikan bahwa golongan-golongan kolonial yang dahulu berkuasa di Hindia Belanda; pamong praja kolonial, tentara kolonial, dan kaum modal kolonial mempunyai kekuasaan besar dalam menentukan politik Belanda. Adapun pendirian golongan-golongan ini dapat disimpulkan dalam beberapa pokok berikut.³⁷

- a. Rakyat banyak menginginkan keamanan, dan keamanan hanya dapat diberikan oleh Belanda.
- b. Yang tidak menginginkan kembalinya Belanda hanyalah segolongan kecil, yang terdiri dari beberapa *intellectuelen* dan “gerombolan-gerombolan yang bersenjata”. Mereka berusaha mempertahankan kedudukannya sekarang yang menguntungkan.
- c. Kalau golongan kecil ini dipukul, maka dalam waktu yang singkat dapat dihancurkan, dan rakyat akan membantu Belanda.

Dari sini kita memperoleh suatu kesimpulan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, memaksa Belanda untuk menentukan sikapnya terhadap keinginan

³⁷ T.B. Simatupang, 1980, *Laporan Dari Banaran*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 138.

kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Dalam hal ini, kekuatan dan kesungguhan nasionalisme dari bangsa Indonesia tidak pernah dipertimbangkan oleh Belanda; bahkan Belanda menghadapi soal baru dengan ukuran lama. Buktinya Belanda melancarkan aksi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 terhadap Republik Indonesia, yang pada dasarnya merupakan percobaan Belanda untuk membenarkan “kepercayaannya” yang nyatanya telah membawa kekacauan dan penderitaan di Negeri Indonesia.

2. Keadaan Indonesia Pasca Perjanjian Linggarjati

Pertempuran-pertempuran antara pihak RI dengan Belanda dapat diakhiri dengan adanya persetujuan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946, yang selanjutnya membuka peluang bagi tercapainya Persetujuan Linggarjati pada tanggal 15 November 1946.³⁸ Naskah Persetujuan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk, sekarang Istana Merdeka, Jakarta. Ketua dan anggota Delegasi Indonesia yang membubuhkan tanda tangan pada Persetujuan Linggarjati terdiri dari Sutan Syahrir, Mr. Moh. Roem, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, dan Dr. A.K Gani, sedangkan Delegasi Belanda yang turut menandatangani adalah Prof. Schermehorn, Dr. Van Mook, dan Van Pool.³⁹

Sejarah Persetujuan Linggarjati membuktikan bahwa bagian terbesar dari pendapat umum pada kedua belah pihak tidak dapat menerima jalan

³⁸ K.M.L. Tobing, 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 2.

³⁹ Sekretaris Negara, *op.cit.*, hlm. 22.

itu. Perjanjian Linggarjati dijadikan alat untuk mencapai tujuan dari masing-masing pihak, baik dari RI maupun Belanda.

Bagi pihak Belanda, Persetujuan Linggarjati digunakan untuk menegakkan kedaulatannya di Indonesia; melalui kedaulatan tersebut, Belanda berusaha menghapus RI dengan cara meniadakan pengakuan kenyataan Republik dan menggantungkan patokan waktu mengenai selesainya kedaulatan Belanda di Indonesia menurut kehendak Belanda sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa beberapa hari sebelum Pemerintah Belanda menginstruksikan Komisi Jenderal untuk menandatangani naskah Persetujuan Linggarjati; pada tanggal 17 Maret 1947, tentara Belanda kembali mengadakan operasi yang dapat disebut sebagai kelanjutan dari operasi Siduarjo-Krian pada tanggal 24 Januari 1947. Dalam operasi mereka kali ini, tentara Belanda menyerbu dan menduduki Mojokerto; pintu air Lengkong dan Mlirip. Adapun peristiwa pendudukan Mojokerto, Lengkong, dan Mlirip; oleh Pemerintah Belanda dianggap sebagai suatu tindakan yang harus dilakukan demi keselamatan delta Surabaya yang sangat tergantung pada dua pintu air tersebut.⁴⁰

Pada dasarnya Belanda tidak mempunyai niat untuk merealisasikan Perjanjian Linggarjati, sehingga dalam realisasinya pun Persetujuan Linggarjati mengalami kegagalan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kenyataan bahwa setelah persetujuan ditandatangani, Jenderal Spoor (Panglima Tentara Belanda di Indonesia) mengirim nota kepada

⁴⁰ K.M.L. Tobing, *op.cit.*, hlm. 51-52.

pemerintahnya yang dalam banyak hal terbukti menjadi pedoman politik Belanda terhadap Indonesia. Pokok-pokok nota Spoor adalah :⁴¹

- a. Uni akan menjadi pengertian yang kosong apabila tentara Belanda tidak tetap berada di Indonesia. Kerjasama dalam bidang pertahanan yang menjadi salah satu pokok dari uni harus dipergunakan untuk mengekalkan kekuasaan militer Belanda di Indonesia.
- b. KNIL (*Koninklijk Nederlands Indische Leger* atau Angkatan Darat Kerajaan Belanda di Indonesia) akan diberi bentuk baru dan akan menjadi tulang punggung kekuatan militer di Indonesia di bawah pimpinan Belanda.
- c. Diberikan kepuasan yang tidak begitu berbahaya kepada nasionalisme Indonesia dalam pembentukan batalyon-batalyon territorial.
- d. TNI harus dihancurkan, karena tidak dapat disesuaikan dengan skema Belanda.
- e. Dalam penghancuran TNI, diusahakan agar terlebih dahulu TNI diisolir, artinya pengaruh politik dari pemimpin-pemimpin Indonesia tidak di pihak TNI, sehingga penghancuran TNI dapat digambarkan sebagai pemberantasan kaum pemberontak.

Isi nota Spoor tersebut jelas menghendaki RI hancur, sekaligus berisi petunjuk-petunjuk untuk menghancurkan RI. Dari sini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya nota spoor adalah pisau tajam Belanda yang telah menikam Persetujuan Linggarjati dari belakang.

⁴¹ T.B. Simatupang, *op.cit.*, hlm. 139.

Awan peperangan mulai menggelapkan suasana sejak hari penandatanganan Persetujuan Linggarjati. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa begitu Persetujuan Linggarjati ditandatangani, segera timbul masalah karena terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan dalam persetujuan. Adanya perbedaan penafsiran tersebut dikarenakan Partai Katolik yang mempunyai kedudukan yang berpengaruh dalam Parlemen Belanda tidak dapat menyetujui pokok-pokok penting dalam Persetujuan Linggarjati; sehingga harus diadakan tafsiran yang mencerminkan keinginan Partai Katolik dan kawan-kawannya, di mana tafsiran-tafsiran tersebut memberi arti yang sangat berbeda dengan jiwa Persetujuan Linggarjati yang diparaf oleh Schermerhorn dan Sutan Syahrir pada tanggal 15 November 1946.⁴² Misalnya mengenai masalah Irian Barat (Nieu Guinea) tiba-tiba Pemerintah Belanda menyatakan bahwa wilayah tersebut tidak akan diserahkan kepada Negara Indonesai Serikat yang merdeka dan berdaulat, sedangkan secara jelas di dalam pasal 3 Persetujuan Linggarjati tertera bahwa wilayah Negara Indonesia Serikat akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda dulu, jadi termasuk Irian Jaya.⁴³

Sementara itu suasana perundingan untuk menyelesaikan masalah politik antara Indonesia dengan Belanda semakin genting. Belanda berusaha untuk memaksakan keinginannya yang merugikan bangsa Indonesia. Sebagai realisasi dari Persetujuan Linggarjati yang

⁴² P.R.S. Mani, *op.cit.*, hlm. 104.

⁴³ Ide Anak Agung Gde Agung, 1985, *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 135.

menguntungkan pihak Belanda adalah pada tanggal 27 Mei 1947, Komisi Jenderal atau Delegasi Belanda mengirimkan nota bersifat ultimatif yang harus dijawab oleh RI dalam tempo 14 hari. Bunyi nota tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Membentuk suatu Pemerintahan Peralihan Sementara bersama.
- b. Mengeluarkan uang bersama dengan pembentukan badan bersama yang menentukan nilai uang tersebut terhadap nilai mata uang asing.
- c. RI harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda.
- d. Menyelenggarakan ketertiban dan keamanan bersama di seluruh Indonesia termasuk di daerah RI yang memerlukan bantuan Belanda (*gendarmerie* bersama).
- e. Menyelenggarakan pemilikan bersama atas import dan eksport.

Terhadap tuntutan tersebut di atas, dengan terpaksa Perdana Menteri Sutan Syahrir bersedia mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan. Tetapi kebijakan yang ditempuh oleh Sutan Syahrir tersebut mendapat reaksi keras dari kalangan partai-partai politik, bahkan parlemen dan kabinetnya pun menentang. Peristiwa tersebut menyebabkan jatuhnya Kabinet Sutan Syahrir, yang kemudian digantikan oleh Kabinet Amir Syarifuddin dimana Amir Syarifuddin kembali memberikan jawaban yang pada hakikatnya sama.

⁴⁴ Sekretaris Negara, *op.cit.*, hlm. 144.

Sementara itu, konsesi-konsesi yang diberikan oleh pihak RI rupanya tidak diindahkan oleh pihak Belanda; Belanda tetap pada pendiriannya. Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1947, Belanda mengulangi tuntutanannya yang disertai ancaman supaya RI membalas dalam waktu 32 jam. Jawaban dari pihak RI yang disampaikan oleh Amir Syarifuddin pada tanggal 17 Juli 1947 melalui RRI Yogyakarta atas nota ulangan tersebut, ditolak oleh Van Mook.

Hal ini menyebabkan keadaan politik antara RI dengan Belanda semakin tegang dan Belanda bersiap-siap menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya. Pada tanggal 20 Juli 1947, Van Mook mendapat kuasa penuh dari Pemerintah Belanda untuk mengadakan serangan militer dan melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu karena Belanda merasa tidak mungkin menyelesaikan pertikaianya dengan RI melalui jalan diplomasi.⁴⁵ Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan militer secara serentak terhadap wilayah-wilayah RI. Serangan militer ini dikenal dengan Agresi Militer Belanda I. Tentara Belanda menyerang RI dari segala jurusan yaitu dari darat, laut, dan udara. Dalam serangan ini, Jawa Barat kecuali Banten, Jawa Tengah pantai utara dari Semarang-Tegal sampai Banyumas, Jawa Timur bagian timur, serta beberapa daerah di Palembang dan Sumatera Timur berhasil diduduki Belanda.⁴⁶

⁴⁵ A.H. Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 Agresi Militer Belanda I*, Angkasa, Bandung, hlm. 99.

⁴⁶ Seskoad, *op.cit.*, hlm. 61.

3. Keadaan Indonesia Pasca Perjanjian Renville

Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 memberi keuntungan besar bagi Belanda karena Belanda berhasil merebut daerah-daerah RI yang potensial di bidang ekonomi. Dengan campur tangan PBB, maka pertempuran dapat dihentikan untuk sementara. PBB membentuk KTN (*Good Offices Committee*) untuk menengahi pertikaian antara Belanda dengan Indonesia. Atas prakarsa KTN, maka dimulailah kembali perundingan antara RI dengan Belanda di atas puing-puing Perjanjian Linggarjati. Perundingan tersebut diadakan di atas sebuah kapal milik Amerika Serikat bernama Renville, dan kemudian hasil perundingan yang dicapai disebut Perjanjian Renville.⁴⁷

Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, sedangkan Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, seorang Indonesia yang memihak Belanda. Penandatanganan Perjanjian Renville dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1948, disusul dengan instruksi penghentian tembak menembak pada tanggal 19 Januari 1948. Perjanjian Renville terdiri dari 10 pasal persetujuan gencatan senjata, 12 pasal prinsip politik, dan 6 pasal prinsip tambahan KTN.⁴⁸ Perjanjian Renville menempatkan RI pada kedudukan yang bertambah sulit. Wilayah RI semakin sempit, dikurung oleh daerah pendudukan Belanda. Kesulitan ini ditambah dengan adanya blokade ekonomi yang dilaksanakan oleh Belanda secara ketat.

⁴⁷ P.R.S. Mani, *op.cit.*, hlm. 140.

⁴⁸ K.M.L. Tobing, 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 36-43.

Belum lagi kering tinta tanda tangan Perjanjian Renville, perang tafsir dan tuduh-menuduh antara RI dengan Belanda sudah berkecamuk. Keadaan itu tidak berbeda dengan nasib Persetujuan Linggarjati. Perang tuduh-menuduh itu berkisar tentang pelaksanaan *cease fire*, tafsiran “Notulen Kaliurang”, hubungan luar negeri RI, dan pembentukan negara federal oleh Belanda di setiap daerah yang mereka duduki. Pada kelanjutan perundingan berikutnya timbul kesulitan dalam masalah plebisit, pemerintahan peralihan, Uni Indonesia-Belanda.⁴⁹

Pada dasarnya Persetujuan Renville yang ditandatangani oleh wakil-wakil RI dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948 makin lama makin diingkari oleh Belanda. Di sini dapat disimpulkan bahwa persetujuan antara RI dengan Belanda dalam menyelesaikan pertikaian, oleh Belanda digunakan untuk mengulur waktu dalam rangka memperkuat dan memusatkan kekuatannya kembali setelah mulai terdesak oleh serangan-serangan pasukan RI; atau dengan kata lain segala macam persetujuan gencatan senjata dan perundingan bagi Belanda merupakan siasat mengulur-ulur waktu guna mempersiapkan pasukannya sehingga dapat memberikan pukulan terakhir terhadap RI. Adapun maksud Belanda sudah jelas yaitu untuk menghancurkan RI supaya Belanda bisa menjajah Indonesia kembali.

Dalam Persetujuan Renville disepakati bahwa RI bersedia mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia untuk sementara waktu. Persetujuan

⁴⁹ Seskoad, *op.cit.*, hlm. 81.

tersebut juga memuat ketentuan mengenai jaminan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat di Jawa, Sumatera, dan Madura; yang berkaitan dengan hubungan mereka mengenai rencana pembentukan sebuah federasi. Sebagai imbalannya, RI harus mengakui apa yang dinamakan “Garis Van Mook “, sebagai garis gencatan senjata; yang disahkan oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 5 September 1947.⁵⁰ (lihat lampiran 2, hlm. 158)

Garis Van Mook merupakan garis demarkasi yang ditetapkan Belanda setelah diumumkannya gencatan senjata. Garis ini menghubungkan titik-titik paling depan dari posisi-posisi terdepan pasukan Belanda dan kadang-kadang malah melampauinya. Daerah di antara posisi-posisi terdepan Belanda tersebut dinyatakan sebagai berada di dalam kekuasaan Belanda dan operasi pembersihan dilancarkan terhadap pasukan RI yang masih berada di sana.⁵¹ Dengan itikad baik untuk mentaati ketentuan dalam Persetujuan Renville, TNI terpaksa hijrah meninggalkan kantong-kantong gerilya, walaupun sebenarnya mereka menentang hal itu. (lihat lampiran 3, hlm.159)

Perjanjian Renville dianggap membawa kemunduran bagi RI. Dalam keadaan seperti ini, Persetujuan Renville tidak bisa diterima oleh koalisi pemerintah. Setelah Amir Syarifuddin menandatangani Persetujuan Renville pada tanggal 17 Januari 1948, dia mendapatkan dirinya ditinggalkan oleh partner-partner koalisinya. Pada tanggal 23 Januari

⁵⁰ K.M.L. Tobing, *op.cit.*, hlm. 28.

⁵¹ Ulf Sundhaussen, 1986, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, LP3ES, Jakarta, hlm. 61.

1948, Amir Syarifuddin menyampaikan permintaan berhenti dan menyerahkan mandat kepada Presiden; Presiden kemudian menunjuk Drs. Moh. Hatta sebagai formatur kabinet Presidensiil. Pada tanggal 29 Januari 1948 Hatta berhasil membentuk kabinetnya, dengan programnya berunding atas dasar “Renville”, mempercepat pembentukan NIS, Rasionalisasi dan Rekonstruksi, serta pembangunan.⁵² Amir Syarifuddin bersama dengan orang-orang komunis, Partai Buruh, dan Pesindo menjadi oposisi.

Dalam rangka menciptakan kekuatan, pada konferensi federal tanggal 29 Mei 1948 di Bandung, Belanda membentuk BFO (*Bijeenkomst Federal Overlag*) atau Badan Permusyawaratan Federal yaitu lembaga permusyawaratan antara wakil-wakil negara bagian dan daerah-daerah di luar wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya Belanda mengikat Negara-negara Bonekanya dalam suatu persetujuan yang disebut dengan BIO (*Besluit Bewind Indonesie in Overgangstijd*) pada tanggal 14 Desember 1948, yaitu tatanan hukum baru di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Tatapraja dalam Masa Peralihan (sebuah undang-undang yang berisikan jaminan akan kedaulatan Belanda di Indonesia).⁵³

Situasi Internasional pada saat itu sangat menguntungkan Belanda. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat sangat khawatir apabila Indonesia mengalihkan pandangannya ke Uni Soviet berhubung kaum

⁵² A.H. Nasution, 1968, *Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jilid II*, Seruling Masa, Jakarta, hlm. 129.

⁵³ Ide Anak Agung Gde Agung, *op cit.*, hlm. 420.

komunis di Asia seperti di Cina makin berkuasa. Untuk membendung kaum komunis di Indonesia, Amerika Serikat telah memperlengkapi persenjataan Belanda seharga \$2.000.000,-⁵⁴

Kedudukan Belanda pada saat itu sangat kuat, sebaliknya kedudukan RI lemah. Wilayah kekuasaan RI semakin sempit disertai dengan meningkatnya pergolakan politik. Sedangkan hijrahnya TNI meninggalkan kantong-kantong gerilya di Jawa Barat, telah memberi kesempatan munculnya gerakan DI/TII yang merupakan kekuatan baru di dalam negeri yang menentang Republik; di samping membawa pengaruh ekonomis dan sosiologis yang merugikan.

Di dalam negeri, Kabinet Hatta dirongrong oleh kegiatan-kegiatan politik dari FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kegiatan politik FDR disertai dengan usaha-usaha untuk memancing bentrok dengan lawan politiknya. Contohnya : pada tanggal 5 Juli 1948 kaum buruh yang berada di bawah pengaruh FDR mengadakan pemogokan di pabrik karung Delanggu (Klaten). Lima hari kemudian terjadi bentrokan antara kelompok pemogok dengan STII (Sarekat Tani Islam Indonesia).⁵⁵

Keadaan bertambah panas setelah tokoh PKI Muso dan Suripno kembali ke tanah air pada bulan Mei 1948.⁵⁶ Mereka giat melakukan propaganda menentang pemerintah RI; misalnya Muso mengecam

⁵⁴ A.H.Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 Agresi Militer Belanda II*, Angkasa, Bandung, hlm. 28.

⁵⁵ Colin Wild dan Peter Carey, 1982, *Gelora Api Revolusi*, BBC Seksi Indonesia dan Gramedia, Jakarta, hlm. 184-185.

⁵⁶ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 33.

kebijaksanaan pemerintah dan strategi perjuangan pemerintah dengan menyatakan bahwa Sukarno-Hatta telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda dan Inggris serta hendak menjual tanah air kepada kaum kapitalis dengan dalih tetap melaksanakan Persetujuan Renville; padahal Persetujuan Renville yang mereka gugat adalah hasil kerja dari tokoh PKI sendiri yakni Amir Syarifuddin selama menjabat sebagai Perdana Menteri. Puncak dari situasi demikian adalah meletusnya pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948; dimana PKI menyatakan diri tidak terikat lagi dengan RI dan Sukarno-Hatta.⁵⁷ Mereka memaklumkan pembentukan Republik Rakyat Indonesia, lagu kebangsaan baru dan bendera kebangsaan baru. Maklumat tersebut dibacakan oleh Sumarno selaku Gubernur Militer daerah Madiun atas nama Pemerintahan Rakyat di Madiun.⁵⁸

Pecahnya Pemberontakan PKI di Madiun, mendorong Pemerintah RI segera mengambil tindakan-tindakan untuk menumpasnya. Dengan Gerakan Operasi Militer I yang dilakukan oleh Angkatan Perang RI, maka pada tanggal 30 September 1948 pukul 16.15 WIB Kota Madiun berhasil direbut kembali.⁵⁹ Dua bulan kemudian operasi-operasi penumpasan dinyatakan selesai; sayang sekali belum sempat oknum-oknum yang terlibat diadili, Belanda menyerang RI sehingga banyak di antara mereka yang lolos. Walaupun Pemberontakan PKI berhasil ditumpas, tetap membawa kerugian besar bagi Republik. Pemberontakan PKI menelan

⁵⁷ V. Sardjono dan GL. Marsadji, *op.cit.*, hlm. 3.

⁵⁸ T.B. Simatupang, *op cit.*, hlm. 115.

⁵⁹ Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 155.

korban jiwa yang tidak sedikit bagi kedua belah pihak; di samping kerugian material. Pemberontakan PKI mengakibatkan bangsa Indonesia pecah dari dalam yang sebenarnya sedang menghadapi musuh bersama yaitu, Belanda.

Sementara itu pertikaian yang terjadi di kalangan Republik sebagai akibat dari Persetujuan Renville, kegoncangan di kalangan TNI sehubungan dengan adanya Program Rekonstruksi dan Rasionalisasi, serta penumpasan pemberontakan PKI yang menelan daya upaya dan kekuatan Republik; memberi kesempatan bagi Belanda untuk lebih menekan RI. Perundingan-perundingan yang dilakukan di bawah pengawasan KTN selalu menemui jalan buntu sebab Belanda sengaja mengemukakan hal-hal yang tidak mungkin untuk diterima oleh RI.

Dalam situasi yang gawat ini, pada tanggal 13 Desember 1948 KTN meminta Hatta untuk menyelenggarakan perundingan dengan Belanda. Akan tetapi perundingan sama sekali tidak bisa memperbaiki keadaan. Bahkan pada tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30, pihak Belanda memberitahukan kepada Merle Cochran dan Mr. Soedjono bahwa Belanda tidak lagi mengakui dan terikat pada Persetujuan Renville. Bahkan pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 05.30 pagi Belanda melancarkan serangan militer yang dianggapnya sebagai serangan polisionil terhadap RI.⁶⁰

⁶⁰ Badan Musyawarah Musea, *op.cit.*, hlm. 130.

B. Meletusnya Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948

Perundingan-perundingan masih tetap dilaksanakan untuk membahas pelaksanaan Persetujuan Renville, walaupun tanpa hasil. Dalam hal ini Belanda tidak bermaksud melaksanakan persetujuan dengan sungguh-sungguh, sehingga setiap perundingan yang diadakan selalu menemui jalan buntu.

Belanda sebaliknya berusaha membuat suatu keadaan di mana mereka cukup mempunyai alasan yang kuat untuk memulai peperangan baru, misalnya dengan membuat dan mengumumkan dokumen-dokumen palsu, menyiarkan berita-berita tentang perempuan-perempuan Belanda yang ditahan dengan paksa di daerah Republik, berusaha untuk membuktikan bahwa Republik bersifat komunis dll. Terutama setelah pemberontakan PKI Muso, jawatan propaganda dari Tentara Belanda tidak henti-hentinya menyiarkan berita yang memberi kesan kepada dunia Internasional bahwa keamanan tidak dapat dikembalikan dan dipelihara oleh Republik. Kampanye hasut perang ini tetap diteruskan meskipun KTN telah beberapa kali meminta kepada Belanda untuk menghentikan penyiaran berita-berita hasut perang tersebut karena beberapa kali terbukti kedustaannya.

Sementara itu, posisi Belanda sangat kuat; kepungan politis terhadap pusat kekuatan Republik di Jawa dan Sumatera berhasil dengan jalan mendirikan negara-negara boneka di luar Jawa dan Sumatera. Berdirinya negara-negara boneka tersebut mengakibatkan potensi kekuatan pro Republik di luar Jawa dan Sumatera menjadi lemah, sehingga Jawa dan Sumatera



terisolir. Usaha mendirikan negara-negara boneka tersebut juga dilakukan di Jawa dan Sumatera; hal ini menyebabkan RI terjepit. Sedangkan perjanjian-perjanjian politik seperti Linggarjati dan Renville menempatkan Belanda pada posisi yang kuat.

Pada tanggal 17 November 1948, Dewan Menteri Belanda mengirim satu delegasi ke Indonesia diketuai Menteri Sassen dan Menteri Stikker untuk mengadakan perundingan dengan Republik mengenai penataan gencatan senjata yang dianggap asasi oleh Belanda.⁶¹ Akan tetapi perundingan tersebut tidak berhasil mencapai kata mufakat, terutama mengenai kedudukan TNI dan penggunaan Angkatan Perang Belanda selama masa peralihan.

Ketika segenap staf KTN mengadakan perundingan di Kaliurang pada tanggal 17 Desember 1948, tiba-tiba datang sebuah radiogram yang bersifat ultimatif dari pihak Belanda, di mana Hatta diharuskan memberi jawaban dalam waktu kurang dari 24 jam. Hatta sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab dan mempunyai harga diri tidak dapat memenuhi tuntutan pihak Belanda yang bertentangan dengan norma dan tatakrma diplomatik tersebut. Dalam surat Pemerintah Belanda tersebut dicantumkan unsur-unsur baru mengenai ketentuan tatanan hukum baru di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Tatapraja dalam Masa Peralihan (*Besluit Bewind Indonesia in Overgangstijd/BIO*), yaitu sebuah undang-undang yang berisikan jaminan akan kedaulatan Belanda di Indonesia.⁶² Hal ini berarti kedudukan RI akan sama dengan kedudukan negara-negara boneka lainnya yang akan

⁶¹C. Smit, *op.cit.*, hlm. 32.

⁶²Ide Anak Agung Gde Agung, *Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949*, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, Sebelas Maret University Press, Surakarta, hlm. 22.

menyerahkan kedaulatan dan tunduk terhadap segala peraturan yang dibuat oleh Belanda. Adapun jawaban RI terhadap ultimatum tersebut dibawa oleh Merle Cochran ke Jakarta pada tanggal 18 Desember 1948.

Berdasarkan keadaan dimana Merle Cochran belum kembali ke Yogyakarta, ditambah dengan perundingan di Kaliurang di bawah pengawasan KTN sedang berlangsung; maka tidak ada dugaan sama sekali dari pihak RI maupun KTN bahwa Belanda akan mengadakan serangan militer secara mendadak pada keesokan harinya; meskipun Belanda secara tidak resmi pernah menyatakan telah siap untuk mengadakan perebutan kekuasaan dengan cara kekerasan. Perhitungan bahwa Belanda tidak akan menyerang, ternyata meleset; dalam hal ini Belanda sudah merasa dirinya cukup kuat untuk memaksakan kehendaknya terhadap RI dengan cara kekerasan dan bersikap mengesampingkan peran KTN.

Menurut pendapat penulis, faktor utama yang menyebabkan Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua terhadap Republik pada tanggal 19 Desember 1948 adalah tindakan terkutuk yang telah dilakukan oleh Beel. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kronologi peristiwa menjelang Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948. Awalnya berdasarkan laporan Sassen (selaku Menteri Urusan Tanah Seberang), Dewan Menteri Belanda dalam sidangnya memutuskan supaya aksi militer Belanda terhadap RI dilakukan pada tanggal 13 Desember 1948.⁶³ Akan tetapi pada tanggal 13 Desember 1948 Hatta mengirimkan surat kepada Pemerintah Belanda yang berisi saran-

⁶³ Ide Anak Agung Gde Agung, 1983, *Renville*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 187-188.

saran yang sangat responsif untuk meneruskan perundingan lagi dengan pihak Belanda; dan anggota-anggota Kabinet dari Partai Buruh berpendapat bahwa surat Hatta tersebut layak untuk mendapat perhatian, penilaian, dan jawaban yang wajar. Apabila anggota Partai Katolik tetap berpendirian untuk melancarkan aksi militer dalam taraf perkembangan yang terbaru, maka anggota-anggota kabinet dari Partai Buruh akan mengundurkan diri, yang akan mengakibatkan terjadinya suatu krisis kabinet. Dalam hal ini krisis kabinet tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu aksi militer yang sudah ditetapkan berlangsung pada tanggal 13 Desember 1948 ditunda dan diputuskan bahwa Pemerintah Belanda selayaknya membalas surat Hatta tersebut.⁶⁴

Keputusan kabinet tersebut ditentang hebat oleh Beel dan para pejabat tinggi Angkatan Perang Belanda di Indonesia. Sebagai realisasinya, surat Pemerintah Belanda kepada Cochran yang berisi jawaban atas surat Hatta tertanggal 13 Desember 1948, yang tiba di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1948 ditahan oleh Beel karena Beel berpendirian bahwa harus segera diadakan aksi militer terhadap RI dan surat menyurat membuat persoalan menjadi bertele-tele dan merugikan kedudukan Belanda. Atas desakan Sassen akhirnya pada tanggal 17 Desember 1948 Beel memerintahkan Elink Schuurman untuk mengawatkan surat Pemerintah Belanda kepada Cochran di Yogyakarta; diterima oleh Hatta pada tanggal 17 Desember 1948 pukul 16.30 WIB. Dalam kawat Pemerintah Belanda tersebut, Beel sengaja menambahkan dengan batas

⁶⁴ C. Smit, *op.cit.*, hlm. 34-35.

waktu jawaban harus diberikan pada tanggal 18 Desember 1948 pukul 10.00 WIB karena Beel mengetahui bahwa Hatta tidak mungkin memberikan jawaban terhadap kawat yang begitu penting dalam waktu yang sedemikian singkat.⁶⁵

Oleh karena sampai tanggal 18 Desember 1948 pukul 8.20 waktu Belanda atau pukul 15.20 WIB tidak diterima jawaban dari Hatta atas kawat Pemerintah Belanda tertanggal 16 Desember 1948, maka Pemerintah Belanda mengirim kawat lewat sandi yang berisi kata "TIDAK" yang berarti bahwa Beel diizinkan untuk melancarkan aksi militer terhadap Republik Indonesia, yang akan dimulai pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 pukul 00.01 WIB.⁶⁶ Berdasarkan perkembangan itu, Wakil Ketua Delegasi Belanda Elink Schuurman menyampaikan sepucuk surat kepada Cochran pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30 WIB untuk memberitahu KTN bahwa Pemerintah Belanda berdasarkan pasal 10 Persetujuan Gencatan Senjata membatalkan Persetujuan Gencatan Senjata terhitung mulai hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 pukul 00.01 WIB dengan alasan bahwa Republik Indonesia tidak mematuhi Persetujuan Gencatan Senjata tersebut.⁶⁷ Sekretaris Delegasi Belanda Mr. J. Riphagen menyampaikan surat yang sama bunyinya kepada Sekretaris Jenderal Delegasi Indonesia Mr. Soedjono pada hari yang sama pukul 23.40 WIB.⁶⁸

⁶⁵ Ide Anak Agung Gde Agung, 1994, *Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949*, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, hlm. 23.

⁶⁶ K.M.L. Tobing, *op.cit.*, hlm. 169.

⁶⁷ George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm. 425-426.

⁶⁸ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 41.

Sekitar tengah malam antara tanggal 18 dan 19 Desember 1948, pihak Belanda telah memutuskan hubungan kawat antara Jakarta dengan Yogyakarta, sehingga Cochran tidak dapat menyampaikan nota Pemerintah Belanda pada tanggal 18 Desember 1948 kepada Pemerintah RI yang diterima pada hari itu pukul 23.30 WIB untuk membatalkan Persetujuan Gencatan Senjata. Sekretaris Jenderal Delegasi Republik Indonesia, Mr. Soedjono juga tidak dapat menghubungi pemerintahnya di Yogyakarta untuk memberitahukan keputusan Pemerintah Belanda kepada pemerintahnya.⁶⁹

Pagi itu, Minggu tanggal 19 Desember 1948 kehidupan kota Yogyakarta tampak normal. Penduduk melakukan rutinitas sehari-hari meskipun suasana politik semakin panas. Beberapa orang pedagang tampak berjalan beriringan menuju pasar dengan membawa buah-buahan, sayur-sayuran, dan barang dagangan lainnya. Sekali-kali tampak gerobak dan sepeda.

Suasana di Lapangan Udara Maguwo masih sepi. Beberapa orang anggota AURI tampak sedang melakukan tugas jaga tetapi sebagian besar masih tidur karena pada malamnya mereka mempersiapkan keberangkatan Angkatan Perang Republik Indonesia yang akan berangkat ke Sumatera. Banyak juga anggota tentara yang telah pergi ke luar kota untuk latihan militer. Penjagaan dilakukan oleh 150 orang anggota pertahanan pangkalan dengan persenjataan beberapa pucuk senapan dan sebuah senapan anti pesawat, sedangkan senjata berat masih dalam perbaikan.⁷⁰

⁶⁹ Badan Musyawarah Musea, *op.cit.*, hlm. 130.

⁷⁰ Seskoed, *op.cit.*, hlm. 89.

Kira-kira pukul 05.00 WIB terdengar bunyi pesawat terbang di atas kota Yogyakarta. Penduduk mengira itu adalah latihan perang. Beberapa hari sebelumnya penduduk sudah mendengar pengumuman bahwa pada hari itu akan diadakan latihan perang. Akan tetapi ketika pesawat itu mulai membom beberapa tempat di Yogyakarta, penduduk mulai panik dan tahulah mereka bahwa pesawat tersebut bukan pesawat AURI yang sedang latihan militer tetapi milik Belanda. Penduduk mulai panik dan berlarian kesana-kemari untuk mencari perlindungan. Pedagang-pedagang yang sudah siap menggelar dagangannya di pasar Beringharjo, Sentul, Lempuyangan, Ngasem, dan tempat-tempat lain segera menutup warungnya masing-masing.⁷¹ Mengenai arah gerakan tentara Belanda dalam agresi militernya yang kedua terhadap RI di Pulau Jawa dapat dilihat pada lampiran 4, hlm. 160.

Lapangan Terbang Maguwo dihujani bom oleh pesawat pembom Mitchell (B. 25) milik Belanda yang segera diikuti dengan penerjunan satu batalyon pasukan Baret Hijau di bawah pimpinan Kolonel Van Langen. Pasukan Baret Hijau mendapat tugas untuk merebut Lapangan Terbang Maguwo. Pagi itu, beberapa pesawat Belanda yang terdiri dari Pesawat-pesawat Spitfire, Mustang, Lookhead, dan Mitchell melayang-layang di atas kota Yogyakarta yang kemudian menembaki dan membom beberapa tempat di kota Yogyakarta. Bersamaan dengan penerjunan pasukan Belanda di Maguwo, di bagian barat kota Yogyakarta juga diterjunkan pasukan boneka dari pesawat terbang. Tujuan penerjunan pasukan boneka adalah untuk mengalihkan

⁷¹ Mohamad Roem, dkk, *op.cit.*, hlm. 69.

perhatian pasukan RI (dikiranya pasukan penjaga keamanan kota Yogyakarta).⁷²

Perlawanan yang diberikan oleh petugas yang menjaga Lapangan Terbang Maguwo di bawah pimpinan Perwira Piket Kadet Udara Kasmiran tidak dapat menahan serbuan tentara Belanda sehingga Maguwo dengan mudah dapat dikuasai. Dalam pertempuran tersebut, Kadet Kasmiran, Serma Tanoemiharjo, dan Kopral Udara Tohir, dan 30 prajurit lainnya gugur.⁷³ Pada pukul 08.00 WIB, seluruh Lapangan Terbang Maguwo sudah dikuasai Belanda sehingga Belanda dapat membuka jembatan udara Semarang-Yogyakarta untuk menurunkan alat perangnya guna merebut Yogyakarta.

Nasib sial menimpa sebuah pesawat RI-006 (Catalina) yang kira-kira pukul 09.00 WIB mendarat di Lapangan Terbang Maguwo. Anak pesawat tidak tahu bahwa Maguwo sudah jatuh ke tangan Belanda; akhirnya mereka ditawan dan pesawatnya disita.⁷⁴ Sementara itu di Istana Presiden Yogyakarta berkumpul para pejabat tinggi. Sri Sultan dengan cepat menuju Kaliurang untuk menjemput Wakil Presiden/Perdana Menteri Hatta yang sedang berunding dengan KTN, mereka bertemu di jalan.

Setelah berhasil menguasai Maguwo, tentara Belanda segera bergerak menuju dalam kota Yogyakarta; sementara itu dari pihak RI merasa tidak mungkin untuk menghadapi Belanda secara frontal, maka diusahakan untuk memperlambat gerak maju tentara Belanda. Gerak memperlambat ini bertujuan memberi kesempatan kepada pasukan yang ada di dalam kota untuk

⁷² Badan Musyawarah Musea, *op.cit.*, hlm. 130-131.

⁷³ Seskoed, *op.cit.*, hlm. 90.

⁷⁴ A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 204.

mempersiapkan diri dan melaksanakan sesuatu yang direncanakan, seperti membumihanguskan gedung yang strategis supaya jangan sampai dipergunakan oleh Belanda untuk memperkuat kedudukannya.⁷⁵ Cara yang ditempuh TNI guna memperlambat gerak maju pasukan Belanda adalah dengan menebang pohon yang ditumbangkan ke jalan raya dan merusak jalan. Sementara itu, di istana sudah berkumpul para menteri, Bung Syahrir, A.A. Salim, Prof Asikin, Mr. Assaat, Mr. Nazir Pamuncak, dan Mr. AG. Pringgodigdo.⁷⁶

Meskipun telah diadakan gerakan penghambatan oleh TNI terhadap gerak maju pasukan Belanda, Belanda akhirnya berhasil menguasai seluruh kota Yogyakarta pada pukul 16.00 WIB.⁷⁷ Setelah Yogyakarta berhasil dikuasai, Belanda segera menawan para pemimpin politik RI yaitu Sukarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim, dll. Sebelum ditawan, Presiden sempat memberikan mandat melalui telegram kepada Syafruddin Prawiranegara supaya membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Pembentukan PDRI bertujuan untuk meneruskan perjuangan apabila Pemerintah RI di Yogyakarta tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya. Apabila Syafruddin Prawiranegara tidak dapat melaksanakan, maka diperintahkan kepada Sudarsono, Palar, dan Maramis untuk membentuk pemerintahan pelarian di India.

Sementara itu Letnan Jenderal Sudirman telah selamat ke luar kota, begitu pula Letkol Suharto Komandan Brigade 10, selaku penanggung jawab

⁷⁵ Badan Musyawarah Musea, *op.cit.*, hlm. 134.

⁷⁶ A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 207.

⁷⁷ Badan Musyawarah Musea, *op.cit.*, hlm. 134.

keamanan daerah Yogyakarta telah sampai ke luar kota. Pasukan Siliwangi dalam rangka *wingate* sedang melaksanakan *long march* menuju Jawa Barat. Batalyon demi batalyon menuju barat sesuai dengan rute yang telah ditetapkan di bawah pimpinan Letkol Daan Jahja (lihat lampiran 6, hlm. 162).⁷⁸ Bagi TNI, tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari pertama dilaksanakannya perang gerilya rakyat semesta seperti yang telah digariskan melalui Perintah Siasat Nomor 1 Pangsar Sudirman tertanggal 9 November 1948 dan Perintah Kilat Pangsar dari Yogyakarta tertanggal 19 Desember 1948.

Bukittinggi masih tidur nyenyak ketika sebuah mustang Belanda berputar-putar di atas kota pada dinihari 19 Desember 1948. Sebagian orang mengira bahwa pesawat tersebut sedang mencari landasan pacu Pangkalan AURI Gadut. "Presiden RI akan singgah dalam kunjungan kerja ke India sebagaimana yang sudah direncanakan Kabinet beberapa waktu sebelumnya", piker mereka. Untu itu sejumlah mobil buru-buru menuju pangkalan yang berjarak sekitar 5 Km dari pusat kota Bukittinggi. Maklum pangkalan ini belum memiliki fasilitas lampu landasan yang bisa membimbing pilot untuk mendarat tepat di tengah landasan pacu.

Akhirnya semua menjadi jelas, karena pesawat tersebut bukan pesawat yang mendaratkan Presiden yang akan singgah tetapi sebuah pesawat militer Belanda yang sedang mengintai instalasi sipil dan militer yang dimiliki Republik. Keesokan harinya, bersamaan dengan penyerbuan ke Ibukota RI Yogyakarta, Bukuittinggi didatangi lagi. Kali ini dibom. Sasaran yang sudah

⁷⁸ Sekretaris Negara, *op.cit.*, hlm. 193.

dilihatnya beberapa jam sebelumnya dijadikan objek penembakan. Mengenai arah gerakan tentara Belanda dalam agresi militernya yang kedua terhadap RI di Pulau Sumatera dapat dilihat pada lampiran 5, hlm. 161.

Sebagian penduduk panik dan berusaha mencari perlindungan atau bersiap-siap mengungsi ke luar kota. Sebagian lagi mencoba memonitor siaran radio dalam dan luar negeri. Beritapun menjadi simpang siur. Benarkah Ibu Kota RI (Yogyakarta) telah diduduki Belanda, dan bagaimana nasib para pemimpin RI di sana. Di antara kesibukan itu, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI yang sudah berada di Bukittinggi mengikuti rombongan Bung Hatta sejak pertengahan November 1948 adalah salah seorang yang berusaha mengkonfirmasi berita radio tersebut. Jika benar Yogyakarta telah diduduki Belanda, tentu harus ada tindakan sesuai dengan petunjuk Bung Hatta yang sudah kembali ke Yogyakarta bahwa jika terjadi apa-apa dengan Yogyakarta, Sumatera dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan pemimpin yang berada di luar kota Yogyakarta dapat mengambil inisiatif tanpa menunggu perintah dari Presiden dan Wakil Presiden.⁷⁹ Pertimbangan Pemerintah untuk menjadikan Sumatera sebagai pusat pemerintahan adalah faktor daya tahan ekonomi dan lokasinya yang dekat dengan negara-negara tetangga sehingga memungkinkan mengadakan kontak.

⁷⁹ Abdurrachman Surjomihardjo dan JR.Chaniago, 1990, *PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Dikaji Ulang*, Masyarakat Sejarawan Indonesia, Jakarta, hlm. 42.

BAB III

KESIAPAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGHADAPI AGRESI MILITER BELANDA II 19 DESEMBER 1948

A. Persiapan dalam Bidang Militer

Memperhatikan kejadian-kejadian di meja perundingan, persiapan perang Belanda di seberang garis *status quo* Van Mook dan kejadian-kejadian di dalam wilayah RI sendiri, para pemimpin RI berkeyakinan bahwa Belanda suatu saat akan melancarkan serangan militer ke daerah RI. Oleh karena itu Pemerintah RI mengadakan persiapan-persiapan semaksimal mungkin untuk menghindarkan RI dari kehancuran.⁸⁰

Dengan ini, dapat dikatakan bahwa penyelesaian Persetujuan Renville dengan perantaraan KTN (Amerika Serikat, Australia, dan Belgia) tidak berhasil menenangkan suasana, bahkan bisa dikatakan mengalami kegagalan total. Kegagalan ini sebelumnya sudah diperkirakan oleh Belanda dan Belanda berharap supaya kegagalan ini dapat dijadikan alasan yang kuat bagi Belanda untuk menyerang Republik.

Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 memberi pelajaran bagi RI bahwa kesiapan kekuatan militer mutlak ada walaupun dalam suasana gencatan senjata. Untuk menghadapi situasi dan kondisi dimana sewaktu-waktu Belanda akan melancarkan serangan militernya terhadap RI, maka TNI menyusun persiapan-persiapan sebagai berikut :

⁸⁰ Seskoad, *op. cit.*, hlm. 82.

1. Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia

Latihan perang yang dilakukan tentara Belanda di Salatiga, Semarang, dan tempat lain di dekat garis demarkasi merupakan suatu gejala adanya serangan baru yang akan dilancarkan oleh Belanda terhadap Republik Indonesia. Salah satu tindakan antisipatif dari akibat buruk adanya kekeruhan hubungan Indonesia dengan Belanda adalah dengan memperkuat pertahanan militer. Untuk menghadapi situasi tersebut, Kabinet Hatta yang menggantikan Kabinet Amir Syarifuddin; dalam program khususnya untuk Angkatan Perang RI, berusaha untuk melaksanakan program Re-Ra. Pelaksanaan Program Re-Ra ini diserahkan kepada pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia.

Reorganisasi bertujuan menata kembali struktur organisasi ketentaraan dengan TNI sebagai satu-satunya organisasi ketentaraan; dalam hal ini laskar-laskar perjuangan harus menyatu dalam wadah TNI.⁸¹ Pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia, dalam melaksanakan *reorganisasi* membagi wilayah RI (*de facto*) menjadi dua Komando Operasi yang dipimpin langsung oleh Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Letnan Jenderal Sudirman. Komando-komando operasi tersebut adalah :⁸²

a. Komando Djawa

Yang disertai tugas memimpin adalah Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD). Markas Komando

⁸¹ Ulf Sundhaussen, *op.cit.*, hlm. 63.

⁸² Saleh A. Djamhari, 1967, MBKD (*Markas Besar Komando Djawa*) 1948-1949, Lembaga Sejarah Hankam, Jakarta, hlm. 7.

Djawa disebut Markas Besar Komando Djawa (MBKD), berkedudukan di Yogyakarta.

b. Komando Sumatera

Yang diserahi tugas memimpin adalah Mayor Jenderal Suhardjo Hardjowardojo, kemudian menjelang Agresi Militer Belanda II diganti oleh Kolonel Hidayat, sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera (PTTS). Markas Komando Sumatera disebut Markas Besar Komando Sumatera (MBKS), berkedudukan di Bukittinggi.

Pembentukan MBKD dan MBKS didasarkan pada keputusan Menteri Pertahanan Nomor A/852/48 tanggal 28 Oktober 1948. Pembentukan MBKD dan MBKS merupakan realisasi pelaksanaan pemerintahan militer sebagai usaha mewujudkan suatu pertahanan rakyat semesta yang bersumber pada unsur kekuatan bersenjata maupun dukungan rakyat.

Rasionalisasi bertujuan supaya terdapat keseimbangan antara jumlah personil dengan kebutuhan negara, baik dari segi pertahanan maupun pendanaan karena jumlah pasukan ketentaraan dan kelaskaran yang banyak, belum bisa menjamin keefektifan dalam pertempuran. Dengan rasionalisasi, yang dituju adalah penyempurnaan dan pembangunan yang meringankan beban masyarakat serta mengurangi penderitaan rakyat.⁸³

Moh. Hatta dalam pidatonya di hadapan BP-KNIP pada tanggal 16 Februari 1948, mengatakan bahwa Program Re-Ra merupakan program

⁸³ Seskoad, *op.cit.*, hlm. 52.

pemerintah yang bertujuan untuk mengadakan perbaikan susunan negara dan alat negara untuk mencapai perimbangan antara pendapatan dengan belanja negara. Hal ini dapat dicapai dengan cara memindahkan tenaga dari aktivitas yang tidak produktif ke aktivitas yang lebih produktif.⁸⁴

Hal senada dengan pernyataan tersebut, juga dinyatakan oleh A.H. Nasution :

*....Reorganisasi dan Rasionalisasi istimewa terhadap Angkatan Perang Republik Indonesia harus dilaksanakan dengan tegas dan nyata....*⁸⁵

Bahwa keadaan ini sangat mendesak untuk susunan tentara kita. Pemerintah akan menyiapkan dasar untuk menjadikan tentara kita menjadi tentara milisi. Tentara milisi lebih baik dari pada tentara bayaran, karena milisi menanamkan rasa kewajiban untuk mempertahankan tanah air. Tentara tetap menjadi kader-kader, dan segala tindakan menuju Rasionalisasi tidak boleh menimbulkan pengangguran karena merugikan masyarakat. Bagi tiap-tiap tenaga yang dikeluarkan dari jabatannya karena terkena rasionalisasi, harus ditempatkan pada usaha baru yang memberikan penghidupan yang layak. Demikian pula kedudukan seluruh anggota angkatan perang akan dijamin sampai dapat ditentukan status mereka.

Program Re-Ra Angkatan Perang Republik Indonesia merupakan cara pemerintah agar tentara menjadi Angkatan Perang yang kuat dan tangguh, dengan membentuk satu tentara dengan satu komando dalam

⁸⁴ Ulf Sundhaussen, *op.cit.*, hlm.23.

⁸⁵ A.H.Nasution, 1968, *Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jilid II*, Seruling Masa, Jakarta, hlm. 135.

bentuk dan susunan yang efektif. Program Re-Ra pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk memperkuat dan menyempurnakan pertahanan Republik Indonesia.

2. Siasat Pertahanan Republik Indonesia dalam Menghadapi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948

Konflik fisik yang terjadi semenjak tahun 1945 memberi bukti pentingnya pertahanan serta dukungan rakyat Indonesia. Rakyat bertindak sebagai faktor yang melakukan tugas perbekalan dan perlawanan pasif atau tidak bekerjasama dengan musuh. Keberadaan rakyat sangat membantu perjuangan bersenjata melawan Belanda. Konsep pertahanan yang menyertakan segala potensi antara kekuatan TNI dengan rakyat disebut dengan Pertahanan Rakyat Semesta.

Sejak penandatanganan Persetujuan Renville, pihak militer Republik menyadari bahwa suatu saat Belanda pasti akan mengadakan serangan militernya lagi. Karena itu, para pemimpin TNI telah mengadakan persiapan untuk menyusun rencana guna menghadapi kemungkinan sewaktu-waktu Belanda menyerang. Rencana TNI tersebut dituangkan dalam bentuk Instruksi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia tertanggal 9 November 1948 yang kemudian terkenal dengan sebutan Perintah Siasat No.1 tertanggal 9 November 1948.⁸⁶ Isi Pokok Perintah Siasat No.1 tertanggal 9 November 1948 adalah :

⁸⁶ A.H. Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 Agresi Militer Belanda II*, Angkasa, Bandung, hlm. 281.

Ayat pertama dari Perintah Siasat No.1 berbunyi: tidak akan melakukan pertahanan *linier*.⁸⁷ Sistem ini diterapkan berdasarkan pengalaman semasa Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947, di mana kekuatan musuh yang serba lengkap dan modern tidak dapat dihadapi dengan pertahanan *linier* saja. Pertahanan *linier* APRI pada saat itu tidak mampu menahan serangan Belanda karena kondisi pasukan Belanda pada saat itu lebih unggul dalam persenjataan, organisasi, pengalaman, serta didukung oleh serangan dari udara yang terkoordinasi dengan baik. Perlawanan frontal pada posisi statis dengan mengandalkan kekuatan senjata tidaklah efektif; dalam hal ini mendorong TNI untuk mempersiapkan perang gerilya, dalam bentuk pertahanan dan perlawanan total rakyat semesta. Republik Indonesia sendiri mempunyai potensi untuk melaksanakan perang gerilya karena jumlah rakyat besar, faktor geografis mendukung, dan yang lebih penting adalah adanya semangat yang tinggi untuk melepaskan diri dari kolonialisme.

Ayat kedua dari Perintah Siasat No.1 berbunyi : memperlambat laju serangan musuh, pengungsian total, dan bumi hangus total.⁸⁸ Bumi hangus dalam peperangan dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui Belanda dengan tujuan strategis. Bumihangus mutlak dilakukan apabila keadaan terjepit; hal ini disebabkan bahwa politik bumihangus dapat dijadikan alat untuk membela diri terhadap serangan musuh yang serba lengkap persenjataannya. Di samping itu dengan jalan bumihangus, paling tidak

⁸⁷ Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm. 159.

⁸⁸ Sekretaris Negara, *op.cit.*, hlm. 193.

kita dapat mengacaukan perekonomian Belanda yang tidak mungkin dapat dibereskan dalam waktu yang singkat.

Ayat ketiga dari Perintah Siasat No.1 berbunyi : pasukan-pasukan yang berasal dari daerah federal menyusup ke belakang garis musuh dan segera membentuk kantong-kantong pertahanan di tiap-tiap *onderdistrik* militer yang mempunyai pemerintahan gerilya totaliter (*wehrkreise*) dan mempunyai pusat di beberapa kompleks pegunungan.⁸⁹ Komplek pegunungan dapat dijadikan kantong pertahanan karena mempermudah untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh serta dapat dijadikan benteng alam yang dapat menghalau serangan musuh.

Ayat keempat dari Perintah Siasat No. 1 berbunyi : pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal menyusup kembali ke daerah asalnya (ber-*wingate*) dan membentuk kantong-kantong, sehingga seluruh Jawa dan Sumatera akan menjadi medan gerilya yang luas.⁹⁰ Dengan menerapkan strategi ini, maka TNI akan dapat keluar dari pendudukan Belanda. Musuh bisa dikepung dan kedudukan musuh menjadi kantong di tengah-tengah daerah kekuasaan RI. Berdasarkan perintah siasat tersebut, APRI akan mengadakan perlawanan dengan perang gerilya yang lebih agresif. Perlawanan perang ini dilakukan baik oleh rakyat maupun TNI untuk membela Republik Indonesia dan memenangkan peperangan. Sebagai tindak lanjut dari perintah tersebut TNI kemudian menggariskan pokok-pokok strateginya yaitu : pelaksanaan pimpinan totaliter dengan

⁸⁹ V. Sardjono dan GL. Marsadji, *op.cit.*, hlm. 13.

⁹⁰ Sri Endang Sumiyati, dkk, *op.cit.*, hlm. 114.

membentuk suatu pemerintahan gerilya yang dipegang oleh lurah sampai kepada pemimpin tertinggi dalam hal ini Panglima Besar APRI Letnan Jenderal Sudirman; di samping itu semua aparat pemerintah dilarang membuat kebijakan lain dalam hubungannya dengan musuh atau menjalankan politik non kooperatif, dan non kontak yang tegas.

Sistem pertahanan yang dimaksud dalam Perintah Siasat No. 1 tertanggal 9 November 1948 adalah pertahanan rakyat yang didasarkan pada pertahanan total yang terwujud dalam *wehrkreise*, artinya bahwa setiap lingkungan dan daerah harus berswadaya mempertahankan daerahnya masing-masing baik secara *defensif* maupun *ofensif* yang dipimpin oleh TNI. Di dalam *wehrkreise* itu sendiri dilengkapi dengan kekuatan satuan tempur, komando territorial, sub *wehrkreise*, pasukan mobil, dan satuan bantuan tempur serta administrasi.⁹¹

Pada tanggal 11 November 1948, Markas Besar Komando Djawa mengundang pejabat sipil untuk memberikan penjelasan mengenai perintah siasat tersebut. Rapat tersebut memutuskan bahwa jika Belanda mulai menyerang maka mulai saat itu perintah siasat berlaku.⁹² Keputusan tersebut mempunyai maksud untuk menghindari dampak psikologis seandainya pemerintah sipil tidak berjalan, dengan begitu rakyat akan tetap merasakan bahwa pemerintahan masih berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain pemerintahan militer bertujuan supaya kekuasaan *de facto* Republik Indonesia tetap terjaga .

⁹¹ Saleh A. Djamhari, *op cit.*, hlm. 9.

⁹² Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 160.

B. Persiapan dalam Bidang Politik

Situasi dan kondisi Negeri Indonesia dalam bidang politik menjelang terjadinya Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, mengalami kegoncangan yang sangat serius. Kegoncangan tersebut dikarenakan antara lain, Muso dan Amir Syarifuddin bergabung untuk memimpin pemberontakan PKI di Madiun pada bulan September 1948.

Kegoncangan politik dalam Negeri Indonesia mendapat perhatian dari pihak Belanda. Dalam hal ini Van Mook menduga bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dapat melunakkan sikap Hatta khususnya mengenai masalah keamanan, namun ternyata perkiraan tersebut meleset jauh; bahkan ketika Belanda berusaha mendekati RI dengan cara menawarkan bantuan militer untuk menumpas pemberontakan PKI, Hatta menolak dengan tegas. Sikap Bung Hatta tersebut sangatlah tepat, karena penolakan tersebut menunjukkan adanya rasa percaya diri bahwa TNI mampu mengatasi kekacauan yang terjadi di wilayahnya.

Secara politis, penolakan tersebut berarti menifestasi dari sikap RI untuk menghindari *infiltrasi* Belanda ke wilayah RI. Campur tangan pasukan militer Belanda dalam masalah dalam Negeri Republik Indonesia akan berakibat fatal yaitu tersebarnya isu tentang kesan negatif terhadap TNI yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan TNI menguasai Madiun sebagai basis PKI pada tanggal 30 September 1948, berkat dukungan dan partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia, dan sama sekali bukan bantuan dari Belanda; dapat menepis anggapan bahwa TNI tidak bisa berbuat apa-apa. Penumpasan pemberontakan

komunis dalam waktu tidak lebih dari sebulan ini cukup menguras tenaga dan pikiran TNI.

Sementara itu, dalam bidang ekonomi Belanda terus menerus melakukan tekanan terhadap perekonomian Republik Indonesia. Sepanjang tahun 1948, Belanda memberlakukan blokade ekonomi secara ketat. Blokade ekonomi ini menyebabkan penderitaan yang hebat karena pihak Republik menjadi kekurangan bahan-bahan penting seperti obat-obatan, bahan makanan, pakaian, dan persenjataan. Di saat Republik Indonesia mengalami kekacauan dalam bidang politik dan ekonomi, ditambah kekuatan militer yang sedang mengalami kelelahan, dijadikan kesempatan oleh Belanda untuk melancarkan serangan militernya dengan alasan untuk menyelesaikan masalah di Indonesia.

Pada dasarnya sikap Belanda terhadap Republik Indonesia berkaitan dengan situasi dan kondisi politik yang ada dalam Negeri Belanda. Kenyataan ini sekaligus mempengaruhi hasil perundingan yang dilakukan dengan pihak Republik Indonesia. Kondisi politik yang sedang terjadi dalam Parlemen Nederland pada waktu itu sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan di Indonesia. Kebijakan yang diusulkan oleh wakil Belanda dalam perundingan harus mendapat persetujuan dari parlemen. Legitimasi parlemen inilah yang menyebabkan partai-partai politik yang menonjol atau yang mendominasi parlemen akan memegang peranan yang sangat penting.

Melihat adanya kemungkinan sewaktu-waktu Belanda akan menyerang RI, maka dalam bidang pertahanan politik, Pemerintah RI melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

1. Konsolidasi RI terhadap Wilayah di Luar Kekuasaan *De facto*

Perbedaan pendapat mengenai siasat menghadapi Belanda sudah muncul sejak tahun 1946. Kelompok Tan Malaka menggunakan strategi militer, sedangkan Sutan Syahrir menggunakan cara diplomasi sebagai upaya menyelesaikan masalah dengan Belanda. Kemelut di kedua kubu Republik Indonesia ini tentu tidak terlepas dari perhatian Belanda. Belanda melihat keadaan ini sebagai suatu kesempatan baik untuk mengadakan tekanan terhadap RI.

Belanda melakukan tekanan politik terhadap RI dengan jalan mengundang wilayah atau daerah di luar kekuasaan *de facto* RI pada Konferensi Malino di Malino, daerah Bugis, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16-25 Juli 1946; dan Konferensi Denpasar pada tanggal 7-24 Desember 1946.⁹³ Konferensi ini pada akhirnya menghasilkan sistem ketatanegaraan federal, yang bertujuan untuk mengimbangi keberadaan Republik Indonesia. Van Mook sebagai pelopor terciptanya negara-negara federal dan daerah otonom, merasa optimis bahwa nantinya hal itu akan menjadi faktor pendukung kedudukan Belanda di Indonesia.⁹⁴ Tindakan Van Mook tersebut mendapat tentangan keras dari RI, karena dianggap tidak sesuai dengan isi Perjanjian Renville; dalam pembentukan tersebut tidak mengikutsertakan Republik.

Tindakan Belanda secara sepihak tersebut merupakan realisasi dari politik memecah belah, dan ini bisa diartikan sebagai usaha untuk

⁹³ Ide Anak Agung Gde Agung, 1985, *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 96.

⁹⁴ A.H.Nasution, *op.cit.*, hlm. 36.

memperjuangkan kolonialisme melalui jalan federalisme. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 sudah jelas disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Namun rencana bentuk negara federatif sudah menjadi kenyataan hitam di atas putih dalam Perjanjian Linggarjati maupun Perjanjian Renville.

Tujuan politik jangka panjang Republik Indonesia adalah menciptakan berusaha kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dalam hal ini sikap penerimaan Republik Indonesia atas bentuk Negara Indonesia Serikat hanya sebagai siasat.

Hasil dari penggabungan kekuatan politik seluruh kekuatan nasional adalah terciptanya saling pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Indonesia Timur, karena sebelumnya RI telah mengakui keberadaan Negara Indonesia Timur. Kedua negara tersebut pada dasarnya mempunyai kesamaan tujuan yaitu ingin melenyapkan kekuasaan Belanda dari Indonesia, bahkan Mr. Moh. Natsir sudah memprediksikan bahwa menguatnya pengaruh kalangan Republikken terhadap negara-negara buatan Van Mook, mengakibatkan ide negara federasi tersebut akan terdesak

Politik sintesa atau penggabungan kekuatan nasional dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda memang mutlak ada untuk mempercepat kemenangan. Penggabungan seluruh

kekuatan nasional dapat memperkuat kedudukan Republik Indonesia yang berarti sebagai tindakan antisipasi dari kekalahan dan kehancuran.

2. Konsolidasi RI terhadap Wilayah yang Diakui secara *De facto*

Tahun 1948 merupakan masa sulit bagi Pemerintah Republik Indonesia karena pada waktu itu Pemerintah RI sedang menghadapi dua kekuatan musuh : yang berasal dari luar yaitu Belanda dan ancaman dari dalam negeri berupa krisis persatuan dan kesatuan. Goyahnya persatuan dan kesatuan di dalam Pemerintah Republik Indonesia memerlukan tindakan yang cepat dan tepat, agar keberadaan RI sebagai suatu negara tidak hancur, sekaligus untuk memperkuat pertahanan dalam rangka menghadapi Belanda.

TNI yang masih loyal kepada Pemerintah Republik Indonesia bekerjasama dengan rakyat untuk melancarkan Gerakan Operasi Militer, yang berhasil menguasai keadaan pada tanggal 30 September 1948. Penumpasan pemberontakan PKI secara tidak langsung membantu pertahanan negara, karena dengan operasi tersebut dapat menyaring loyalitas warga kepada pemerintah RI dan kita berhasil mengadakan Reorganisasi Angkatan Perang sebagai persiapan untuk Perang Semesta.⁹⁵

Selain di Jawa Pemerintah RI juga memperhatikan wilayah Sumatera sebagai modal perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Wilayah Sumatera selain berpotensi sebagai wadah perjuangan, ternyata juga terdapat benih-benih perpecahan yang dapat mengancam persatuan dan

⁹⁵ Saleh A. Djamhari, *op cit.*, hlm. 7.

kesatuan negara. Bentrokan antar laskar yang bersikap memusuhi Program Re-Ra serta masalah lain mewarnai masa-masa pasca Persetujuan Renville. Teuku Moh. Hasan, seorang *Republikken* dari Sumatera Utara membenarkan adanya berita tersebut. Ia meminta bantuan kepada Hatta untuk menyelesaikan masalah krisis persatuan ini.

Pada pertengahan November 1948, Moh. Hatta berangkat ke Bukittinggi (Sumatera Barat). Keberangkatan Hatta disertai oleh Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara, Kolonel Hidayat, Lukman Hakim, Rusli Rahim, dan Letnan Kolonel Akil Prawiradiredjo. Tujuan mereka datang ke Sumatera adalah untuk mengganti pimpinan militer di Sumatera, selain itu juga untuk mempersiapkan Sumatera sebagai pusat Pemerintahan RI apabila serangan militer Belanda jadi dilancarkan dan Yogyakarta jatuh ke tangan musuh.⁹⁶

Perkiraan logis kalau Belanda melancarkan serangan militer pastilah sasaran utamanya adalah ibu kota Republik Indonesia yaitu wilayah Yogyakarta. Untuk itu mereka telah membuat rencana dengan cara menjajagi kemungkinan-kemungkinan membentuk pemerintahan penerus atau pemerintahan sementara, jika Pemerintah RI di Yogyakarta tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya dan tidak bisa dipertahankan lagi.⁹⁷ Tujuan tersebut semakin jelas dengan menetapkan Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi dengan tujuan supaya bisa membantu mengambil tindakan seperlunya berhubung perundingan dengan Belanda sudah mulai menjadi

⁹⁶ Abdurrachman Surjomihardjo dan JR. Chaniago, *op.cit.*, hlm. 42.

⁹⁷ V. Sardjono dan GL. Marsadji, *op.cit.*, hlm. ix.

genting dewasa itu. Hasil nyata kunjungan Hatta adalah perwujudan upaya Pemerintah RI tetap eksis.

C. Persiapan dalam Bidang Sosial

Kenyataan bahwa Persetujuan Renville yang ditandatangani oleh wakil-wakil Pemerintah RI dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948 makin lama makin diingkari oleh Belanda, menyadarkan pihak RI bahwa suatu saat Belanda pasti akan mengadakan serangan militer terhadap RI. Usaha RI dalam membentengi diri dari usaha perampasan kembali kemerdekaan oleh pihak Belanda, disamping kekuatan fisik militer dan politik diplomasi yang telah dilakukan oleh para pejuang dan pemimpin Indonesia; maka kekuatan sosial masyarakat merupakan penunjang yang cukup vital.

Diketengahkan di sini peran yang cukup besar andilnya dalam wujud non-fisik yang memberi daya tahan dan daya dorong yang kuat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu semangat dari rakyat Indonesia yang tercermin dalam slogan-slogan yang waktu itu diteriakkan oleh massa dan berkumandang dalam sanubari seluruh bangsa Indonesia : “Hidup atau Mati”, “Sekali Merdeka Tetap Merdeka”, “Lebih Baik Mati Berkalang Tanah daripada Hidup Terjajah”, “Patah Tumbuh Hilang Berganti”, dsb, bukanlah slogan tanpa dasar. Dialah penjabaran perasaan primitif yang paling mendasar yang benar-benar dihayati sesuai bunyinya. Belanda, karena terlalu buta mata hatinya dan kemampuan memberi perhatian pada orang Indonesia terlalu dangkal, tidak dapat menangkap arti slogan tersebut dan



menganggapnya hanya sebagai slogan kosong belaka yang hanya berguna untuk membangkitkan semangat berontak untuk waktu tertentu saja.

Pada dasarnya rakyat Indonesia selalu siap untuk menyumbangkan jiwa raga, dan kemampuan demi tetap tegaknya Kemerdekaan Indonesia. Mengenai hal ini, dapat kita lihat dari potensi masing-masing lapisan atau perseorangan dengan segala corak macam yang disumbangkan secara nyata dalam mempertahankan Kemerdekaan RI, khususnya semasa Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, seperti :⁹⁸

1. Peran pejuang kaum Wanita dalam perjuangan tidak saja berjuang di “garis belakang”, namun juga di garis depan (di front pertempuran) dengan dibentuknya Laskar Wanita dan lain-lain. Selain itu, mereka juga aktif dalam Palang Merah dan penyelenggaraan dapur umum dalam usaha memberi pelayanan bantuan makanan bagi para pejuang RI.
2. Peran para Wartawan amat besar dalam memberitakan peristiwa-peristiwa penting dari kancah perjuangan untuk rakyat sendiri dan dunia luar. Di samping peran dalam pemberitaan, peran media massa melalui Pers dan radio telah mampu mengobarkan semangat juang, betapa pun keprihatinan dan penderitaan waktu itu dialami rakyat.
3. Peran para Seniman telah diekspresikan dalam berbagai bentuk seni bernaftaskan pengabdian yang menunjang perjuangan nasional. Dari kalangan seni drama-teater banyak dipentaskan bentuk-bentuk sandiwara perjuangan yang menampilkan lakon-lakon heroisme dan patriotisme.

⁹⁸ Badan Musyawarah musea, *op.cit.*, hlm. 195-196.

Seniman-seniman lukis-pahat secara visual dan mudah ditatap mata karyanya memancarkan pantulan semangat dan jiwa juang dalam wujud poster-poster, karikatur, lukisan, patung, relief, kerajinan tangan, ukiran, dan lain-lain. Prosa, puisi, dan naskah-naskah drama dari angan dan tangan penulis terbit segar bernada ungkapan pembelaan keadilan, kebenaran, dan anti penjajahan dalam sajian terus terang ataupun kias ibarat dan sindiran.

4. Kaum pendidik, guru-guru, dan Cendekiawan mengabdikan diri dengan usaha mencerdaskan generasi muda bangsa dengan bekal ilmu, walaupun sarannya sangat minim dengan sisa-sisa buku jaman penjajahan untuk pegangan yang dituangkan kembali dalam terjemahan diktat-diktat kertas “merang”.
5. Para petani, buruh, dan pegawai membuktikan kesetiaannya pada Negara Republik Indonesia, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun dalam derita kekurangan gaji yang minim dan hasil pertanian yang tidak menentu akibat gangguan suasana perang dan sarana penunjang yang amat kurang.
6. Para Dokter dan Sarjana Teknik secara nyata menumpahkan segala kemampuan yang ada padanya waktu itu untuk kepentingan perjuangan. Tenaga dokter yang sedikit jumlahnya dengan para perawat yang terbatas fasilitasnya melayani kepentingan kesehatan rakyat dan sekaligus mengutamakan pelayanan di daerah pertempuran. Demikian pula para teknisi, baik para Insinyur maupun tenaga pendidikan teknis menengahkan tercurah perhatian dan energinya dalam perjuangan yang benar-benar akan

menentukan hidup matinya bangsa Indonesia. Walaupun peralatan tidak mendukung; dengan segala akal, perbaikan mesin pabrik, mesin kendaraan, lokomotif, perlengkapan senjata berat dan ringan, semuanya dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

Perlu diketahui bahwa tidak sedikit rakyat Indonesia yang ikut mengangkat senjata berjuang bersama TNI, menghadapi Belanda semasa Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948. Rakyat Indonesia yang tidak ikut berjuang di medan laga, bertindak sebagai faktor yang melakukan tugas perbekalan dan perlawanan pasif, dalam artian bersikap non-kooperatif, dan tidak bekerjasama dengan musuh.

Demikianlah sekelumit catatan dalam pembuktian sejarah perjuangan Indonesia yang secara utuh didukung penuh oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, mendapat dukungan, dipertahankan, dan ditegakkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

D. Persiapan dalam Bidang Ekonomi

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948, maka blokade Belanda terhadap RI semakin diperketat, sehingga daerah RI semakin kekurangan bahan-bahan *supply*. Wilayah RI tinggal daerah-daerah minus bahan makanan, sedangkan daerah-daerah subur masuk ke daerah kekuasaan Belanda. Di wilayah RI yang sudah sempit itu, banyak pengungsi-pengungsi datang dari berbagai daerah yang berhasil diduduki

Belanda. Belum lagi ketentuan dalam Persetujuan Renville yang mengharuskan pasukan TNI hijrah meninggalkan kantong-kantong gerilya menuju daerah kekuasaan RI. Persediaan tekstil dan obat-obatan dalam keadaan kritis, sedangkan badan keuangan mengalami inflasi.

Selanjutnya untuk menghadapi adanya kemungkinan bahwa sewaktu-waktu Belanda melancarkan serangan militernya terhadap RI, maka oleh Panglima Tentara dan Teritorium Djawa direncanakan adanya sistem *wehrkreise* (daerah-daerah berdiri sendiri, tidak menggantungkan bantuan dari pusat) dalam perekonomian dan *supply* untuk melanjutkan perjuangan. Kalau semula departemen-departemen, kantor-kantor, dan kesatuan-kesatuan mendapat bantuan tiap bulan dari pusat, maka setelah Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, *supply* untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dilakukan oleh tenaga-tenaga daerah.

Sektor pertanian mendapat perhatian penuh dari pemerintah RI karena pemerintah RI yakin bahwa sektor perekonomian yang sangat besar jasanya pada masa perjuangan adalah bidang pertanian. Dalam hal ini para petani memegang peranan penting sebab selain menjadi tempat berlindung bagi para pengungsi dari kota juga menjadi sumber logistik bagi para pejuang. Bahkan tidak jarang para petani menjadi pembantu intelijen bagi para gerilyawan.⁹⁹

⁹⁹ Seskoad, *op.cit.*, hlm. 117.

Perlu diketahui bahwa sebelum Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, Pemerintah Pusat telah memberikan hak atau kekuasaan kepada Pemerintah Daerah berupa :¹⁰⁰

1. Hak atau kekuasaan meminjam uang dan keperluan lainnya atas nama KMD-KMD (Komandan Militer Daerah).
2. Hak atau kekuasaan mempergunakan semua kekayaan negara.
3. Bagi kesatuan-kesatuan Angkatan Perang RI diberi hak untuk menggunakan persediaan uang dan barang seperlunya.

Untuk melaksanakan sistem *wehrkreise* atas kekayaan daerah, selain diperlukan adanya organisasi, usaha, dan kegiatan, yang terpenting adalah kejujuran para anggotanya. Pengertian tentang *supply* pada umumnya mencakup pengertian untuk menjalankan usaha mencari uang, perlengkapan, dan persenjataan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan sumber *supply* adalah ekonomi daerah.

Selanjutnya oleh Pemerintah RI dalam usaha mencari modal diadakan kerjasama dengan badan *Commodity Credit Corporation* (C.C.C), suatu badan organisasi yang berdiri di luar E.C.A (*Economic Cooperation Administration*). E.C.A merupakan Jawatan Pemerintah Amerika Serikat yang berkedudukan di Washington, bertugas menjalankan rencana Marshall berdasarkan *Economic Cooperation Act* tahun 1948 dalam bantuan ekonomi untuk membendung arus komunisme.¹⁰¹ Dengan badan C.C.C sudah lama diadakan pembicaraan mengenai perjanjian kredit dengan pihak Republik

¹⁰⁰ Badan Musyawarah Musea, *op.cit.*, hlm. 207.

¹⁰¹ K.M.L.Tobing, *op.cit.*, hlm. 90-91.

Indonesia sebanyak 25 juta dollar. Adapun dana ini dipergunakan untuk membeli bahan-bahan keperluan Indonesia dan memajukan ekspor kopra serta minyak sawit di Indonesia. Dengan hal ini dimaksudkan supaya dapat meringankan kekurangan dunia akan minyak dan gemuk.

Perjanjian ini berlaku untuk masa 2 tahun. Menurut pembicaraan itu, pihak RI akan menyediakan semua sisa kopra dan minyak sawit yang akan diekspor, untuk kemudian dijual sesuai dengan penetapan Dewan Makanan Darurat dan dengan memperhatikan hubungan khusus yang ada di antara Kerajaan Belanda dengan Pemerintah RI. Selanjutnya Pemerintah RI berkewajiban memperbanyak restriksi selama persetujuan ini. Larangan restriksi tidak hanya berlaku bagi ekspor bahan-bahan tersebut ke Amerika Serikat, tetapi berlaku juga bagi negara-negara lain yang sudah mendapat izin dari Dewan Darurat.

BAB IV

**REAKSI-REAKSI YANG MUNCUL BAIK DARI DALAM MAUPUN
DARI LUAR RI TERHADAP AGRESI MILITER BELANDA II**

19 DESEMBER 1948

A. Reaksi dari Dalam RI

**1. Reaksi dalam Bidang Politik, dengan Pembentukan Pemerintah
Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera.**

Proklamasi 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia, memaksa Belanda untuk menentukan sikapnya terhadap keinginan kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Dalam hal ini kekuatan dan kesungguhan nasionalisme dari bangsa Indonesia tidak pernah dipertimbangkan oleh Belanda, bahkan Belanda menghadapi soal baru dengan menggunakan ukuran lama. Terbukti pada tanggal 19 Desember 1948 pagi, Belanda melancarkan serangan fajar atas Ibukota Republik Indonesia Yogyakarta dengan pasukan lintas udaranya. Pasukan payung diterjunkan di sebelah Barat dan Utara Lapangan Terbang Maguwo. Sebelumnya Lapangan Terbang Maguwo dihujani bom. Dalam waktu yang singkat Maguwo dapat dikuasai Belanda.

Seiring dengan keadaan yang sangat genting, memaksa para pemimpin RI untuk mengadakan Sidang Darurat Kabinet. Sidang yang dipimpin oleh Presiden Sukarno menghasilkan dua keputusan, *pertama* menyatakan bahwa Presiden Sukarno, Hatta beserta para menteri yang

hadir dalam Sidang Darurat tersebut tidak akan meninggalkan Yogyakarta, *kedua* Pemerintah Republik Indonesia memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintah darurat; dan kepada Sudarsono, Palar, dan Maramis untuk membentuk pemerintah pengasingan di India; apabila usaha yang dilakukan oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara mengalami kegagalan.¹⁰²

Keputusan sidang yang menyatakan bahwa Presiden Sukarno, Hatta, beserta para menteri tidak akan meninggalkan Yogyakarta tersebut tidak sesuai dengan rencana semula; karena Presiden Sukarno pernah mengatakan bahwa dirinya akan memimpin perang gerilya jika musuh menyerang; dan di kalangan militer sendiri sudah mempersiapkan rencana pengungsian bagi para pejabat negara tersebut.¹⁰³ Hal ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam di kalangan militer, yang secara psikologis memunculkan kesan bahwa para pemimpin negara meninggalkan tugas; dan bahwa tentaralah yang harus memikul tanggung jawab atau beban untuk mempertahankan Republik Indonesia.

Cara yang dilakukan oleh Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia adalah menangkap dan mengasingkan Presiden Sukarno dan wakilnya Moh. Hatta serta Pejabat Pemerintah RI lainnya. Pengasingan sejumlah Pemimpin Negara Republik Indonesia tersebut, dianggap dapat mempermudah usaha Belanda untuk menghapuskan RI sebagai satu

¹⁰² T.B. Simatupang, *op.cit.*, hlm. 148.

¹⁰³ Yahya A. Muhaimin, 1982, *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-1966*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 57.

kesatuan ketatanegaraan dan menjadikan Republik Indonesia menjadi Negara Indonesia Serikat tanpa naungan Republik Indonesia lagi.

Sebelum ditawan, Presiden Sukarno sempat mengirimkan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara supaya dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera, berhubung Presiden atau Pemerintah Pusat tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya lagi. Mandat pembentukan pemerintah darurat tersebut berbunyi sebagai berikut :¹⁰⁴

Untuk : Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatera.
Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 1948 jam 05.30 pagi, Belanda telah mulai serangannya atas Ibukota Yogyakarta. Jika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi kami menguasai kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Yogyakarta, 19 Desember 1948.

Presiden,
(Sukarno)

Wakil Presiden
(Moh. Hatta)

Di samping kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, dikirim pula telegram kepada Perwakilan Republik Indonesia di New Delhi (India) yang isinya berbunyi sebagai berikut :¹⁰⁵

Pro.... Sudarsono – Palar – Mr. Maramis di New Delhi.
Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 1948 jam 05.30 pagi, Belanda telah memulai serangannya atas Ibukota Yogyakarta. Jika ikhtiar Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia tidak berhasil, kepada saudara-saudara dikuasakan untuk membentuk *Exile Government* Republik Indonesia di India. Harap, dalam hal ini berhubungan dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatera. Jika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunya.

Yogyakarta, 19 Desember 1948.

Wakil Presiden,
(Drs. Moh. Hatta)

Menteri Luar Negeri,
(Agus Salim)

¹⁰⁴ V. Sardjono dan GL. Marsadji, op.cit., hlm. 68-69.

¹⁰⁵ N.S.S. Tarjo, 1984, *Dari atas Tandu : Pak Dirman memimpin Perang Rakyat Semesta*, Yayasan Wiratama, Yogyakarta, hlm. 25.

Sementara itu Wakil Presiden menyampaikan perintah harian kepada semua Angkatan Perang Republik Indonesia dan semua instansi pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :¹⁰⁶

Mungkin Pemerintah Republik Indonesia di Yogya dikepung dan tidak dapat melaksanakan tugas kewajibannya, tetapi persiapan telah diadakan untuk meneruskan Pemerintah Republik Indonesia di Sumatera. Apa pun yang terjadi dengan orang-orang pemerintah yang ada di Yogya perjuangan tetap diteruskan.

Secara yuridis, pelimpahan wewenang dari Presiden Sukarno kepada Syafruddin Prawiranegara, Palar, Maramis, dan Sudarsono, mengartikan bahwa Belanda tidak menahan Sukarno dan pejabat pemerintahan lainnya sebagai Pemimpin Negara, melainkan sebagai pribadi-pribadi, terlepas dari jabatan pemerintahannya. Kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu adalah tidak memberikan penjelasan secara resmi mengenai alasan rencana pembatalan untuk mengungsi; yaitu secara politis, pemimpin yang ditahan berharap agar dunia Internasional dapat melihat bahwa Belanda telah berbuat sewenang-wenang terhadap Indonesia, sehingga mendatangkan simpati terhadap RI; secara teknis, Soekarno-Hatta menolak bergabung dengan tentara untuk melaksanakan perang gerilya karena kesulitan masalah pengawalan. Hal ini menimbulkan kekecewaan khususnya di kalangan militer.

Sementara itu, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta dan pejabat pemerintahan lainnya tetap tinggal sebagai tawanan perang Belanda di Istana Kepresidenan sampai tanggal 22 Desember 1948. Pada tanggal 22

¹⁰⁶ Seskoad, *op.cit.*, hlm. 77.

Desember 1948 Presiden Sukarno bersama dengan Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim diberangkatkan dengan pesawat terbang ke Brastagi (Sumatera Utara). Sedangkan Moh.Hatta, Ketua KNIP Assaat, dan Sekretaris Negara Abdul Gaffar Pringgodigdo diterbangkan ke Pangkalpinang (Bangka) dan kemudian diinternir di Menumbing, suatu tempat peristirahatan di pegunungan di atas kota Muntok di Bangka, sebagai tawanan perang. Kemudian rombongan Presiden Sukarno dipindahkan dari Brastagi ke Prapat di tepi danau Toba. Setelah itu pada tanggal 31 Desember 1948 Sukarno dan Haji Agus Salim dipindahkan dengan pesawat terbang ke Pangkalpinang (Bangka) dan dari sana dibawa dengan mobil ke Muntok, kurang lebih 100 km dari kota Pangkalpinang dan diinternir sebagai tawanan perang. Selanjutnya Sutan Syahrir dibebaskan oleh pihak Belanda.¹⁰⁷

Setelah Syafruddin Prawiranegara mengetahui bahwa Belanda menyerang Ibu Kota RI (Yogyakarta), ia segera mengadakan rapat dengan mengambil tempat di sebuah rumah dalam kompleks perkebunan teh di desa Halaban, di kaki Gunung Sago, kurang lebih 16 km sebelah Timur Payakumbuh. Rapat dimulai pukul 04.00 WIB pada tanggal 22 Desember 1948. Pukul 04.30 WIB, rapat berhasil mengambil keputusan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan susunan sebagai berikut :¹⁰⁸

¹⁰⁷ Ide Anak Agung Gde Agung, 1994, *Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949*, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, hlm. 28.

¹⁰⁸ V. Sardjono dan GL. Marsadji, *op.cit.*, hlm. 74.

1) Mr. Syafruddin Prawiranegara

Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia merangkap Menteri Pertahanan atau Menteri Penerangan dan Menteri Luar Negeri.

2) Mr. T. Moh. Hasan

Wakil Ketua PDRI merangkap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

3) Mr. St. Moh. Rasyid

Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial dan Menteri Pembangunan Pemuda.

4) Mr. Lukman Hakim

Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman.

5) Is. M. Sitompul

Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan.

6) Ir. Indrachaya

Menteri Perhubungan merangkap Menteri Kemakmuran.

7) M. Danubroto

Sekretaris PDRI.

Setelah terbentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia, kemudian diumumkan ke seluruh pelosok tanah air dan penjuru dunia dengan zender YBJ-6 yang dibawa dari Bukittinggi. Selanjutnya guna melancarkan hubungan antara PDRI dengan daerah-daerah di Sumatera maupun di Indonesia lainnya serta di India, maka didirikan zender di beberapa tempat seperti di Sumpur Kudus, Lintau Buo, Bidar Alam, dan Kota Tinggi.

Dengan adanya pusat zender di beberapa tempat tersebut, maka dapat dicapai perhubungan yang teratur antara PDRI dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Demi kelancaran tugas dan perjuangan melawan Pasukan Belanda, maka PDRI mengambil keputusan mengangkat beberapa Pejabat Gubernur Militer dan Komisaris Pemerintah, antara lain sebagai berikut :¹⁰⁹

- 1) Gubernur Militer untuk Aceh, Langkat, dan Tanah Karo : Teuku Daud Bereuh.
- 2) Gubernur Militer untuk Sumatera Timur dan Tapanuli : Dr. F.L.Tobing.
- 3) Gubernur Militer untuk Sumatera Barat : Mr. Moh. Rasyid.
- 4) Gubernur Militer untuk Riau : R.M. Utoyo.
- 5) Gubernur Militer untuk Sumatera Selatan termasuk Jambi : Dr. A.K. Gani.
- 6) Gubernur Militer untuk Sumatera Utara : Mr. S.M. Amin.
- 7) Gubernur Militer untuk Sumatera Tengah : Mr. Moh. Nasrun.
- 8) Gubernur Militer untuk Sumatera Selatan : Dr. M. Isa.

PDRI juga mengambil kebijakan untuk membentuk Komisariat di Jawa di bawah pimpinan I.J.Kasimo, dengan anggota Susanto Tirtoprodjo, K.H. Masykur, Supeno, dan Panji Suroso.¹¹⁰ Selanjutnya ditetapkan bahwa Sudirman tetap menjabat sebagai Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia, Kolonel A.H.Nasution sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, Kolonel R.Hidayat sebagai Panglima Tentara dan

¹⁰⁹ Ayib Rosidi, 1986, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, Indayu Press, Jakarta, hlm. 155.

¹¹⁰ Abdurrachman Surjomihardjo dan JR. Chaniago, *op.cit.*, hlm. 125.

Teritorium Sumatera, Kolonel Laut M. Nazir disertai tugas memimpin Angkatan Laut, Kolonel Udara H. Suyono disertai tugas untuk memimpin Angkatan Udara, dan Komisaris Besar Polisi Umar Sahid disertai tugas untuk memimpin Polisi Negara.

Pada dasarnya pembentukan PDRI, tidak didasarkan pada mandat yang diberikan oleh Presiden Sukarno kepada Syafruddin Prawiranegara; sebab mandat belum sampai ke tangan Syafruddin Prawiranegara, dikarenakan Belanda telah menguasai sebagian besar wilayah Indonesia.¹¹¹ Berdirinya PDRI di Sumatera tanpa adanya mandat karena mandat tidak sampai tersebut, membuktikan bahwa RI sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum Belanda melakukan penyerangan dan kalangan Republikken mempunyai tekad yang kuat untuk melanjutkan perjuangan mempertahankan RI melawan kolonialisme Belanda

PDRI mempunyai peranan penting sebagai penghubung dan pengganti yang dapat menghindarkan RI dari kekosongan kekuasaan setelah para pemimpinnya ditawan Belanda. Adanya PDRI dapat menepis anggapan bahwa dengan ditahannya para pemimpin politik RI, maka RI telah hancur. PDRI merupakan badan perjuangan yang dapat mempertahankan pemerintahan Negara Indonesia dari kehancuran sebagai akibat serangan militer Belanda yang kedua.

PDRI berpusat di Sumatera Barat, kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mula-mula di Bidar Alam, suatu kampung di

¹¹¹ Aboe Bakar Loebis, *op.cit.*, hlm. 275.

Selatan Sumatera Barat, kemudian pindah ke Utara dan sampai ke Kota Tinggi, kemudian ke Padang, dan dari sana PDRI dijemput oleh Natsir, Leimena dan Halim untuk kembali ke Yogyakarta.¹¹² Hal ini menandakan bahwa PDRI dalam perjuangannya bersifat mobil; hal itu dilakukan untuk menghindari penangkapan anggota PDRI oleh tentara Belanda. Segala berita dan instruksi disampaikan dengan perantara kurir. PDRI yang mobil ini pada akhirnya menyebabkan kesulitan dalam hal perhubungan, khususnya dengan Dewan Keamanan PBB karena tidak pernah diketahui secara pasti di mana kedudukan PDRI; sehingga Dewan Keamanan PBB lebih banyak berhubungan dengan para pemimpin RI di Bangka daripada dengan PDRI. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan peranan PDRI dalam perjuangan seperti tenggelam meskipun tidak dapat disangkal bahwa PDRI merupakan penyelamat negara dan bangsa Indonesia dari kehancuran akibat Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948.

Perjuangan semasa Pemerintah Darurat Republik Indonesia tersebut merupakan kurun waktu yang relatif singkat antara 19 Desember 1948-13 Juli 1949. Masa yang hanya tujuh bulan tersebut mempunyai makna yang sangat penting karena berlangsung ketika Presiden dan Wakil Presiden RI beserta anggota kabinet lainnya ditangkap oleh Belanda. Dalam keadaan darurat seperti itu Pemerintah RI beserta Angkatan Bersenjata tetap tegak dan terus berjuang. Waktu yang sangat singkat itu merupakan bukti sejarah bahwa Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada

¹¹² Colin Wild dan Peter Carey, *op cit.*, hlm. 202.

tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia mendapat dukungan, dipertahankan, dan ditegakkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini rakyatlah yang memungkinkan suatu pemerintahan darurat berjalan seperti suatu pemerintahan yang layak. Sejarah perjuangan semasa PDRI menyangkut perjuangan rakyat bersama TNI dan aparat sipil di hampir semua daerah di Indonesia.¹¹³

2. Reaksi dalam Bidang Militer

a. Pembentukan Pemerintahan Militer

Sesaat sebelum meninggalkan Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, Letnan Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah harian yang ditujukan kepada segenap prajurit TNI, yaitu agar menjalankan tugas sesuai rencana sehubungan dengan telah diserangnya Yogyakarta yang merupakan pelanggaran Persetujuan Gencatan Senjata dalam Persetujuan Renville oleh pihak Belanda. Untuk selanjutnya Panglima Besar Letnan Jenderal Sudirman memimpin dua Komando Daerah Pertahanan secara langsung, yaitu:¹¹⁴

- 1) Komando Daerah Pertahanan Djawa di bawah pimpinan Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD) dengan markasnya di Yogyakarta yang disebut Markas Besar Komando Djawa (MBKD).
- 2) Komando Daerah Pertahanan Sumatera di bawah pimpinan Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera (PTTS)

¹¹³ Abdurrachman Surjomihardjo dan JR. Chaniago, *op.cit.*, hlm. 10.

¹¹⁴ Yahya A. Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 57-58.

dengan markasnya di Bukittinggi yang disebut Markas Besar Komando Sumatera (MBKS).

Pada saat inilah untuk pertama kalinya TNI mempunyai pimpinan dan komando yang tunggal yaitu Letnan Jenderal Sudirman; walaupun belum bisa dikatakan bahwa antara TNI yang berada di bawah PTTD dengan pasukan-pasukan TNI yang berada di bawah PTTS benar-benar merupakan persatuan komando sebab sulitnya hubungan di antara keduanya.

Sehubungan dengan adanya serangan militer dari pihak Belanda terhadap RI pada tanggal 19 Desember 1948, maka untuk dapat melanjutkan pemerintahan dalam keadaan yang sulit dan sebagai alat perjuangan untuk mengerahkan semua tenaga dan sumber-sumber yang ada, segera dibentuk "Pemerintah Militer". Tiga tujuan pokok dari Pemerintahan Militer adalah :¹¹⁵

- 1) Republik tetap berjuang sebagai Negara dengan cara-cara yang layak bagi negara.
- 2) Pemerintahan harus diteruskan bagaimanapun sulitnya keadaan sebagai akibat perang, umpamanya suatu daerah menjadi terpencil karena daerah itu sering didatangi patroli-patroli Belanda atau di daerah itu terdapat pos-pos tetap dari tentara Belanda. Untuk dapat memenuhi hal ini, tenaga-tenaga pamong praja dari bawah sampai ke

¹¹⁵ T.B. Simatupang, *op.cit.*, hlm. 151.

atas didampingi oleh tenaga-tenaga tentara dan kepada daerah-daerah diberikan kekuasaan yang luas.

- 3) Pemerintahan Militer merupakan alat perjuangan, yakni alat untuk mengerahkan dan menyusun segala tenaga untuk perjuangan dan alat untuk mempergunakan sumber-sumber daerah guna perjuangan.

Dalam realisasinya, dilaksanakan dengan cara membentuk pemerintahan militer di Jawa dan Sumatera:

- 1) Pemerintahan Militer di Jawa

Dengan dasar pertimbangan “tertawannya Presiden, Wakil Presiden, dan sejumlah menteri serta Pejabat Pemerintah RI yang nyatanya menimbulkan kekosongan pemerintahan sipil serta upaya untuk segera dapat mengisi kekosongan pemerintahan sipil”, maka pada tanggal 22 Desember 1948 Kolonel A.H.Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyatakan berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa.¹¹⁶ Pada tanggal 25 Desember 1948 Kolonel A.H.Nasution mengeluarkan Instruksi No. 1/MBKD/1948 yaitu “Instruksi Bekerja Pemerintahan Militer Seluruh Jawa”, dengan tujuan menyelamatkan Republik.¹¹⁷

Sistem Pemerintahan Militer di Jawa menggunakan sistem pemerintahan gerilya yang bersifat total, menggunakan sistem “pertahanan-keamanan rakyat semesta” (Hankam Rata). Pada masa inilah, ide dan pemikiran Nasution berupa ajaran tentang perang

¹¹⁶ Nugroho Notosusanto, 1985, *Pejuang dan Prajurit*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 55.

¹¹⁷ A.H. Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 10 Perang Gerilya Semesta II*, Angkasa, Bandung, hlm. 17.

wilayah dipraktekkan dengan seksama, dalam rangka membimbing dan mengembangkan sistem perlawanan terhadap Belanda. Menghadapi taktik perang gerilya TNI, Belanda merasa mendapatkan pukulan-pukulan yang berat dari pasukan gerilyawan Republik yang secara teratur menyerang dan memotong garis komunikasi Belanda.

Sesuai dengan Instruksi PTTD Nomor 1/MBKD/1948 tertanggal 25 Desember 1948, struktur Pemerintahan Militer di Jawa adalah :¹¹⁸

- a) Kepala Pemerintahan Militer dipegang oleh Panglima Tentara dan Teritorium Jawa (PTTD).
- b) Gubernur Militer dipegang oleh Panglima Divisi.
- c) Kepala Pemerintahan Militer Daerah (Keresidenan) dipegang oleh Komandan Militer Daerah (KMD).
- d) Kepala Pemerintahan Militer Kabupaten dipegang oleh Komandan Distrik Militer (KDM).
- e) Kepala Pemerintahan Militer Kecamatan dipegang oleh Komandan Onder Distrik Militer (KODM).
- f) Kepala Pemerintahan Militer desa dipegang oleh Lurah.

Pembentukan pemerintahan militer ini mempunyai maksud supaya dalam keadaan perang terdapat satu pemerintahan yang dapat bertindak secara tegas dan cepat, membantu TNI menangani masalah

¹¹⁸ Saleh A. Djamhari, *op.cit.*, hlm. 13.

pemerintahan dan perjuangan melawan Belanda. Wilayah Pemerintahan Militer di Jawa terdiri dari 3 provinsi dengan Gubernur Militernya, sebagai berikut :¹¹⁹

1. Gubernur Militer untuk Jawa Barat adalah Kolonel Hasan Sadikin.
2. Gubernur Militer untuk Jawa Tengah adalah Kolonel Gatot Subroto.
3. Gubernur Militer untuk Jawa Timur adalah Kolonel Sungkono.

2). Pemerintahan Militer di Sumatera

Pada tanggal 2 Januari 1949 dikeluarkan ketetapan PTTS (Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera) nomor WKS/SJ/Ist. 038 tentang pemerintahan militer untuk daerah Sumatera. Dalam ketetapan ini disebutkan bahwa sambil menunggu penetapan resmi dari PDRI, daerah Sumatera dijadikan daerah militer yang dipimpin oleh beberapa Gubernur Militer. Alasan Sumatera dijadikan daerah militer adalah untuk menjamin efektivitas perjuangan dalam keadaan perang, pimpinan pemerintahan harus dipegang oleh militer supaya pimpinan dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tegas terutama mengenai masalah pertahanan.

Sesuai dengan ketetapan PTTS nomor WKS/SJ/Ist. 038, maka sejak tanggal 2 Januari 1949, Sumatera resmi menjadi daerah militer. Pada hari itu pula mulai diatur organisasi pemerintahan; ditetapkan pembagian wilayah menjadi beberapa provinsi berikut Gubernur

¹¹⁹ Seskoad, *op.cit.*, hlm. 121-124.

Militerinya. Sebagai tindak lanjut dari ketetapan tersebut maka dikeluarkan instruksi No.8/G.14/Instr-49 tentang pembagian provinsi berikut Gubernur Militerinya untuk daerah Sumatera. Berdasarkan instruksi tersebut, maka daerah Sumatera dibagi ke dalam 8 Provinsi dengan Gubernur Militerinya sebagai berikut :¹²⁰

- a) Gubernur Militer untuk Daerah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo adalah Tengku Daud Beureuh.
- b) Gubernur Militer untuk Daerah Sumatera Timur dan Tapanuli adalah Dr. Ferdinand Lumban Tobing.
- c) Gubernur Militer untuk Daerah Sumatera Barat adalah Mr. St. Moh Rasyid.
- d) Gubernur Militer untuk Daerah Riau adalah R.M. Oetoyo.
- e) Gubernur Militer untuk Daerah Jambi adalah Dr. Adnan Kapau Gani.
- f) Gubernur Militer untuk Daerah Sumatera Utara adalah Mr. S.M. Amin.
- g) Gubernur Militer untuk Daerah Sumatera Tengah adalah Mr. M. Nasrun.
- h) Gubernur Militer untuk Daerah Sumatera Selatan adalah Dr. M. Isa.

Gubernur-gubernur Militer tersebut di atas, mulai aktif 1 Januari 1949. Wakil-wakil Gubernur Militer adalah Panglima-panglima

¹²⁰ V. Sardjono dan GL. Marsadji, *op.cit.*, hlm. 83-84.

Tentara di daerah masing-masing. Gubernur di 3 provinsi diangkat menjadi Komisaris Pemerintah, yaitu :

1. Komisaris untuk Daerah Sumatera Utara : Mr. S.M. Amin.
2. Komisaris untuk Daerah Sumatera Tengah : Mr. M. Nasrun.
3. Komisaris untuk Daerah Sumatera Selatan : Dr. M. Isa.

Sesuai dengan ketetapan PTTS nomor WKS/SJ/Ist.038 tertanggal 2 Januari 1949, struktur Pemerintahan Militer di Sumatera adalah sebagai berikut:¹²¹

- a) Kepala Pemerintahan Militer dipegang oleh Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera (PTTS).
- b) Gubernur Militer dipegang oleh Panglima Divisi.
- c) Pemerintahan Militer Daerah (Keresidenan) dipegang oleh Komandan Militer Daerah (KMD).
- d) Pemerintahan Militer Kabupaten dipegang oleh Komandan Distrik Militer (KDM).
- e) Pemerintahan Militer Kecamatan dipegang oleh Komandan Onder Distrik Militer (KODM).
- f) Pemerintahan Militer Desa dipegang oleh Lurah.

Pada dasarnya, Pemerintahan Militer selama Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, mempunyai arti dan fungsi untuk menunjukkan keberadaan TNI. Pemerintahan militer mutlak ada

¹²¹ Seskoed, *op.cit.*, hlm. 119.

karena masalah yang muncul sebagai akibat kekosongan pemerintahan sipil, harus segera diatasi.

Pembentukan Pemerintahan Militer di Indonesia bukan merupakan upaya untuk meniadakan pemerintahan sipil, melainkan karena kegagalan pemerintahan sipil untuk mempertahankan kekuasaan. Dari pendapat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa militer melakukan campur tangan karena keadaan pada saat itu menuntut, yaitu situasi yang serba kacau baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun politik. Kekacauan yang terjadi menyusul tindakan militer Belanda terhadap Republik memerlukan suatu kekuasaan yang mutlak untuk menghindari akibat yang lebih buruk karena adanya ancaman baik dari dalam negeri maupun dari Belanda. Sejalan dengan berlakunya pemerintahan militer, maka segala badan dan jawatan yang penting dimiliterisasikan serta berlaku hukum militer. Dan pengalaman telah membuktikan bahwa Pemerintahan Militer di Indonesia menjadi salah satu alat yang utama bahkan dasar yang utama dalam perang rakyat semesta.

b. *Ofensif APRI*

Dengan adanya Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, TNI tidak tinggal diam. Sejak Panglima Besar Letnan Jenderal Sudirman mengeluarkan Perintah Kilatnya pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 8.00 WIB, TNI terus melakukan perlawanan terhadap

Belanda dengan bergerilya sesuai dengan rencana sebelumnya, yaitu sesuai dengan Perintah Siasat No. 1 tertanggal 9 November 1948.¹²²

Perang gerilya untuk menghadapi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 merupakan pelaksanaan dari Perintah Panglima Besar Letnan Jenderal Sudirman yang tertuang dalam Perintah Siasat No. 1 tertanggal 9 November 1948, maupun dalam Perintah Kilat Panglima Besar APRI tertanggal 19 Desember 1948. Perang gerilya semasa Perang Kemerdekaan juga merupakan response terhadap menyerahnya pimpinan nasional kepada musuh, meskipun Presiden Sukarno sebelumnya di berbagai rapat dengan lantang menyatakan bahwa jika Belanda menyerang, ia sendiri yang akan memimpin perang gerilya. Sebaliknya Letnan Jenderal Sudirman, walaupun dalam keadaan sakit ia tetap menepati janjinya untuk berangkat ke luar Ibu Kota Yogyakarta, bergabung dengan para prajuritnya dan memimpin perang gerilya secara total terhadap tentara Belanda.¹²³

Secara teknis dan militer, pada tahap awal agresi militernya, Belanda mempunyai cukup alasan untuk menyimpulkan bahwa pihaknya telah mencapai kemenangan. Kesimpulan tersebut hanya didasarkan pada perhitungan faktual militer dimana Belanda dengan mudah berhasil menduduki kota-kota besar dan jalan-jalan utama di wilayah Sumatera dan Jawa. Secara politis, Belanda menganggap bahwa dengan ditahannya para pemimpin RI berarti tujuan untuk

¹²² N.S.S. Tarjo, *op.cit.*, hlm. 23.

¹²³ Nugroho Notosusanto, *op cit.*, hlm. 54.

meniadakan Pemerintah RI berhasil. Belanda juga menafsirkan APRI yang melakukan gerak mundur ke daerah pedalaman merupakan tanda kekalahan dan kehancuran TNI.

Gerak mundur pasukan Angkatan Perang RI merupakan taktik untuk menghindarkan diri dari kehancuran dengan konsolidasi kekuatan dan selanjutnya melakukan *ofensif* secara gerilya. Dikatakan sebagai siasat karena hal tersebut telah direncanakan oleh APRI. APRI menyadari bahwa kekuatan militernya secara taktis jauh berada di bawah kekuatan Belanda karena pada intinya kekuatan APRI bersumber dari semangat perjuangan dan tekad serta usaha untuk menengahkan Belanda.

Pada bulan Februari 1949, Pemerintahan Militer di Jawa dan di Sumatera mulai berjalan dengan baik. Semangat para pejuang Republik yang semula agak goyah karena isu-isu yang disebarkan Belanda; seperti isu tertangkapnya Letnan Jenderal Sudirman, berangsur-angsur mulai pulih setelah diadakan klarifikasi berita yang sebenarnya. Demikian juga halnya dengan rakyat yang keliru menafsirkan gerak mundur pasukan TNI dari Yogyakarta sebagai tanda kekalahan dan kehancuran Pemerintah RI dan TNI.

Pasukan TNI melakukan perembesan ke tempat-tempat pendudukan Belanda untuk menyusun kekuatan. Perkembangan positif TNI selanjutnya terlihat dari keberhasilannya menduduki dan menjadikan Pulau Jawa dan Sumatera sebagai medan gerilya yang



luas. Di kedua pulau tersebut, para gerilyawan Republik melakukan tekanan-tekanan ke posisi musuh dengan menggunakan taktik *hit and run*, di mana pasukan setelah mengadakan pukulan menghilang untuk menyiapkan diri dan mengulangi pukulan apabila saat yang tepat sudah tiba. Terbentuknya medan gerilya yang luas di Sumatera dan di Jawa menjadikan garis demarkasi tidak berarti dan tidak jelas lagi.

Aktivitas para pejuang Republik terhadap garis-garis penghubung atau komunikasi Belanda seperti pemutusan kawat telpon, pengrusakan jalan kereta api, penyergapan konvoi logistik, dan amunisi menyebabkan Belanda harus memperbanyak pos-pos penjagaan. Tindakan Belanda ini semakin menguntungkan posisi gerilyawan Republik, karena jumlah pasukan Belanda sangat terbatas dibanding dengan luas wilayah yang dimiliki oleh pasukan Republik.

Perkembangan berikutnya dapat dilihat dari keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol. Soeharto selaku Komandan Brigade X *Wehrkreise* III atas ide dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang berhasil menduduki kota Yogyakarta dalam waktu enam jam.¹²⁴ Serangan spektakuler tersebut memberikan bukti bahwa TNI masih eksis dan mempunyai inisiatif untuk menyerang. Selain itu pendudukan atas kota Yogyakarta selama enam jam telah memberikan dukungan terhadap perjuangan diplomasi, menguatkan dan mengukuhkan mental serta moral rakyat agar lebih

¹²⁴ Mohamad Roem, dkk, *op.cit.*, hlm. 80.

gigih melakukan perlawanan; sehingga usaha Belanda yang ingin menggoyahkan mental rakyat dengan teror justru mendapat reaksi sebaliknya, dan menimbulkan kesadaran bahwa tindakan Belanda tersebut harus secepatnya dibalas.

Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta merupakan Perang Rakyat Semesta dalam menghadapi Belanda. Dalam hal ini tentara betul-betul manunggal dengan rakyat. Kejadian ini disiarkan oleh pemancar kita yang ada di Gunung Kidul (Playen), dari Playen ke Bukittinggi, dari Bukittinggi ke India, dan dari India ke PBB.¹²⁵ Ternyata ini mempunyai pengaruh besar, sehingga terjadi keputusan di *Security Council* bahwa Republik harus kembali. Sebagai akibat dari keputusan tersebut, diadakanlah perundingan antara Van Roijen dan Rum yang pada dasarnya membuka jalan bagi terselenggaranya KMB.

Antara bulan April sampai dengan Mei 1949 secara strategis serangan militer Belanda sudah meleset dari rencana, karena gerilyawan Republik dengan Pasukan TNI-nya masih aktif dan produktif. Tapi sebaliknya, tentara Belanda semakin menurun kondisi mentalnya, karena merasa jemu dengan perang yang tidak berkesudahan. Demoralisasi yang melanda pasukan Belanda rupanya berkaitan dengan hilangnya optimisme mereka yang selama ini menjadi penyemangat mereka. Dalam waktu kurang lebih satu bulan, tindakan pasifikasi sudah dapat diakhiri oleh TNI. Posisi dan kekuatan

¹²⁵ Colin Wild dan Peter Carey, *op.cit.*, hlm. 191.

APRI yang semakin maju memberi kesempatan kepada Republik untuk memenangkan perjuangan ini.

Sementara itu di wilayah Sumatera, Kolonel Hidayat mengeluarkan perintah kepada seluruh komandan untuk melakukan konsolidasi dan penyerangan terhadap obyek-obyek vital musuh. Perintah tersebut memberi dorongan untuk segera melakukan konsolidasi dan secepatnya melakukan tindakan *ofensif*. TNI yang berada di Sumatera mempunyai ruang gerak yang luas sehingga dapat menduduki pos-pos kecil Belanda dengan kekuatan yang sedang. Kondisi geografis dan jumlah pasukan Belanda yang hanya terdiri dari tiga divisi, dapat dijadikan pertimbangan APRI untuk melakukan pertahanan *linier*. Pertimbangan lain karena persenjataan TNI di wilayah Sumatera relatif cukup baik dibandingkan dengan yang ada di wilayah Jawa.¹²⁶

Gerakan pasukan gerilya yang meluas dengan melakukan penyerangan di wilayah Jawa dan Sumatera dapat mengacaukan strategi Belanda. Strategi *ofensif* APRI memberikan dampak demoralisasi bagi pasukan Belanda karena usaha Belanda untuk mematahkan perlawanan rakyat Republik ternyata gagal.

Perlu diketahui bahwa selama bergerilya, Angkatan Perang Republik Indonesia dan rakyat secara konsepsional diikutsertakan dalam pertahanan negara yang dikenal dengan nama Perang Rakyat

¹²⁶ V. Sardjono dan GL. Marsadji, *op.cit.*, hlm. 43.

Semesta; yang pada waktu itu juga dikenal dengan sebutan *total people's defence*. Sistem pertahanan semacam ini menyusun *wehrkreise* atau lingkungan pertahanan yang total dengan berlandaskan pada desa sebagai satuan pertahanan yang terkecil dan kecamatan sebagai unit pertahanan militer yang terendah. Berfungsinya *wehrkreise-wehrkreise* secara efektif memungkinkan TNI memusatkan serangannya pertama-tama pada garis-garis komunikasi dan logistik musuh, kemudian ke kota-kota pendudukan.¹²⁷

B. Reaksi dari Luar RI

Reaksi dari luar RI terhadap Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, pada umumnya berupa reaksi dalam bidang politik, diantaranya adalah :

1. Konferensi Asia Mengenai Indonesia (*Asian Conference on Indonesia*)

Konferensi Asia Mengenai Indonesia berlangsung dari tanggal 20-23 Januari 1949, bertempat di New Delhi (India), dipimpin oleh Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Konferensi ini diadakan atas permintaan Perdana Menteri Birma Thakin Nu; didasarkan atas laporan dari seorang utusan resmi Pemerintah Birma bernama Thakin Tha Kin yang sengaja dikirim untuk melihat perkembangan perjuangan rakyat Indonesia. Thakin Tha Kin berhasil keluar dari Indonesia dengan menumpang pesawat

¹²⁷ Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 53.

terakhir yang meninggalkan Republik Indonesia dari daerah Madiun menuju Manila, ketika Belanda menyerang Yogyakarta.¹²⁸

Berdasarkan laporan dari Thakin Tha Kin tentang serangan militer Belanda terhadap RI, Pemerintah Birma menarik kesimpulan bahwa harus diadakan suatu Konferensi Internasional untuk membantu Republik Indonesia; tetapi Birma menyadari bahwa negerinya terlalu kecil dan lemah untuk menyelenggarakan konferensi tersebut, lagi pula Birma sedang menghadapi keadaan dalam negerinya yang gawat sehubungan dengan adanya pemberontakan komunis. Untuk itu, Perdana Menteri Thakin Nu mengusulkan kepada Perdana Menteri Jawaharlal Nehru supaya diadakan suatu konferensi untuk membicarakan masalah Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 terhadap Republik Indonesia. Usul ini disetujui oleh Nehru dan dalam waktu singkat segera diadakanlah *Asian Conference on Indonesia*. Sembilan belas negara di Asia Afrika atau yang mempunyai kepentingan di Asia diundang dalam konferensi tersebut : Afganistan, Australia, Birma, Sri Lanka, Cina, Mesir, Etiopia, Iran, Irak, Libanon, Pakistan, Filipina, Arab Saudi, Muang Thai, Suriah, Yaman, Nepal, dan Selandia Baru. Turki juga diundang, tetapi tidak bersedia untuk hadir. Dalam konferensi ini, Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Muang Thai diwakili oleh pengamat, sedangkan negara-negara lainnya mengirimkan delegasi yang diketuai oleh kuasa penuhnya masing-masing.¹²⁹

¹²⁸ P.R.S. Mani, *op.cit.*, hlm. 163.

¹²⁹ A.H.Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 11 Konferensi Meja Bundar*, Angkasa, Bandung, hlm, 42.

Perdana Menteri Jawaharlal Nehru bersedia menyelenggarakan suatu konferensi dalam rangka memperjuangkan nasib RI, karena Nehru berpendapat bahwa perjuangan RI merupakan perjuangan umum Asia untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme. Pada saat itu, dalam benak Nehru tidak pernah ada pemikiran untuk mengharapkan balasan dari Indonesia; karena beliau memandang bahwa tindakan-tindakan India tersebut sesuai dengan keyakinan bahwa kemerdekaan semua rakyat yang dijajah tidak dapat dibagi-bagi menurut negeri dan hanya tinggal menunggu tumbangnya benteng-benteng kolonialisme satu persatu.

Pada waktu konferensi tersebut berlangsung, Mr. A.A. Maramis sudah berada di New Delhi bersama dengan Dr. Sudarsono sebagai wakil RI di India. Hal ini menguntungkan sekali karena kedua pejabat tersebut bisa memberikan keterangan yang lengkap tentang keadaan RI pada saat itu. Skenario konferensi dijelaskan oleh P.M. Nehru :

“Hari ini kita bertemu karena kemerdekaan salah satu saudara kita terancam dan kolonialisme masa lalu yang sudah hampir mati mengangkat kepalanya lagi serta menantang semua kekuatan yang berjuang untuk membangun tatanan dunia baru. Tantangan ini mempunyai arti yang lebih dalam dari pada yang tampak, karena inilah tantangan bagi Asia yang baru bangkit, yang telah sekian lama menderita di bawah berbagai bentuk kolonialisme.”¹³⁰

Bagi RI, konferensi ini menjadi pendorong semangat juang RI untuk melawan Belanda. Pemimpin yang ditawan melihat munculnya harapan baru dari konferensi ini yang dipandang sebagai puncak dari tindakan kesetiakawanan negara-negara di Asia-Afrika terhadap perjuangan RI.

¹³⁰ P.R.S. Mani, *op.cit.*, hlm. 166.

Pada dasarnya, negara yang hadir dalam konferensi ini memberi kekuatan moril bagi perjuangan Kemerdekaan Indonesia yang digilas oleh Belanda dengan aksi militernya yang pertama dan kedua. Tanpa adanya dukungan semacam ini tentu sangatlah sulit bagi RI untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang telah lama diperjuangkan.

Resolusi yang dihasilkan dalam konferensi di New Delhi ini merupakan pukulan berat bagi Belanda. Resolusi yang dihasilkan dalam konferensi ini dengan jelas menggambarkan kedudukan Internasional Belanda yang hancur sama sekali karena serangan militernya yang kedua terhadap RI. Resolusi yang dihasilkan dalam konferensi ini merupakan tuntutan kepada Belanda tentang:¹³¹

- a. Pembebasan segera para pemimpin RI.
- b. Penyerahan segera daerah Yogyakarta kepada kekuasaan RI.
- c. Penyerahan kembali seluruh wilayah kekuasaan RI di Jawa, Sumatera, dan Madura selambat-lambatnya tanggal 15 maret 1949.
- d. Penyerahan kedaulatan atas seluruh wilayah Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1950.

2. Diadakan Perjanjian Rum-Roijen

Atas inisiatif UNCI, diadakanlah perundingan antara Moh. Rum (wakil dari Indonesia) dan Van Roijen (wakil dari Belanda), yang pada tanggal 7 Mei 1949 mencapai suatu persetujuan dan tersusunlah apa yang kemudian terkenal dengan nama Pernyataan Rum-Roijen (*Rum-Roijen*

¹³¹ Aboe Bakar Loebis, *op.cit.*, hlm. 292.

Statement). Pertemuan dimulai pada tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes (Hotel Duta Indonesia) di Jakarta.¹³² Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Roijen dengan anggota Mr. NS. Blom, Mr. A.S.Jacob, Dr.J. Van Der Velde, dan keempat penasehatnya.¹³³ Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Moh. Rum, wakilnya Mr. Ali Sastroamijoyo, dan anggotanya Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Supomo, dan Latuharhary. Sedangkan penasehatnya adalah Sutan Syahrir, Mr. Laoh, Moh. Natsir, Dr. Darmasetiawan, Mr. A. Kusumaatmadja, dan Sumarta dengan sekretaris A.K. Pringgodigdo.¹³⁴ Delegasi ini bertugas untuk mengadakan pembicaraan tentang sengketa kedua negara (Indonesia-Belanda). Dalam setiap pembicaraan, Delegasi RI selalu berpegang teguh pada dasar politik pemerintah yang didasarkan pada resolusi DK PBB tertanggal 28 Januari 1949.

Dalam pembicaraan terjadi tawar menawar yang sangat alot, dimana Belanda menuntut penghentian perang gerilya sebelum pemerintahan RI dikembalikan ke Yogyakarta, sedangkan RI menuntut pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta sebelum penghentian perang gerilya. Melihat hal itu, Cochran mempertemukan Rum dan Roijen dalam pembicaraan empat mata dan tercapailah persetujuan. Dalam pidatonya, Rum mengatakan bahwa sebagai ketua Delegasi RI dia diberi kuasa oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta untuk menyatakan kesanggupan mereka pribadi sesuai dengan Resolusi DK PBB tertanggal

¹³² Colin Wild dan Peter Carey, *op.cit.*, hlm. 180.

¹³³ Nugroho Notosusanto, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 165.

¹³⁴ Sri Endang Sumiyati, dkk, *op.cit.*, hlm.134.

28 Januari 1948 yang berusaha mendesak supaya selekasnya Pemerintah RI dipulihkan ke Yogyakarta.

Kemudian menyusul pidato Van Roijen yang menyatakan bahwa Belanda bersedia untuk memulihkan Pemerintah RI, menghentikan segala kegiatan militernya, dan membebaskan semua tawanan politik. Selanjutnya Belanda berusaha untuk menyelenggarakan KMB untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang nyata dan sempurna kepada Negara Indonesia Serikat sesuai dengan asas Persetujuan Renville.

Setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka tercapailah suatu persetujuan yang dikenal dengan nama *Rum-Roijen Statement*. Nama tersebut tepat karena hasil perundingan bukan merupakan perjanjian resmi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dikatakan secara lisan oleh ketua delegasi masing-masing. Adapun isi *Rum-Roijen Statement* yang dibacakan secara formal oleh Komisi PBB pada tanggal 7 Mei 1949, pukul 17.00 WIB adalah:¹³⁵

- a. Sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB, Indonesia menyatakan kesanggupannya untuk menghentikan perang gerilya.
- b. Belanda dan Indonesia bekerjasama mengembalikan perdamaian dan menjaga kermanan serta ketertiban.
- c. Indonesia turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dengan tidak bersyarat.

¹³⁵ Ide Anak Agung Gde Agung, 1994, *Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949*, Yayasan Pustaka Nusantara, Jakarta, hlm. 84-85.

- d. Delegasi Belanda menyetujui pembentukan panitia bersama di bawah pengawasan PBB.
- e. Pemerintah Belanda setuju bahwa Pemerintah RI harus bebas dan leluasa melaksanakan jabatan sepatutnya dalam satu daerah, meliputi Yogyakarta.
- f. Pemerintah Belanda menyetujui adanya RI sebagai suatu negara.
- g. Pemerintah Belanda membebaskan dengan tidak bersyarat pemimpin-pemimpin RI dan tahanan politik yang ditangkap sejak tanggal 19 Desember 1948.
- h. Konferensi Meja Bundar segera diadakan setelah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

Pada dasarnya hasil Persetujuan Rum-Roijen tidak dapat diterima sama sekali oleh pihak militer maupun pihak sipil (dalam hal ini PDRI); walaupun demikian untuk tahap selanjutnya pihak militer maupun PDRI mendukung dan sepenuhnya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Persetujuan Rum-Roijen. Mengenai hal ini akan dijelaskan dalam uraian berikut ini :

a. Sikap Militer

Pihak militer sejak semula tidak menyetujui adanya diplomasi karena merasa tidak yakin akan keberhasilan Persetujuan Rum Roijen. Dalam hal ini, Panglima Besar Letnan Jenderal Sudirman pada prinsipnya tidak bisa menerima Persetujuan Rum-Roijen karena ia berpandangan bahwa Perundingan Rum-Roijen merupakan taktik

Belanda untuk menghindarkan kekalahannya di medan pertempuran dengan beralih pada taktik perundingan politik, yang mempunyai harapan besar dapat menyelamatkan kekalahannya.¹³⁶

Telah menjadi rahasia umum bahwa Belanda pada saat itu hanya mampu bertahan, dan taktik bertahan yang cukup lama itu menyebabkan Belanda lemah; akhirnya menyerah dan untuk selanjutnya dapat kita paksa untuk meninggalkan Indonesia dengan kekuatan senjata. Namun Belanda pandai, tidak mau memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk mengalahkan Belanda di medan pertempuran, dibujuknya kaum politisi dan berhasillah mereka mengadakan Perundingan Rum-Roijen. Dengan kebijaksanaan Pak Dirman bersama seluruh anak buahnya, maka perundingan Rum-Roijen berjalan dengan lancar. Dalam hal ini untuk kesekian kalinya Pak Dirman membuktikan dirinya sebagai prajurit yang sejati, prajurit yang patuh dan taat pada perintah atasan, walaupun terasa berat namun tetap dilaksanakan. Itulah Sudirman sebagai prajurit yang taat.

b. Sikap PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)

Pada waktu terjadi pembicaran antara Rum-Roijen, PDRI sama sekali tidak mengetahui. Hal ini dikarenakan PDRI sulit untuk dihubungi sementara pertentangan antara Belanda dengan pihak RI semakin meruncing. Maka dari itu, para pemimpin RI di Bangka terpaksa mengikuti saran UNCI untuk berunding dengan pihak

¹³⁶ N.S.S. Tarjo, *op.cit.*, hlm. 48.

Belanda dan selanjutnya memutuskan untuk memilih Mohammad Rum sebagai wakil dari Pemerintah RI untuk mengadakan perundingan dengan pihak Belanda; walaupun kebijakan ini mendapat tentangan dari berbagai pihak karena para pemimpin pemerintah RI di Bangka, khususnya Sukarno-Hatta telah mengabaikan keberadaan dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara.

Mengenai keputusan dari para pemimpin Pemerintah RI di Bangka untuk berunding dengan pihak Belanda; Syafruddin Prawiranegara selaku ketua PDRI merasa tersinggung, karena merasa diabaikan begitu saja padahal pemerintahannya adalah Pemerintah RI yang sah. Begitu pula dengan reaksi dari para pemimpin PDRI yang sebenarnya kurang setuju atas keputusan berunding dengan pihak Belanda tanpa mengikutsertakan ataupun sekedar meminta persetujuan dari para pemimpin PDRI.¹³⁷

Untuk mengatasi persoalan ini, pada tanggal 14 Juni 1949, Hatta memutuskan untuk berangkat ke Aceh dengan tujuan menghubungi para pemimpin PDRI guna menjelaskan mengenai langkah yang terpaksa ditempuh oleh para pemimpin Pemerintah RI di Bangka sehubungan dengan tercapainya Persetujuan Rum-Roijen. Hatta hanya

¹³⁷ Abdurrachman Surjomihardjo dan JR. Chaniago, *op.cit.*, hlm. 132.

bertemu dengan Kolonel Hidayat karena Syafruddin Prawiranegara sedang berada di Sumatera Barat.¹³⁸

Sehubungan dengan kedatangan Hatta ke Aceh dalam rangka menjelaskan mengenai langkah yang terpaksa ditempuh oleh para pemimpin Pemerintah RI di Bangka demi tetap tegaknya perjuangan RI, Syafruddin Prawiranegara dapat memahaminya dan tidak lagi mengecam tindakan para pemimpin Pemerintah RI karena telah mengabaikan pemerintahannya. Untuk selanjutnya PDRI pada tanggal 1 Juli 1949 mengadakan rapat di Sungai Naning yang dihadiri oleh para menteri PDRI, tokoh sipil, tokoh militer, dan tokoh politik Sumatera Barat untuk membicarakan mengenai Pernyataan Rum-Roijen, masalah pengembalian mandat, dan penyambutan utusan dari pusat yang akan menjemput Syafruddin Prawiranegara.¹³⁹

Berdasarkan hasil Persetujuan Rum-Roijen, maka Presiden Sukarno yang pada saat itu berada di Sumatera memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dengan penetapan Presiden yang segera dijawab dengan tegas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX bahwa Beliau sanggup untuk menjaga keamanan dan mengorganisir Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta serta Polisi Negara akan dibangun kembali selama 24 jam.¹⁴⁰

Sebagai persiapan pertama, Sri Sultan Hamengku Buwono IX atas nama

¹³⁸ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 10 Perang Gerilya Semesta II*, Angkasa, Bandung, hlm. 553.

¹³⁹ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 54.

¹⁴⁰ T.B. Simatupang, *op.cit.*, hlm. 167.

Pemerintah RI mengeluarkan perintah penghentian tembak menembak kepada TNI sehingga penarikan pasukan Belanda dapat berjalan dengan lancar. Penarikan pasukan Belanda dilakukan pada tanggal 29 Juni 1949, pada sore harinya selesailah penarikan tentara Belanda di seluruh Yogyakarta tanpa insiden apapun tak terkecuali satu tembakan pun. Ini semua berkat bantuan dan kesadaran seluruh pejuang dan masyarakat.¹⁴¹

Untuk selanjutnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX atas nama Presiden RI mengeluarkan selebaran dan berpidato melalui RRI Yogyakarta bahwa pada tanggal 30 Juni 1949 kekuasaan pemerintahan di seluruh daerah Yogyakarta telah kembali, untuk sementara kekuasaan sipil dan militer dipegang dan dijalankan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, selaku Menteri Negara Koordinator Keamanan. Kemudian apabila keadaan sudah memungkinkan, dengan segera Presiden dan Wakil Presiden beserta anggota pemerintahan lainnya akan kembali ke Yogyakarta; di sinilah babakan baru kembali bersatunya antara “Kedaulatan dan Kekuasaan” di Yogyakarta.

Pada tanggal 6 Juli 1949, pukul 12.25 WIB rombongan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri Agus Salim, Menteri Pendidikan Ali Sastroamijoyo, Moh. Rum, dan Kastaf Angkatan Perang Suryadarma tiba di Lapangan Terbang Maguwo dari Bangka dengan menumpang pesawat terbang Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI), dan disambut Sri Sultan

¹⁴¹ Badan Musyawarah Musea, *op.cit.*, hlm. 77.

Hamengku Buwono IX.¹⁴² Seluruh rakyat di tepi jalan dengan teriakan “Merdeka” menyambut kedatangan rombongan yang ditunggu-tunggu sejak pagi dan dilanjutkan dengan upacara singkat yang dipimpin oleh Presiden Sukarno.

Pada tanggal 10 Juli 1949, Mr. Syafruddin Prawiranegara selaku pimpinan PDRI bersama penjemputnya Dr. Leimena, Moh. Natsir, dan Dr. Halim tiba di Yogyakarta, disambut Wakil Presiden Moh.Hatta dan Moh. Rum.¹⁴³ Pada tanggal 10 Juli 1949, Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Letnan Jenderal Sudirman, dengan kesederhanaannya, kerendahanhatinya, memasuki Ibukota Perjuangan.¹⁴⁴ Kembalinya “Pejuang Bapak Gerilya Kita” disambut dengan upacara militer di Alun-alun Utara Yogyakarta.

Pada tanggal 13 Juli 1949 malam di Istana Presiden Yogyakarta diadakan sidang Kabinet, yang dipimpin oleh Wakil Presiden Moh.Hatta. Dalam sidang ini Syafruddin Prawiranegara selaku Ketua PDRI menyerahkan mandat secara resmi kepada Wakil Presiden Moh. Hatta.¹⁴⁵ Dengan demikian berakhir riwayat PDRI; dalam artian bahwa PDRI tidak mempunyai alasan lagi untuk menjalankan kewajibannya sebagai *emergency government* karena Pemerintahan RI di Yogyakarta sudah bisa berjalan lagi seiring dengan telah dikembalikannya Yogyakarta kepada RI dan Sukarno-Hatta beserta sejumlah menteri dan Pejabat pemerintah RI

¹⁴² Sri Endang Sumiyati, dkk, *op.cit.*, hlm. 41.

¹⁴³ V. Sardjono dan GL. Marsadji, *op.cit.*, hlm. 99.

¹⁴⁴ N.S.S. Tarjo, *op.cit.*, hlm. 77.

¹⁴⁵ Sekretaris Negara, *op.cit.*, hlm. 227.

yang tadinya ditawan Belanda. Sebelum menyerahkan mandat PDRI, Mr. Syafruddin Prawiranegara menyatakan bahwa PDRI tidak menentukan sikap terhadap hasil dari Persetujuan Rum-Roijen, PDRI menyerahkan putusan mengenai Persetujuan Rum-Roijen itu kepada kabinet, BP KNIP, dan Pimpinan Angkatan Perang RI. Mengenai akibat-akibat dari putusan yang telah diambil itu akan dipikul bersama-sama.¹⁴⁶

3. Sikap PBB dan Dunia Internasional

Mereka pada umumnya mengecam tindakan Belanda yang berani melanggar Persetujuan Gencatan Senjata yang merupakan hasil perundingan RI dengan Belanda di bawah pengawasan KTN; buktinya sehari sesudah penyerangan Belanda terhadap RI, wakil Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB, Dr. Phillip Jessup meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera mengadakan sidang darurat. DK PBB mulai bersidang pada tanggal 22 Desember 1948, membicarakan usul dari AS, Columbia, dan Syria; yang menganjurkan agar kedua belah pihak yang bertikai mulai saat itu menghentikan pertempuran, dan segera mengundurkan tentaranya ke garis demarkasi masing-masing yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Gencatan Senjata pada tanggal 17 Januari 1948.¹⁴⁷ Namun resolusi tersebut gagal karena hanya mendapat 5 suara (AS, Inggris, Cina, Columbia, dan Syria) sedangkan Belgia dan Perancis abstain dengan dalih bahwa DK tidak mempunyai wewenang untuk campur tangan masalah antara Belanda dengan RI; Uni Soviet dan Ukraina

¹⁴⁶ T.B. Simatupang, *op. cit.*, hlm. 230.

¹⁴⁷ A.H. Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 Agresi Militer Belanda II*, Angkasa, Bandung, hlm. 360.

juga abstain karena menganggap resolusi tersebut kurang tegas dan tidak mengecam Belanda sebagai agresor.

Amerika Serikat, Columbia, dan Syria kemudian mengajukan resolusi bersama yang didukung oleh Canada, Argentina, Cina, dan Inggris yang diterima oleh DK PBB sebagai resolusi 24 Desember 1948. Resolusi ini meminta :¹⁴⁸

- a. supaya kedua belah pihak yang bertikai (Belanda dengan RI), mulai saat itu segera menghentikan pertempuran;
- b. supaya Belanda segera membebaskan Presiden RI dan tahanan-tahanan politik lainnya yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam hal ini KTN diminta supaya mengawasi pelaksanaan resolusi tersebut dan melaporkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak tanggal 12 Desember 1948.

Pada tanggal 27 Desember 1948 dalam sidang DK PBB, wakil Negeri Belanda mengatakan bahwa pemerintahnya telah memperhatikan resolusi tersebut. Pemerintah Belanda telah mengadakan hubungan dengan pemerintah RI untuk menentukan sikap Belanda terhadap resolusi tersebut; sehingga tahapan operasional aksi Belanda secara praktis berakhir.¹⁴⁹

Sementara itu datang laporan dari KTN, bahwa Belanda tidak mengindahkan resolusi PBB, Belanda tetap melanjutkan aksi-aksi militernya dan menolak untuk membebaskan para pemimpin RI yang dipenjarakan di Bangka; dalam hal ini KTN mengharapkan supaya DK

¹⁴⁸ George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm. 432.

¹⁴⁹ C. Smit, *op.cit.*, hlm. 35.

PBB bertindak tegas terhadap Belanda. Oleh karena itu, DK PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 28 Desember 1948 yang didukung oleh AS, Argentina, Canada, Columbia, Uni Soviet, Ukraina, dan Syria; sedangkan Belgia, Inggris, dan Perancis abstain. Adapun isi resolusi tersebut menyerukan kepada Pemerintah Belanda supaya segera membebaskan Presiden dan pemimpin pemerintahan RI lainnya serta melaporkan pelaksanaan resolusi tersebut kepada Dewan Keamanan.¹⁵⁰

Pihak Belanda tetap membandel, bahkan Van Roijen menegaskan bahwa masalah Indonesia merupakan masalah intern, sehingga negara lain maupun DK PBB tidak berhak campur tangan. Meskipun pendirian tersebut ditolak oleh dunia Internasional khususnya PBB, tetapi Belanda tidak segan-segan untuk mengulangi *statement*-nya serta mempertahankannya.

Sementara itu Belanda terus mencemooh resolusi-resolusi DK-PBB, bahkan tidak mengindahkannya sama sekali; buktinya pada tanggal 10 Januari 1949, para pemimpin RI yang dipenjarakan di Bangka secara resmi diberitahu oleh para pejabat Belanda bahwa Pemerintah Belanda tidak mengakui lagi Republik sebagai suatu organisasi politik yang memiliki wilayah sendiri, oleh karena itu tidak mengakui lagi para tahanan tersebut sedang menduduki jabatan pemerintahan. Mereka diberitahu bahwa Pemerintah Belanda setuju untuk membebaskan mereka di dalam batas-batas Pulau Bangka dan mengijinkan keluarga mereka untuk ikut tinggal

¹⁵⁰ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 44.

di sana, asalkan mereka bersedia memberi suatu pernyataan politik bahwa mereka mau mengundurkan diri dari semua aktivitas politik. Melihat kenyataan ini, DK PBB segera mengambil tindakan dengan mengeluarkan resolusi 28 Januari 1949 yang merupakan hasil kompromi dari AS, Cina, Inggris, Canada, Cuba, Nurwegia, dan Mesir yang isinya :¹⁵¹

- a. Penghentian semua operasi militer dengan segera oleh Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya oleh Republik; kedua belah pihak harus bekerjasama untuk mengadakan perdamaian.
- b. Pembebasan dengan segera dan dengan tidak bersyarat semua tahanan politik di dalam daerah Republik, yang ditawan oleh Belanda semenjak tanggal 19 Desember 1948.
- c. Belanda harus memberikan kesempatan kepada pembesar-pembesar Pemerintah Republik untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera supaya mereka dapat melaksanakan Pasal 1 tersebut di atas, dan supaya pembesar-pembesar Republik dapat melakukan kewajiban-kewajiban mereka dengan bebas; pada tingkat pertama pemerintahan di dalam kota Yogyakarta dan daerah sekelilingnya, sedangkan kekuasaan Republik di daerah-daerah Republik menurut batas-batas Persetujuan Renville secara berangsur-angsur dikembalikan kepada Republik.
- d. Perundingan-perundingan akan dilakukan secepatnya dengan dasar Persetujuan Linggarjati, Persetujuan Renville, dan terutama

¹⁵¹ Sekretaris Negara, *op.cit.*, hlm. 205.

berdasarkan pembentukan suatu Pemerintah *ad interim* federal paling lambat pada tanggal 15 Maret 1949; pemilihan untuk Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949.

- e. Komisi Jasa-Jasa Baik (Komisi Tiga Negara) diganti namanya menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (*United Nations Commission for Indonesia* atau UNCI). Tugasnya adalah membantu memperlancar perundingan-perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan Pemerintah Republik; mengamati-amati pemilihan dan berhak memajukan usul-usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian.

4. BFO Berubah Sikap dari Mendukung Menjadi Menentang Belanda

Latar belakang terbentuknya BFO adalah : pada tanggal 29 Mei 1948 diselenggarakan Konferensi Federal di Bandung yang dihadiri oleh semua wakil-wakil dari negara-negara di luar RI yang merupakan ciptaan Belanda. Konferensi tersebut dipimpin oleh Adil Puradireja yang merupakan Perdana Menteri Negara Pasundan. Hasil konferensi tersebut adalah terbentuknya BFO (*Bijeenkomst Federaal Overlag*) atau Badan Permusyawaratan Federal, yaitu lembaga permusyawaratan antara wakil-wakil pemerintah negara-negara bagian dan daerah-daerah di luar kekuasaan Republik Indonesia; sebagai ketua dipilih Sultan Hamid II dari Pontianak.¹⁵²

¹⁵² G. Moedjanto, *op cit.*, hlm. 46.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sikap di kalangan BFO, dari yang semula memihak Belanda menjadi menentang Belanda, setelah Belanda melancarkan serangan militer yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 terhadap RI adalah:¹⁵³

- a. Adanya perlawanan yang gigih dari para gerilyawan RI terhadap Belanda. Para gerilyawan yang secara mati-matian berusaha untuk mengusir penjajah Belanda demi tetap tegaknya Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, memberi kesan kepada anggota-anggota BFO yang semula memperoleh keterangan-keterangan dari pejabat-pejabat NICA, yang menyatakan bahwa perlawanan RI sesudah 19 Desember 1948 telah patah dan RI tinggal nama; merupakan suatu kebohongan besar dan hanya merupakan akal-akalan Belanda. Pandangan baru yang muncul di kalangan BFO tersebut, diperoleh dari tokoh-tokoh Negara Pasundan maupun Jawa Timur yang bersimpati terhadap perjuangan RI; yang pada dasarnya banyak mengetahui tentang apa yang sesungguhnya terjadi, dikarenakan letak Pasundan ataupun Jawa Timur berbatasan dengan RI.
- b. Adanya wartawan-wartawan asing yang berdatangan ke Indonesia ataupun berita-berita luar negeri tentang Indonesia yang sedikit banyak dapat memberi gambaran yang sesungguhnya tentang perkembangan di Indonesia, yang berkebalikan sama sekali dengan berita-berita yang disiarkan oleh Belanda.

¹⁵³ Yahya A. Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 59.

- c. Kesan baik yang diperoleh oleh sejumlah wakil BFO dari para pemimpin RI yang mereka kunjungi di tempat pengasingan mereka di Bangka, di mana pemimpin-pemimpin RI menampakkan wajah yang menandakan keyakinan bahwa perjuangan RI pasti akan menang.
- d. Tokoh-tokoh BFO mendengar tentang adanya Serangan Umum 1 Maret 1949, di mana kira-kira 2.000 gerilyawan di bawah pimpinan Letkol Suharto berhasil menguasai kota Yogyakarta selama enam jam, dan baru bisa diusir ke luar kota Yogyakarta setelah Belanda mendatangkan bantuan besar dari Magelang dan Gombong. Keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949, menyadarkan kalangan BFO bahwa RI tetap *exists* dan TNI tidak hancur seperti yang disiarkan oleh Belanda.

Pada dasarnya apa yang didengar oleh tokoh-tokoh BFO tentang kegiatan gerilyawan RI, meyakinkan mereka bahwa suatu federasi tanpa RI merupakan hal yang tidak mungkin. Sementara itu hal yang menambah ketidaksenangan kalangan BFO terhadap Belanda, adalah adanya berita tentang kekejaman tentara Belanda makin banyak didengar. Begitu pula mengenai penahanan tanpa alasan yang sering dilakukan tentara Belanda terhadap orang-orang yang membangkang perintah dari Pemerintah Belanda.

Keyakinan BFO akan kebohongan Belanda semakin besar ketika mereka membaca selebaran dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX tertanggal 21 Januari 1949; yang isinya sangat bertentangan dengan berita-

berita palsu yang sering digembar-gemborkan oleh Belanda bahwa Sultan merupakan antek Belanda. Dalam selebaran tersebut dinyatakan bahwa Sultan dengan tegas membantah bahwa dirinya pro Belanda. Bahkan, Sultan bertekad menghadapi Belanda dengan resiko apapun dan mengatakan bahwa tekadnya tersebut timbul karena tindakan-tindakan Belanda yang keterlaluhan dan sudah tidak bisa ditolelir lagi.

Bukti bahwa BFO sepenuhnya mendukung perjuangan RI demi segera tercapainya suatu Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah: setelah tercapai kata sepakat tentang tanggal dan syarat-syarat KMB (Konferensi Meja Bundar) melalui perundingan antara wakil Pemerintah Belanda, Pemerintah Republik Indonesia, dan Pertemuan Musyawarah Federal di bawah pengawasan Komisi PBB untuk Indonesia pada tanggal 22 Juni 1949; usul dari Perdana Menteri Pemerintah Indonesia Timur, Ide Anak Agung Gde Agung untuk mengadakan Konferensi Inter Indonesia sepenuhnya didukung oleh BFO. Tujuan konferensi ini adalah untuk mengadakan “dialog Indonesia” antara para pemimpin Republik dan kepala pemerintah daerah-daerah federal agar tercapai kata sepakat tentang persoalan-persoalan mendasar yang akan dibicarakan dalam KMB.¹⁵⁴ Dengan cara ini maka pasal-pasal sengketa yang ada dapat dibicarakan terlebih dahulu antara Republik dengan negara-negara federal, untuk selanjutnya dicarikan penyelesaian yang dapat membawa kata sepakat.

¹⁵⁴ Ide Anak Agung Gde Agung, 1983, *Renville*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 282.

BAB V

MENUJU PENGAKUAN KEDAULATAN

A. Konferensi Inter Indonesia (KII)

Dengan kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta tidak berarti perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sudah selesai karena RI masih harus menyelesaikan serangkaian perjuangan di meja perundingan. Pemerintah RI merasa perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi Belanda di meja perundingan dengan cara menyatukan pandangan antara RI dengan BFO. Dalam hal ini Pemerintah RI, khususnya Presiden Sukarno mengambil kebijakan politik dengan menampilkan politik baru yang dikenal dengan nama *Trace Baru*.¹⁵⁵ Inti dari *Trace Baru* adalah melakukan pendekatan serta koordinasi dengan pihak BFO untuk selanjutnya menciptakan suatu front yang kuat untuk menghadapi Belanda dalam upaya pembentukan Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat menuju ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵⁶

Realisasi dari politik *Trace Baru* adalah diadakannya pertemuan antara wakil-wakil Republik dengan wakil-wakil dari Badan Permusyawaratan Federal (BFO), yang dikenal dengan nama Konferensi Inter Indonesia. Konferensi Inter Indonesia dilaksanakan pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta dan dilanjutkan pada tanggal 31 Juli-2 Agustus 1949 di Jakarta. Konferensi ini bertujuan untuk membahas masalah pembentukan Republik

¹⁵⁵ A.H.Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 11 Konferensi Meja Bundar*, Angkasa, Bandung, hlm. 316.

¹⁵⁶ T.B. Simatupang, *op cit.*, hlm. 199.

Indonesia Serikat, tata susunan RIS, hak pemerintah RIS, dan hak-hak negara negara federal.¹⁵⁷ Konferensi Inter Indonesia memutuskan beberapa hal yang penting yaitu :¹⁵⁸

1. BFO mengakui bahwa Negara Indonesia Serikat akan menerima kedaulatan dari Belanda dan RI.
2. Wakil-wakil RI dan BFO akan membentuk komite persiapan pusat yang mengkoordinasi seluruh persiapan dan kegiatan selama dan setelah KMB.
3. Pertahanan adalah semata-mata hak dari Pemerintah RIS sehingga negara-negara bagian tidak akan memiliki tentara yang terpisah atau mempunyai angkatan perang sendiri.
4. BFO menyokong RI yang menuntut penyerahan kedaulatan menjadi nyata dan tidak bersyarat.
5. RI menyetujui bahwa konstitusi NIS akan disusun dalam KMB di Den Haag.

Bersamaan dengan berlangsungnya Konferensi Inter Indonesia II; pada tanggal 1 Agustus 1949, di Jakarta diadakan perundingan resmi antara wakil-wakil RI, BFO, dan Belanda di bawah pengawasan UNCI, yang menghasilkan persetujuan gencatan senjata (*cease fire*). Panglima Tertinggi kedua belah pihak mengumumkan perintah penghentian tembak menembak pada tanggal 3

¹⁵⁷ Ide Anak Agung Gde Agung, 1994, *Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949*, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, hlm.97.

¹⁵⁸ Ide Anak Agung Gde Agung, 1983, *Renville*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 100.



Agustus 1949.¹⁵⁹ Penghentian tembak menembak mulai berlaku di Jawa pada tanggal 11 Agustus 1949 dan di Sumatera pada tanggal 15 Agustus 1949.¹⁶⁰

Presiden selaku Panglima Tertinggi APRI melalui RRI Yogyakarta mengumumkan perintah penghentian tembak menembak di seluruh Indonesia. Perintah tersebut kemudian diumumkan pula oleh Panglima Besar TNI Letnan Jenderal Sudirman. Pada hari yang sama Dr.L.J.H. Lovink selaku Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Perang Belanda di Indonesia (terhitung mulai tanggal 19 Mei 1949), juga memerintahkan kepada serdadu-serdadunya untuk meletakkan senjata. Dalam hal ini Belanda memperlihatkan perubahan sikap yang begitu besar karena :¹⁶¹

1. Belanda sadar bahwa kekuatan militernya tidak cukup kuat untuk memaksa RI tunduk kepadanya.
2. Perang yang berkepanjangan akan berakibat hancurnya perkebunan dan pabrik-pabrik Belanda. Untuk menghindari hal itu Belanda harus mengubah strategi.
3. Tekanan Amerika Serikat supaya Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia tanpa syarat agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis. Untuk pertama kalinya RI mendapat pembelaan yang begitu besar dari Amerika Serikat, namun sayang sudah terlambat.

Konferensi Inter Indonesia merupakan suatu peristiwa bersejarah bagi rakyat Indonesia dalam menggalang persatuan yang menjadi syarat mutlak bagi pembentukan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang kelak

¹⁵⁹ A.H.Nasution, *op.cit.*, hlm. 342.

¹⁶⁰ George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm. 547.

¹⁶¹ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 56.

dapat ditinggalkan kepada anak cucu sebagai warisan. KII mempunyai arti penting bagi perjuangan bangsa Indonesia karena memuat kesatuan tekad yang bulat untuk menghadapi Belanda dalam mendapatkan pengakuan kedaulatan. Hasil dari Konferensi Inter Indonesia secara politis psikologis memperlihatkan keeratan persaudaraan antar rakyat Indonesia yang selama ini terpecah belah sekaligus suatu permakluman cita-cita menuju kesatuan nasional dan keselarasan. Suksesnya KII ini dapat membantah pemikiran Belanda bahwa menganga jurang yang tak terjembatani antara Republik dengan daerah-daerah federal yang menyebabkan pertentangan antara apa yang disebut orang-orang *Republikken* dengan orang-orang *federalis* terus berlangsung; sehingga pemisahan yang semu antara Republik dengan daerah-daerah federal dengan ini terhapus.

Persetujuan antara pihak Republik Indonesia dengan Badan Permusyawaratan Federal (BFO) dalam KII telah menunjukkan tercapainya tujuan dari *trace baru*, yaitu mengadakan front bersama antara RI dengan BFO dalam upaya menghadapi Belanda. Dengan tercapainya perkembangan tersebut dapatlah ditentukan permulaan untuk mengadakan KMB yang akan dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949.

B. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Inter Indonesia berhasil menyatukan dan menyelaraskan pandangan antara pihak Republik Indonesia dengan BFO, sehingga bangsa Indonesia secara keseluruhan siap menghadapi Konferensi Meja Bundar.

Berdasarkan kesepakatan yang sudah ada sebelumnya, tujuan KMB adalah secepat mungkin mencapai suatu penyelesaian masalah yang adil dalam pertikaian antara RI-Belanda, dengan tercapainya persetujuan antara para peserta dalam KMB tentang cara penyerahan kedaulatan yang sungguh, penuh, dan tidak bersyarat dari Negeri Belanda kepada Negara Indonesia Serikat sesuai dengan pokok-pokok Persetujuan Renville.¹⁶² Dalam hal ini para anggota harus berupaya supaya persetujuan yang telah disepakati di sini dalam dua bulan dapat diratifikasi oleh masing-masing pihak dan dalam waktu enam minggu berikutnya supaya penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat dapat dilakukan sebelum bulan Januari 1950.

Pada tanggal 4 Agustus 1949, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan anggota delegasi yang akan mewakili Republik ke KMB. Delegasi RI dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta; dengan anggota Mr. Moh Rum, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Alisastroamidjojo, Ir. Juanda, Dr. Soemitro, Mr. Abdul Kadir Pringgodigdo, Kolonel. T.B. Simatupang, dan Mr. Soemardi. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, dengan anggota Ide Anak Agung Gde Agung, Kosasih, Mahmud, dan Luce Sujono. UNCI yang berperan sebagai mediator terdiri dari R. Herremans (ketua Komisi PBB untuk Indonesia), Merle Cochran (Ketua Mingguan), TH. K. Critchley (Anggota), dan J.A. Romanos (Anggota). Delegasi Belanda diketuai oleh Mr. Maarseveen.¹⁶³

¹⁶² Ide Anak Agung Gde Agung, 1994, *Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949*, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, hlm. 91.

¹⁶³ Sekretaris Negara, *op cit.*, hlm. 236.

Konferensi Meja Bundar berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949 diketuai oleh Perdana Menteri Belanda Dr.W. Drees. Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI) turut serta dalam konferensi ini sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah ditentukan untuknya oleh DK-PBB.¹⁶⁴ Kalau selama ini pada hakekatnya Belanda menolak campur tangan Komisi Jasa-Jasa Baik; kecuali pada Persetujuan Renville, sekarang dengan senang hati menerima campur tangan Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI), yang dalam masalah pembagian hutang dan masalah Irian Barat (New Guinea) telah membantu Belanda.

KMB yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949 menghasilkan naskah yang lengkap mengenai hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan yang berlangsung hampir dua setengah bulan tersebut berjalan tersendat-sendat, dalam artian terjadi tawar menawar yang alot. Masalah yang menjadi perhatian serius kedua delegasi adalah masalah Uni Indonesia-Belanda, masalah hutang, dan masalah status Irian Barat. Mengenai masalah Uni, pihak Indonesia menghendaki Uni yang sifatnya kerjasama bebas dan merupakan persekutuan dua negara yang sederajat; sedangkan Delegasi Belanda menghendaki RI terikat pada Uni dengan maksud supaya Belanda tetap mempunyai "hak" untuk mengikat Indonesia.¹⁶⁵ Akhirnya Cochran wakil dari UNCI merumuskan pendapat yang disetujui pihak Indonesia maupun Belanda yaitu *The Head of Union Symbolizes and Personifies the Voluntary and Lasting Cooperation Between*

¹⁶⁴ Badan Musyawarah Musea, *op.cit.*, hlm. 256.

¹⁶⁵ Ide Anak Agung Gde Agung, 1983, *Renville*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 229-300.

the Union Partner. Dengan demikian pihak RI dengan BFO merasa puas dengan kata-kata *symbolizes and personifies*, sedangkan Belanda menerima kata-kata *voluntary and lasting cooperation*.

Realisasi dari adanya Uni Indonesia-Belanda adalah pembentukan Sekretariat Bersama yang terdiri dari sekelompok Menteri dari kedua belah pihak yang harus mengadakan sidang minimal dua kali dalam setahun, dan adanya Mahkamah Arbitrase Uni. Sidang-sidang yang dilakukan oleh Sekretariat Bersama dimaksudkan untuk memecahkan persolan-persoalan di antara kedua belah pihak yang bertikai yang belum terselesaikan dalam KMB dan merupakan saluran untuk memecahkan persoalan-persoalan bersama. Keputusan sidang dianggap sah apabila diterima secara bulat dan disahkan oleh parlemen kedua belah pihak. Mahkamah Arbitrase Uni bertugas memecahkan persoalan hukum yang menyangkut kedua negara; anggotanya terdiri dari 6 orang yaitu 3 orang dari masing-masing negara, mereka diangkat untuk masa 10 tahun. Kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Arbitrase Uni dan keputusan diambil dengan dasar mayoritas. Jika pemungutan menghasilkan suara yang seimbang, kedua belah pihak setuju untuk menambah anggota yang diambil dari Mahkamah Internasional atau lembaga lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁶⁶

KMB juga mengatur tentang kerjasama militer. Dalam bidang militer, Persetujuan KMB memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan

¹⁶⁶ George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm. 550-551.

APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) dengan TNI sebagai intinya, pembubaran KNIL (*Koninklijk Nederlands Indische Leger* atau Angkatan Darat Kerajaan Belanda di Indonesia), pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam APRIS, adanya suatu misi militer Belanda di Indonesia untuk membantu melatih APRIS, dan pemulangan atau penarikan mundur pasukan Belanda ke luar Indonesia secepatnya.¹⁶⁷

KMB juga memperhatikan hak milik orang asing di Indonesia. Menurut salah satu isi naskah KMB, RIS harus memulihkan hak-hak yang diberikan kepada orang asing oleh Undang-Undang Hindia Belanda.¹⁶⁸ Hak-hak itu bisa diperluas atau diperpanjang asal saja tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ekonomi RIS. Pengambilalihan dan nasionalisasi hanya boleh dilakukan atas dasar UU dan dengan ganti rugi.

Mengenai masalah ekonomi, Belanda diperlakukan sebagai bangsa yang istimewa (*the most favoured nation*).¹⁶⁹ Dalam hal ini pihak Belanda memperoleh kebebasan yang sangat luas dalam hal penyelenggaraan usaha ekonomi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan bersama dipimpin oleh orang Belanda, tetapi mereka wajib melatih orang-orang Indonesia untuk dipersiapkan mengambil alih pimpinan nantinya.

Masalah yang paling sulit dirasakan oleh RIS adalah masalah mengenai hutang piutang yang diatur dalam naskah tersendiri dan masalah Irian Barat yang tercantum dalam piagam penyerahan kedaulatan. Mengenai masalah perhitungan hutang piutang, Indonesia bersedia menanggung hutang Hindia

¹⁶⁷ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 58.

¹⁶⁸ George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm. 553.

¹⁶⁹ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 58.

Belanda sampai bulan Maret tahun 1942; sementara Belanda menuntut supaya Indonesia menanggung hutang Hindia Belanda sampai tahun 1949.¹⁷⁰ Dalam hal ini pihak Indonesia menolak karena jika Indonesia menerima tuntutan Belanda tersebut, berarti Indonesia harus membiayai pengeluaran Belanda dalam penyerangannya terhadap Indonesia.

Mengenai masalah hutang piutang, kedua belah pihak menemui jalan buntu sehingga UNCI diminta turun tangan; dalam hal ini Cochran selaku wakil dari UNCI mengambil keputusan yang pada dasarnya merugikan RIS. RIS terpaksa menerima keputusan tersebut karena Cochran memberi janji bahwa Amerika Serikat akan membantu pembangunan ekonomi Indonesia apabila RIS mau menerima usulnya; apabila tidak, Amerika Serikat tidak mau membantu. Akhirnya di bawah tekanan Amerika Serikat dicapai persetujuan hutang piutang. Meskipun terdapat pengurangan dari jumlah yang dituntut Belanda, tetapi jumlah hutang yang harus ditanggung oleh RIS sungguh tidak kepalang tanggung, yaitu hampir \$ 1.130.000.000.¹⁷¹

Di samping masalah Uni dan hutang, masalah Irian Barat juga merupakan pembicaraan tersendiri yang berat. Mengenai masalah Irian Barat, masing-masing pihak mempunyai pendapat dan keyakinan sendiri-sendiri. Dalam hal ini Belanda berpegang pada pendirian bahwa Irian Barat secara Etnologis (ilmu tentang suku-suku) tidak termasuk dalam lingkungan Indonesia.¹⁷² Dan dengan melihat kenyataan bahwa penduduk Irian Barat masih terbelakang, maka diperlukan bimbingan dan pendidikan untuk

¹⁷⁰ C. Smit, *op.cit.*, hlm. 43.

¹⁷¹ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 59.

¹⁷² George Mc Turnan Kahin, *op.cit.*, hlm. 563.

mengembangkan martabat mereka, dalam hal ini disangsikan apakah RIS yang baru mencapai kemerdekaan mampu menjalankan tugas kepemimpinan tersebut. Disangsikan pula apakah RIS mampu “mengelola” Irian Barat jika perekonomian Indonesia masih belum mapan.

UNCI selaku mediator berusaha untuk mengambil prakarsa agar perundingan tidak mengalami jalan buntu. Dalam hal ini Cochran mengemukakan formulasi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yaitu *status quo* di Karesidenan Irian Barat tetap berlaku, seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS, masalah kedudukan Irian Barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Pemerintah RIS dengan Kerajaan Belanda.¹⁷³ Pendirian Belanda yang kuat tentang masalah Irian Barat rupanya dilatarbelakangi oleh adanya dukungan dari Australia.

Kedudukan Irian Barat memang penting bila ditinjau dari sudut geopolitik, karena Irian Barat mempunyai wilayah yang strategis. Hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah Mac Arthur yang menggunakan Irian Barat sebagai batu loncatan dalam masa perang dunia kedua. Dalam hal ini Australia berada di belakang pendirian Belanda karena letak Australia secara geografis berdekatan dengan Irian Barat. Belanda sendiri mempunyai alasan sosial psikologis untuk tetap mempertahankan Irian Barat karena dengan tetap berkuasa di sebagian wilayah Indonesia, Belanda dapat menjaga pretisennya sebagai negara besar; Belanda dapat mengenang masa kejayaannya sebagai

¹⁷³ T.B. Simatupang, *op.cit.*, hlm. 226.

bangsa yang mempunyai wilayah di seberang lautan dan merupakan simbol bahwa Belanda masih merupakan kekuatan Asia. Belanda melihat dampak positif dari pemisahan Irian Barat dari wilayah RIS yaitu supaya Belanda masih memegang *troef* di tangan yang akan dimainkan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di masa yang akan datang. Bagi sebagian orang Belanda, peralihan dari Aksi Militer Belanda II 19 Desember 1948 ke KMB tidak bisa dimengerti dan tidak dapat dicerna; dan bagi mereka Irian Barat merupakan lambang sisa perlawanan terhadap RI.

Sikap ketua Delegasi Indonesia yang menerima usul kompromi mengenai masalah Irian Barat tersebut menimbulkan beda pendapat di kalangan Delegasi Indonesia. Hal ini tercermin dalam suasana sidang penutupan KMB; pekik merdeka dari Indonesia berganti dengan pekik Irian; yang menandakan bahwa mereka sama sekali tidak menyetujui apabila Irian Barat dipisahkan dari penyerahan kedaulatan karena orang-orang Indonesia melihat maksud Belanda atas upaya pemisahan Irian Barat dari wilayah RIS, tidak lain dari pada suatu unsur campur tangan terus menerus dalam urusan dalam negeri Indonesia sebagai suatu ikhtiar untuk tetap memerankan negara kolonial di sebagian wilayah Indonesia. Namun begitu, Hatta bersikeras untuk tetap menerima usul kompromi dari Cochran selaku wakil dari UNCI. Ia menyadari bahwa usul tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk menghindari kebuntuan perundingan. Penerimaan kompromi tersebut merupakan realisasi bahwa Indonesia mempunyai *Good Will* untuk menyelesaikan masalah secara damai. Konferensi yang berakhir pada tanggal

2 November 1949 menghasilkan kesepakatan dan mendapat persetujuan dari KNIP dengan perbandingan suara 226 setuju, 62 suara menentang, dan 31 suara blanko.¹⁷⁴

Hasil nyata dari Konferensi Meja Bundar yang sangat esensial bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah dengan diterimanya piagam “Penyerahan” kedaulatan dari pihak Belanda kepada RIS. Piagam tersebut memuat ketentuan tentang kedaulatan yang sungguh-sungguh, penuh, dan tidak bersyarat yang akan diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia sesuai dengan pokok-pokok Persetujuan Renville; walaupun menurut Hatta selaku Ketua Delegasi RI pada pidato pembukaan KMB mengatakan bahwa sebenarnya penyerahan kedaulatan itu tidak boleh dikatakan dengan tiada bersyarat sama sekali. Hal ini dikarenakan Pemerintah Belanda minta jaminan bahwa kedaulatan harus diserahkan pada suatu Pemerintah Federal Indonesia dan bahwa antara RIS dengan Kerajaan Belanda akan dibentuk suatu Uni menurut dasar-dasar Renville.¹⁷⁵ Pembentukan Panitia Persiapan Nasional merupakan upaya untuk mempersiapkan adanya penyerahan kedaulatan. Persiapan yang dilakukan oleh PPN meliputi pengesahaan UUD RIS, pemilihan Presiden RIS, menerima pengoperan departemen-departemen dari pihak pemerintah buatan Belanda (BFO), serta menjadi penghubung dengan UNCI.

Ir. Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS pada tanggal 17 Desember 1949 bertempat di Bangsal Sitinggil, Keraton Yogyakarta, oleh Ketua

¹⁷⁴ Ide Anak Agung Gde Agung, 1985, *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 670.

¹⁷⁵ Notosoetardjo, *op.cit.*, hlm. 57.

Mahkamah Agung Mr. Kusumah Atmadja. Pemilihan Sukarno sebagai Presiden RIS rupanya dilatarbelakangi oleh kharisma serta ketenarannya baik di kalangan Republik maupun BFO.¹⁷⁶ Wakil Presiden RI Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS; pelantikan dilakukan pada tanggal 20 Desember 1949. Dengan diangkatnya Ir. Sukarno sebagai Presiden RIS; Mr. Assaat yang pada waktu itu memegang jabatan sebagai ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) ditunjuk sebagai pemangku jabatan Presiden RI. Pelantikan dan serah terima jabatan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 di Yogyakarta.¹⁷⁷

Hasil nyata perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sampai akhir tahun 1949 adalah “penyerahan “kedaulatan dari pihak Belanda kepada Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 pukul 10.00 pagi waktu setempat, di negeri Belanda, di ruang Tahta Istana Kerajaan Belanda (Den Haag) Ratu Juliana, PM Dr. Willem Drees, Menteri Urusan Tanah Seberang Mr.A.M.J.A. Sassen, dan Ketua Delegasi RIS Drs. Moh. Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Untuk selanjutnya Ratu Juliana menyerahkan kadaulatan Indonesia kepada Drs. Moh. Hatta selaku Wakil Pemerintah RIS, yang menandakan berdirinya Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat merupakan suatu fakta.¹⁷⁸

Pada tanggal yang sama, di Jakarta, Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda di Indonesia Dr. L.J.H. Lovink menyerahkan kekuasaan Pemerintah

¹⁷⁶ Badan Musyawarah Musea, *op.cit.*, hlm. 170.

¹⁷⁷ Sekretaris Negara, *op cit.*, hlm. 247.

¹⁷⁸ Ide Anak agung Gde Agung, 1983, *Renville*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 327.

Hindia Belanda kepada Delegasi Pemerintah RIS di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX bertempat di Istana Koningsplein (sekarang Istana Gambir).¹⁷⁹ Pada saat itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX tidak hanya bertindak sebagai Ketua Delegasi Indonesia; karena pada saat itu di Indonesia yang merdeka dan berdaulat berhentilah semua perjanjian yang mengekang dan menindas raja-raja dan sultan-sultan dan apapun gelar mereka yang pernah mereka tandatangani. Dalam hal ini tidak ada seorang pun yang tepat untuk menghapuskan keadaan perbudakkan tersebut kecuali Sri Sultan Hamengku Buwono IX dari Ngayogyakarta Hadiningrat.¹⁸⁰

Dalam Pasal 1 No. 1 dari “Piagam Penyerahan Kedaulatan” dikemukakan bahwa:

*Kerajaan Belanda dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dibatalkan lagi menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.*¹⁸¹

Dua kata penyerahan dan pengakuan kedaulatan yang terdapat dalam pasal tersebut, mengandung maksud menyerahkan dan mengakui. Jika yang dimaksud adalah menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada bentuk ketatanegaraan Republik Indonesia Serikat, hal ini dapat diterima karena pada dasarnya kompromi yang dirundingkan dalam KMB adalah untuk

¹⁷⁹ Ide Anak Agung Gde Agung, 1985, *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 671.

¹⁸⁰ Mohamad Roem, dkk, *op.cit.*, hlm. 142.

¹⁸¹ Notosoetardjo, *op.cit.*, hlm. 69.

kemerdekaan Republik Indonesia Serikat seperti yang telah dibayangkan dalam Perjanjian Linggarjati. Jadi dalam hal ini Belanda hanya berperan sebagai pengubah bentuk ketatanegaraan dari Republik Kesatuan ke Republik Serikat, dan kedaulatan atas Indonesia sudah menjadi milik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Kalangan *Republikken* menganggap dan menerima kehadiran RIS sebagai batu loncatan ke arah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945; hal ini membuktikan bahwa Republik Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat besar di kalangan BFO sehingga sistem federal tidak dapat bertahan lama. Kendati KMB menetapkan adanya 15 negara bagian ditambah dengan Republik Indonesia, negara-negara bagian tersebut kebanyakan lemah dan tidak mendapat dukungan dari rakyat. Hal ini dikarenakan pemuka dan pemegang pemerintahan pada setiap negara bagian merupakan golongan minoritas yang pada waktu lalu kehidupannya disokong oleh Belanda, sehingga menguatkan isu bahwa negara-negara bagian merupakan kaki tangan Belanda; sedangkan masyarakat Indonesia sendiri pada umumnya memandang Belanda sebagai kaum kolonis yang harus ditentang.

Dengan teratasinya masalah-masalah tersebut, maka KMB dapat segera diakhiri dan berhasil mencapai persetujuan lengkap yang mengatur hubungan antara Indonesia (RI dan BFO) dengan Belanda. Ketentuan yang paling penting dari Persetujuan KMB adalah Piagam Penyerahan Kedaulatan. Dalam hal ini pengertian “penyerahan” kedaulatan dari pihak Belanda kepada RIS,

menurut pandangan kita tidak mengurangi anggapan bahwa RI sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah memiliki kedaulatan terhadap seluruh bekas Hindia Belanda.¹⁸² Dengan kata lain bangsa Indonesia sejak semula telah beranggapan bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945, RI sebagai organisasi politik bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan atas seluruh Indonesia. Oleh karena RI, kedaulatan itu diserahkan kepada RIS. Dengan demikian, pada hakekatnya apa yang dilakukan oleh Belanda adalah mengakui kedaulatan bangsa Indonesia atas wilayah nasional yang sudah ada di pihak Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh RIS. RIS adalah penerus RI sebagai pemegang kedaulatan atas seluruh Indonesia.

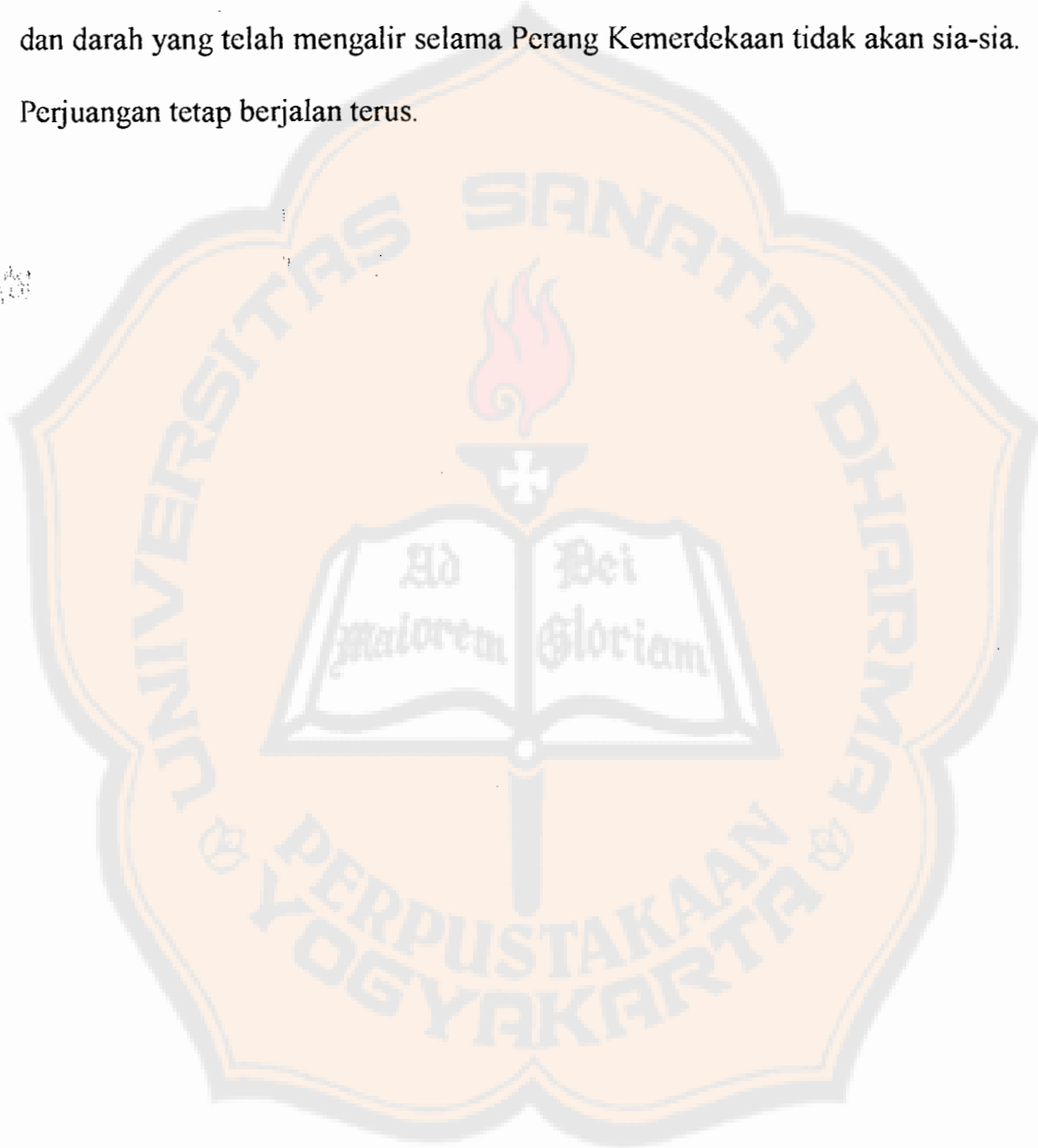
Dengan adanya penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 menandakan bahwa RIS secara resmi sudah menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat yang mendapat pengakuan baik secara *de facto* maupun *de jure* dari dunia Internasional. Dengan ini mulailah negara-negara di dunia mengadakan pertukaran duta besar dengan RIS. Pada tahun 1950 setelah RIS kembali ke NKRI, Indonesia diterima menjadi anggota PBB yang ke-60.¹⁸³ Adapun wilayah RIS pada tanggal 27 Desember 1949 dapat dilihat pada lampiran 7, hlm.163.

Pada dasarnya hasil-hasil KMB merupakan akibat dari adanya Persetujuan Rum-Roijen, akibat dari adanya *Trace Baru*. Dalam hal ini

¹⁸² Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 172.

¹⁸³ G. Moedjanto, *op cit.*, hlm. 59.

bangsa Indonesia memikul akibat ini bersama-sama. Hasil KMB dipergunakan sebagai anak tangga untuk bersama-sama melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia ke arah Indonesia yang kuat, adil, dan makmur; sehingga air mata dan darah yang telah mengalir selama Perang Kemerdekaan tidak akan sia-sia. Perjuangan tetap berjalan terus.



BAB VI

KESIMPULAN

Proklamasi Kemerdekaan RI yang diproklamirkan oleh Sukarno Hatta atas nama bangsa Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta merupakan suatu proses perjalanan sejarah perjuangan yang panjang; merupakan titik kulminasi dari cita-cita kemerdekaan Indonesia yang mencapai titik tertingginya. Akan tetapi, pernyataan kemerdekaan yang menandakan bahwa bangsa Indonesia telah berdaulat atas negerinya dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa merdeka di dunia, sama sekali tidak mendapat pengakuan dari Belanda. Dalam hal ini Belanda menganggap bahwa RI merupakan negara buatan Jepang dan orang-orangnya merupakan boneka-boneka Jepang; RI didirikan oleh kolaborator-kolaborator berdasarkan rencana dan petunjuk orang-orang Jepang. Hal ini menyebabkan Belanda masih merasa berkuasa atas Indonesia yang mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah, dan Belanda dengan segala daya upaya berusaha menjajah Indonesia kembali.

Pada waktu diselenggarakan Pemilihan Umum di Negeri Belanda pada tanggal 7 Juli 1948 dengan hasil kemenangan bagi Partai Katolik (*Katolieke Volks Partij/KVP*) dan terbentuk kabinet Van Schaick-Dress, telah diduga bahwa politik Belanda terhadap Indonesia akan menjadi sangat reaksioner. Waktu itu telah ada dugaan bahwa Pemerintah Belanda yang baru itu akan menjalankan suatu politik terhadap Indonesia yang mau mencari penyelesaian di Indonesia di

luar RI dan Dewan Keamanan PBB. Dalam hal ini Belanda menghadapi soal baru dengan menggunakan ukuran lama sehingga Belanda mengandalkan tindakan spekulatif dengan melancarkan serangan militer yang kedua terhadap Republik pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda menggunakan kesempatan pada saat RI lemah sebagai akibat meletusnya Pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948.

Untuk mendirikan pemerintah kolonial, Belanda berusaha menghancurkan Republik Indonesia. Sedikit demi sedikit wilayah kedaulatan Republik Indonesia dikuasai oleh Belanda; bahkan pada Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, Belanda berhasil menduduki Ibu Kota RI (Yogyakarta) dan berhasil menahan pemimpin-pemimpin Pemerintah RI. Belanda benar-benar yakin bahwa setelah berhasil menduduki Yogyakarta dan menahan para pemimpin RI, seluruh kekuatan RI akan jatuh berantakan. Keyakinan seperti itu benar-benar sangat mengherankan karena sejak revolusi dikobarkan seluruh kekuatan Republik didasarkan pada kesadaran dan kebulatan tekad rakyat. Maka, walaupun kota-kota diduduki dan semua pemimpin ditangkap, selama rakyat masih ada akan bangkit pemimpin-pemimpin baru yang akan mengobarkan perjuangan melangsungkan perang gerilya tanpa batas dengan taruhan berpuluh-puluh juta nyawa manusia. Hal ini menyebabkan keberhasilan Belanda dalam usahanya menduduki kota Yogyakarta dan menahan sebagian pemimpin RI, tidak diikuti berdirinya Pemerintahan Kolonial Belanda seperti kehendak Belanda; sebab bangsa Indonesia terus mengadakan perlawanan yang gigih untuk memaksa Belanda meninggalkan wilayah Indonesia.

Pihak RI sudah mempersiapkan diri baik dalam bidang militer, politik, sosial, dan ekonomi untuk menghadapi kemungkinan adanya serangan Belanda, sehingga Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 tidak menghancurkan potensi perlawanan bangsa Indonesia. Kesiapan Pemerintah Republik Indonesia ini dijalankan secara intensif sejak awal pemerintahan Kabinet Hatta. Dalam bidang militer, dilaksanakan program Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang RI, juga telah disusun siasat pertahanan Republik Indonesia dalam rangka menghadapi adanya kemungkinan serangan Belanda. Dalam bidang politik, Pemerintah Republik Indonesia telah mempersiapkan pembentukan pemerintahan penerus apabila sewaktu-waktu Pemerintah RI tidak mampu lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai akibat serangan militer dari pihak Belanda. Persiapan Republik Indonesia tersebut terbukti setelah Belanda menyerang Republik Indonesia, yaitu dengan munculnya reaksi-reaksi baik dalam bidang militer maupun politik dari bangsa Indonesia; sehingga *fait accompli* bahwa RI sudah lenyap dari bumi Indonesia, yang diharapkan oleh Belanda pada tahap berikutnya menemui kegagalan. Secara politis, Republik Indonesia tetap berdiri dengan adanya PDRI; TNI tidak hancur karena gerak mundur yang dilakukan merupakan taktik untuk merealisasikan rencana yang telah digariskan sebelumnya, yaitu melakukan perlawanan secara gerilya. Perlawanan APRI semakin kokoh setelah berdirinya pemerintahan militer di Jawa dan Sumatera.

Berdasarkan logika Belanda, serangan militernya yang kedua pasti berhasil menghancurkan RI; dan memang, seketika kesan demikianlah yang muncul karena pihak Belanda dengan cepat berhasil menduduki kota-kota di wilayah RI,

bahkan pada hari pertama Belanda berhasil menangkap Sukarno-Hatta serta pemimpin politik lainnya, kemudian bersiap-siap untuk menyodorkan *fait accompli* terakhir agar direstui dunia Internasional. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, klimaks itu tiba-tiba melahirkan paradoks yang serba kejam bagi Belanda dan bagi mereka yang bekerjasama. Kemenangan taktis Belanda tersebut tidak dapat menutupi fakta bahwa sumber-sumber kekuatan mereka serba tidak mencukupi. Tentara Indonesia melancarkan perang gerilya sesuai dengan rencana operasi yang telah digariskan oleh Pimpinan Angkatan Perang RI dalam Perintah Siasat No.1 Panglima Besar tertanggal 9 November 1948 dan berhasil membuktikan bahwa mereka tidak dapat ditaklukkan. Dalam bidang politik, Pemerintahan RI tidak hancur dan tetap berjalan dengan dibentuknya PDRI di Sumatera. Sementara itu PBB dan dunia Internasional memaksa Belanda untuk mengadakan perubahan sikap yang radikal, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 menjadi bumerang bagi Belanda untuk menguasai Indonesia kembali.

Kemenangan politis yang diraih oleh pihak Republik Indonesia tidak terlepas dari dukungan dunia Internasional, sehingga sebagai pemimpin Republik (yang diakui oleh PBB adalah Sukarno cs) merasa perlu mendengarkan himbauan dari dunia Internasional, dalam hal ini usul UNCI untuk mengadakan perundingan dengan pihak Belanda. Realisasinya adalah diselenggarakannya perundingan antara Rum (wakil dari Pemerintah Indonesia) dengan Van Roijen (wakil dari Pemerintah Belanda), yang menghasilkan sebuah pernyataan yang dikenal dengan nama *Rum-Roijen Statement*.

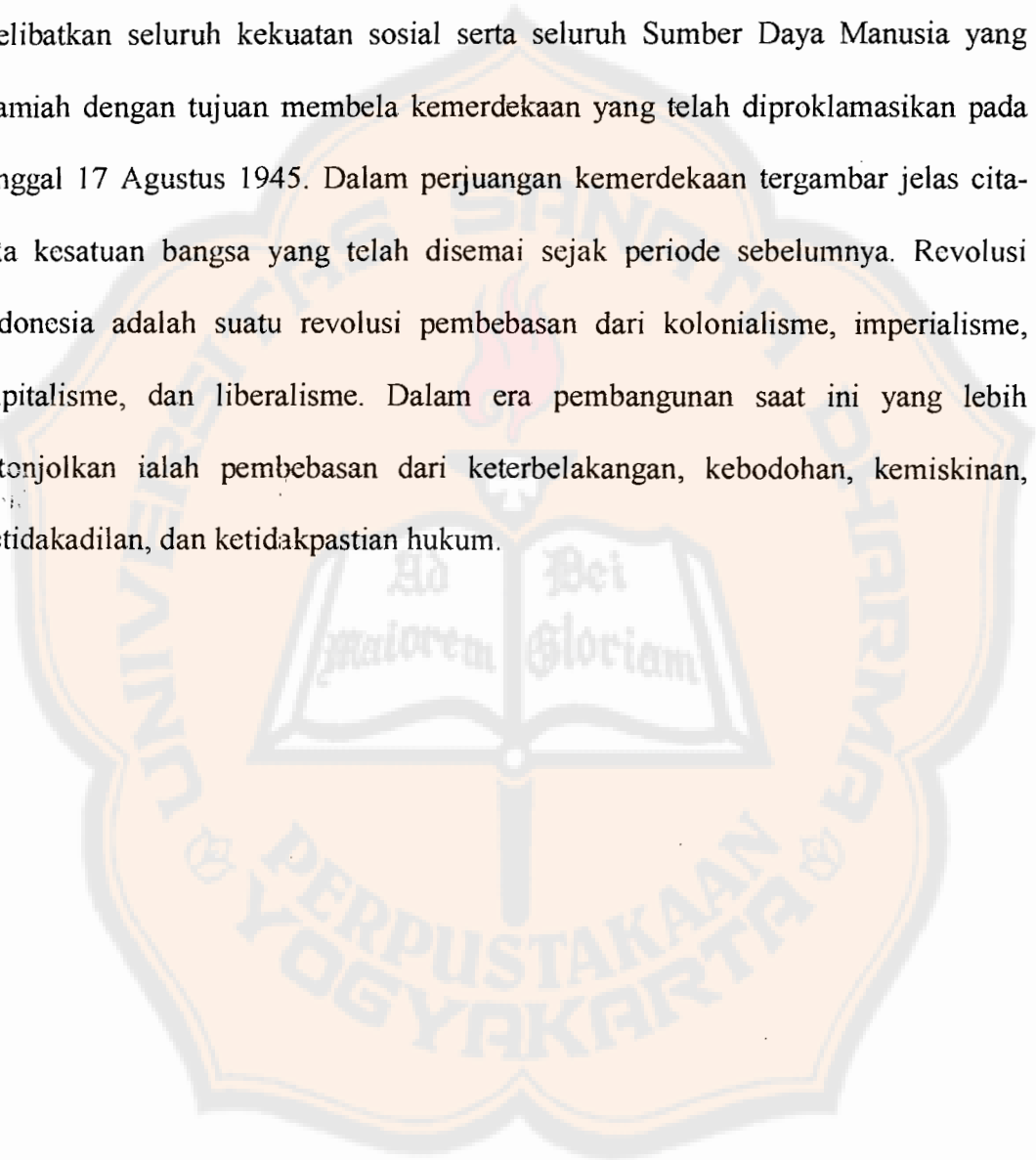
Pernyataan Rum-Roijen tidak saja menimbulkan pertentangan di kalangan Belanda melainkan juga di kalangan Republik. Walaupun demikian harus kita akui bahwa *Rum-Roijen Statement* merupakan satu-satunya jalan yang dianggap terbaik pada saat itu, supaya bangsa Indonesia dapat keluar dari kemelut yang sedang menimpa. Buktinya, dengan *Rum-Roijen Statement* maka Yogyakarta diserahkan kembali kepada Republik Indonesia dan pemimpin-pemimpin Pemerintah RI yang ditawan oleh Belanda dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta. Dengan *Rum-Roijen Statement* pula dicapai kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda untuk mengadakan perundingan mengenai penyerahan kedaulatan. Realisasinya adalah diselenggarakannya KMB di Den Haag pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949.

Sebelum KMB diselenggarakanlah Konferensi Inter Indonesia yang merupakan wujud dari adanya kesatuan langkah sebagai bangsa Indonesia untuk mencapai kemenangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Front yang terbentuk dalam KII akhirnya menjadi jalan pembuka bagi penyelesaian masalah Indonesia-Belanda dalam KMB di Den Haag; walaupun dengan konsesi yang tidak menyenangkan, yaitu penyerahan kedaulatan atas Indonesia kepada Negara Republik Indonesia Serikat.

Hasil utama KMB adalah Belanda penyerahan kedaulatan atas Indonesia oleh Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS pada akhir bulan Desember 1949. Penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Negara Republik Indonesia Serikat dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949. Hal ini menandakan bahwa RIS mendapat pengakuan secara *de facto* dan *de jure* dari

dunia Internasional sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat yang mempunyai kedudukan sejajar dengan negara-negara merdeka di dunia.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan perjuangan total yang melibatkan seluruh kekuatan sosial serta seluruh Sumber Daya Manusia yang alamiah dengan tujuan membela kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjuangan kemerdekaan tergambar jelas cita-cita kesatuan bangsa yang telah disemai sejak periode sebelumnya. Revolusi Indonesia adalah suatu revolusi pembebasan dari kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, dan liberalisme. Dalam era pembangunan saat ini yang lebih ditonjolkan ialah pembebasan dari keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Surjomihardjo dan JR. Chaniago,
1990, *PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Dikaji Ulang*,
Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Jakarta.
- Aboe Bakar Loebis,
1992, *Kilas Balik Revolusi*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Badan Musyawarah Musea,
1985, *Yogyakarta Benteng Proklamasi*, Perwakilan, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional,
2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gottschalk, Louis,
1975, *Mengerti Sejarah*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ide Anak Agung Gde Agung,
1983, *Renville*, Sinar Harapan, Jakarta.
-
- 1985, *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
-
- 1995, *Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949*, Yayasan Pustaka
Nusatama, Yogyakarta.
- Kahin, George Mc Turnan,
1995, *Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Kartini Kartono,
1980, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, ALUMNI, Bandung.
- Mani, P.R.S,
1989, *Jejak Revolusi 1945*, Grafiti, Jakarta.
- Moedjanto, G,
1988, *Indonesia Abad ke-20 jilid 2*, Kanisius, Yogyakarta.

Nasution, A.H,

1968, *Tentara Nasional Indonesia (TNI),* Seruling Masa, Jakarta.

1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 Agresi Militer Belanda I,* Angkasa, Bandung.

1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 Agresi Militer Belanda II,* Angkasa, Bandung.

1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 10 Perang Gerilya Semester II,* Angkasa, Bandung.

1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 11 Konferensi Meja Bundar,* Angkasa, Bandung.

Notosoetardjo,

1956, *Dokumen-dokumen Konperensi Medja Bundar Sebelum, Sesudah, dan Pembubarannya* Endang, Jakarta.

Notosusanto, Nugraha,

1984, *Sejarah Nasional Indonesia VI,* Balai Pustaka, Jakarta.

1985, *Pejuang dan Prajurit,* Sinar Harapan, Jakarta.

Ridhwan, Muhammad dan Sophian Marthabaya,

1987, *Peristiwa-peristiwa Di Sekitar Proklamasi 17-8-1945,* Sinar Grafika, Jakarta.

Roem, Mohamad, dkk,

1982, *Tahta Untuk Rakyat,* Gramedia, Jakarta.

Rosidi, Ayib,

1986, *Syafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT,* Indayu Press, Jakarta.

- Saleh A. Djamhari,
1967, *Markas Besar Komando Djawa (MBKD) 1948-1949*, Lembaga Sejarah Hankam, Jakarta.
- Sardjono, V dan GL. Marsadji,
1982, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia Penyelamat Negara Dan Bangsa Indonesia*, Tintamas, Jakarta.
- Sekretaris Negara,
1981, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Tira Pustaka, Jakarta.
- Seskoed,
1990, *Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta Latar Belakang Dan Pengaruhnya*, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta.
- Siarimbun, Masri dan Sofian Effendi (eds),
1987, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Simatupang, T.B,
1980, *Laporan Dari Banaran*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Smit, C,
1986, *Dekolonisasi Indonesia*, Pustaka Azet, Jakarta.
- Sundhaussen, Ulf,
1986, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, LP3ES, Jakarta.
- Tarjo, N.S.S,
1984, *Dari atas Tandu :Pak Dirman memimpin Perang Rakyat Semesta*, Yayasan Wiratama, Yogyakarta.
- Tataq Chidmad, dkk,
2001, *Pelurusan Sejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Tobing, K.M.L,
1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, Gunung Agung, Jakarta.
-
- 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*, Gunung Agung, Jakarta.

Wild, Colin dan Peter Carey,

1986, *Gelora Api Revolusi*, BBC Seksi Indonesia dan Gramedia, Jakarta.

Yahya A. Muhaimin,

1982, *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-1966*,

Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.



LAMPIRAN : 1

SILABUS
SEKOLAH MENENGAH ATAS



Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas/Semester : 3/I

Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran

1.	Standar Kompetensi	Menjelaskan perjalanan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan sampai dengan jatuhnya Pemerintah Orde Baru.
2.	Kompetensi Dasar	Menguraikan perkembangan ekonomi-keuangan, politik dan konflik Indonesia-Belanda pada awal kemerdekaan.
3.	Indikator	1. Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor pendorong Belanda mengambil tindakan militer yang keduanya terhadap RI. 2. Siswa dapat menjelaskan kesiapan Pemerintah RI dalam usahanya menghadapi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948. 3. Siswa dapat menjelaskan reaksi yang muncul baik dari dalam maupun dari luar RI terhadap Agresi

		Militer Belanda II 19 Desember 1948. 4. Siswa dapat menjelaskan akibat dari adanya reaksi-reaksi tersebut bagi proses menuju pengakuan kedaulatan Indonesia.
4	Pengalaman Belajar	1. Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong Belanda mengambil tindakan militer yang keduanya terhadap RI serta kesiapan Pemerintah RI dalam usahanya menghadapi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948. 2. Mendiskusikan reaksi yang muncul baik dari dalam maupun luar RI terhadap Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 serta akibat dari adanya reaksi-reaksi tersebut bagi proses menuju pengakuan kedaulatan Indonesia. 3. Presentasi hasil diskusi 4. Mengerjakan tugas 5. Menjawab pertanyaan guru
5.	Materi Pembelajaran	Konflik Indonesia-Belanda 1945-1949.
6.	Uraian Materi	I. Faktor pendorong Belanda mengambil tindakan militer yang keduanya terhadap RI A. Faktor Pendorong Belanda mengambil tindakan militer yang keduanya terhadap RI

		1. Kemenangan Partai Katolik (<i>Katolieke Volks Partij</i>) dalam Pemilihan Umum di Negeri Belanda pada tanggal 7 Juli 1948 2. Keadaan Indonesia pasca Perjanjian Linggarjati 3. Keadaan Indonesia Pasca Perjanjian Renville B. Meletusnya Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 II. Kesiapan Pemerintah RI dalam usahanya menghadapi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 A. Persiapan dalam Bidang Militer 1. Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia 2. Siasat pertahanan RI dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 B. Persiapan dalam Bidang Politik 1. Konsolidasi RI terhadap wilayah di luar kekuasaan <i>de facto</i> 2. Konsolidasi RI terhadap wilayah yang diakui secara <i>de facto</i> C. Persiapan dalam Bidang Sosial D. Persiapan dalam Bidang Ekonomi
--	--	---

		III. Reaksi-reaksi yang muncul baik dari dalam maupun dari luar RI terhadap Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 A. Reaksi dari dalam RI 1. Dalam Bidang Politik, dengan pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) 2. Dalam Bidang Militer : a. Pembentukan Pemerintah Militer b. <i>Ofensif</i> Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) B. Reaksi dari luar RI 1. Diadakan Konferensi Asia mengenai Indonesia 2. Diadakan Perundingan Rum-Roijen atas prakarsa UNCI 3. PBB dan dunia Internasional mengecam tindakan Belanda 4. BFO berbalik menentang Belanda IV. Akibat dari adanya reaksi yang muncul terhadap Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 bagi proses menuju kedaulatan Indonesia
--	--	--

		A. Konferensi Inter Indonesia (KII) B. Konferensi Meja Bundar (KMB)
7.	Langkah-langkah Pembelajaran	1. Pendahuluan (Apersepsi) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai tentang “Seputar Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948”. 2. Kegiatan Inti a. Orientasi Siswa membentuk kelompok masing-masing berjumlah 3 orang, kemudian ke perpustakaan untuk mencari sumber yang berkaitan dengan Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948. b. Latihan Siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. c. Umpan balik 1) Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas, kemudian dilakukan tanya jawab. Siswa lain menanggapi. 2) Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa. 3) Tindak Lanjut.

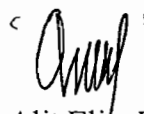
		a) Siswa membuat laporan hasil diskusi kelompok di kertas folio yang telah disediakan guru. b) Guru mengadakan tes tertulis untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi yang telah dipelajari.
8.	Sarana/Media	Peta wilayah pendudukan Belanda dan pusat-pusat konflik Indonesia-Belanda di berbagai daerah secara kronologis.
9.	Jenis Tagihan	Tes
10.	Bentuk Tagihan	Tes tertulis
11.	Contoh Tagihan	1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong Belanda mengambil tindakan militer yang kedua kalinya terhadap RI ? 2. Sejauhmana kesiapan Pemerintah RI dalam usahanya menghadapi Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 ? 3. Apa reaksi yang muncul baik dari dalam maupun dari luar RI terhadap Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 ? 4. Apa akibat dari adanya reaksi-reaksi tersebut bagi proses menuju pengakuan kedaulatan RI ?

12.	Penilaian	1. Evaluasi hasil Dengan melihat hasil tes tertulis 2. Tugas Siswa membuat laporan tertulis hasil diskusi secara berkelompok tentang latar belakang terjadinya Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 dan pengaruhnya bagi proses menuju pengakuan kedaulatan Indonesia 3. Portofolio : siswa membuat resume mengenai latar belakang Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 dan pengaruhnya bagi proses pengakuan kedaulatan Indonesia.
13.	Sumber	Ide Anak Agung Gde Agung, 1983, <i>Renville</i>, Sinar Harapan, Jakarta. _____, 1985, <i>Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat</i>, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. _____, 1995, <i>Pernyataan Rum-Van Roijen 7 Mei 1949</i>, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta. Kahin, George Mc Turnan, 1995, <i>Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia</i>, Sinar Harapan, Jakarta.

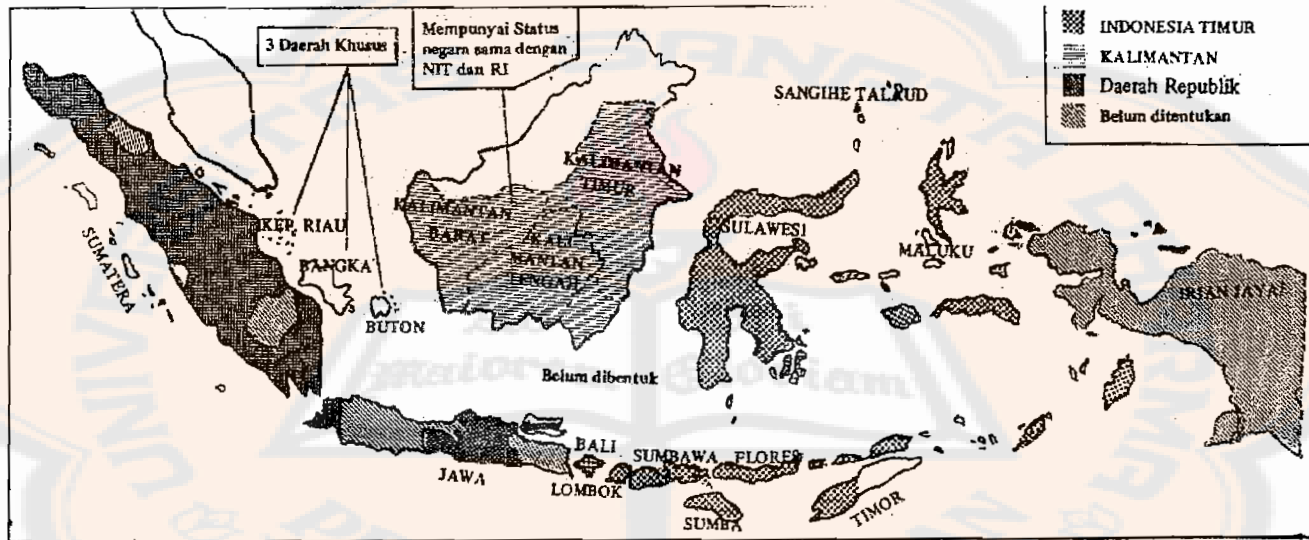
	Nasution, A.H, 1979, <i>Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 Agresi Militer Belanda II</i>, Angkasa, Bandung. Sardjono, V dan GL. Marsadji, 1982, <i>Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Penyelamat Negara Dan Bangsa Indonesia</i>, Tintamas, Jakarta. Seskoed, 1990, <i>Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta Latar Belakang Dan Pengaruhnya</i>, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta. Smit, C, 1986, <i>Dekolonisasi Indonesia</i>, Pustaka Azet, Jakarta. Tarjo, N.S.S, 1984, <i>Dari atas Tandu : Pak Dirman memimpin Perang Rakyat Semesta</i>, Yayasan Wiratama, Yogyakarta. Tobing, K.M.L, 1986, <i>Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville</i>, Gunung Agung, Jakarta.
--	--

Yogyakarta, 6 Desember 2005

Guru Bidang Studi


 Th. Alit Elia. K

LAMPIRAN : 2

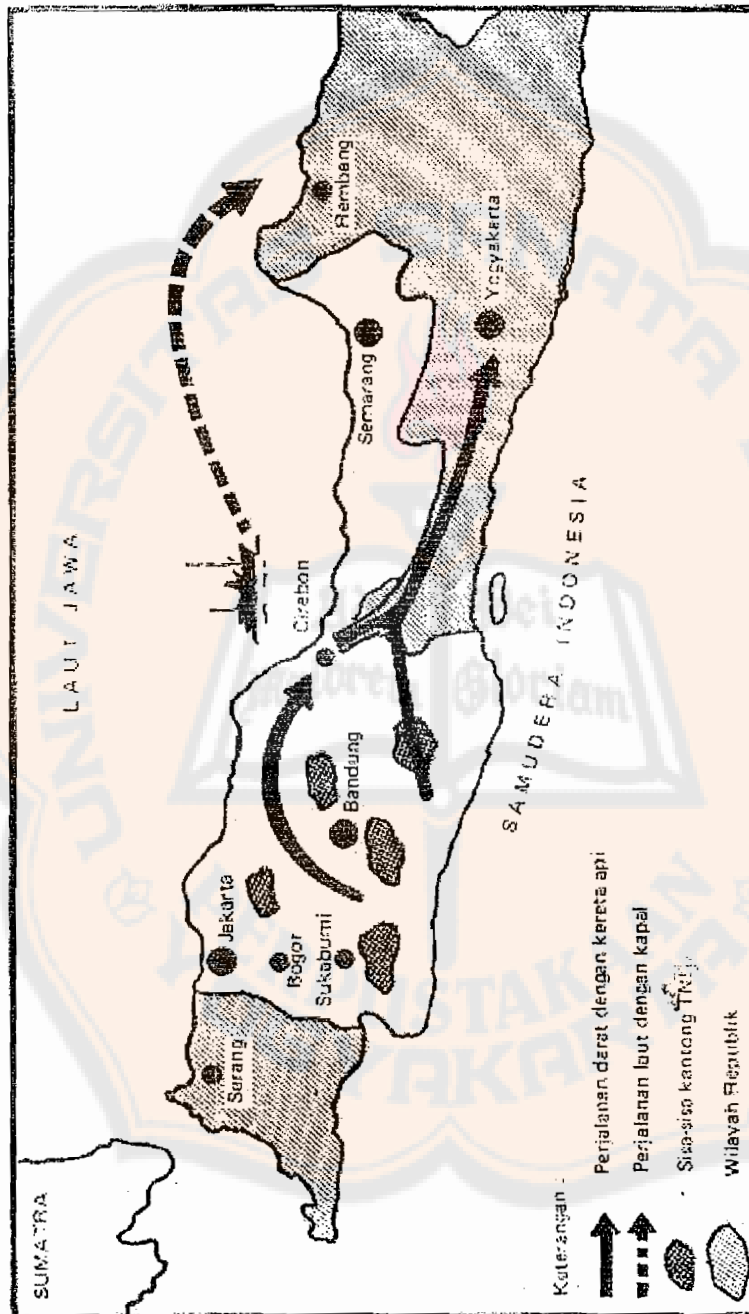


Penetapan "garis van Mook" secara sepihak setelah Belanda meluncurkan Aksi Militer I. Penetapan itu diumumkan pada tanggal 5 September 1947.

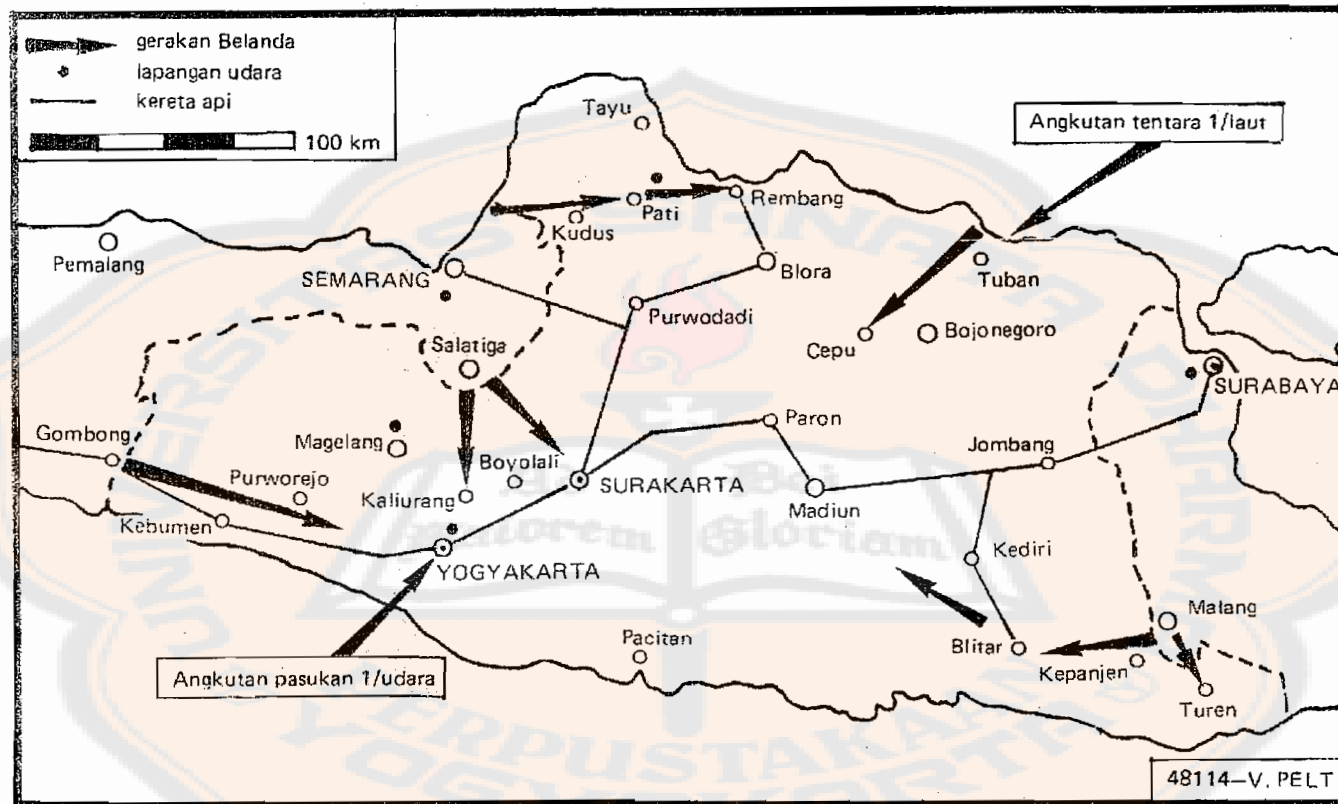
Sumber : K.M.L. Tobing, 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia*
Linggarjati, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 173.

LAMPIRAN : 3

PETA HIJRAH DIVISI SILIWANGI



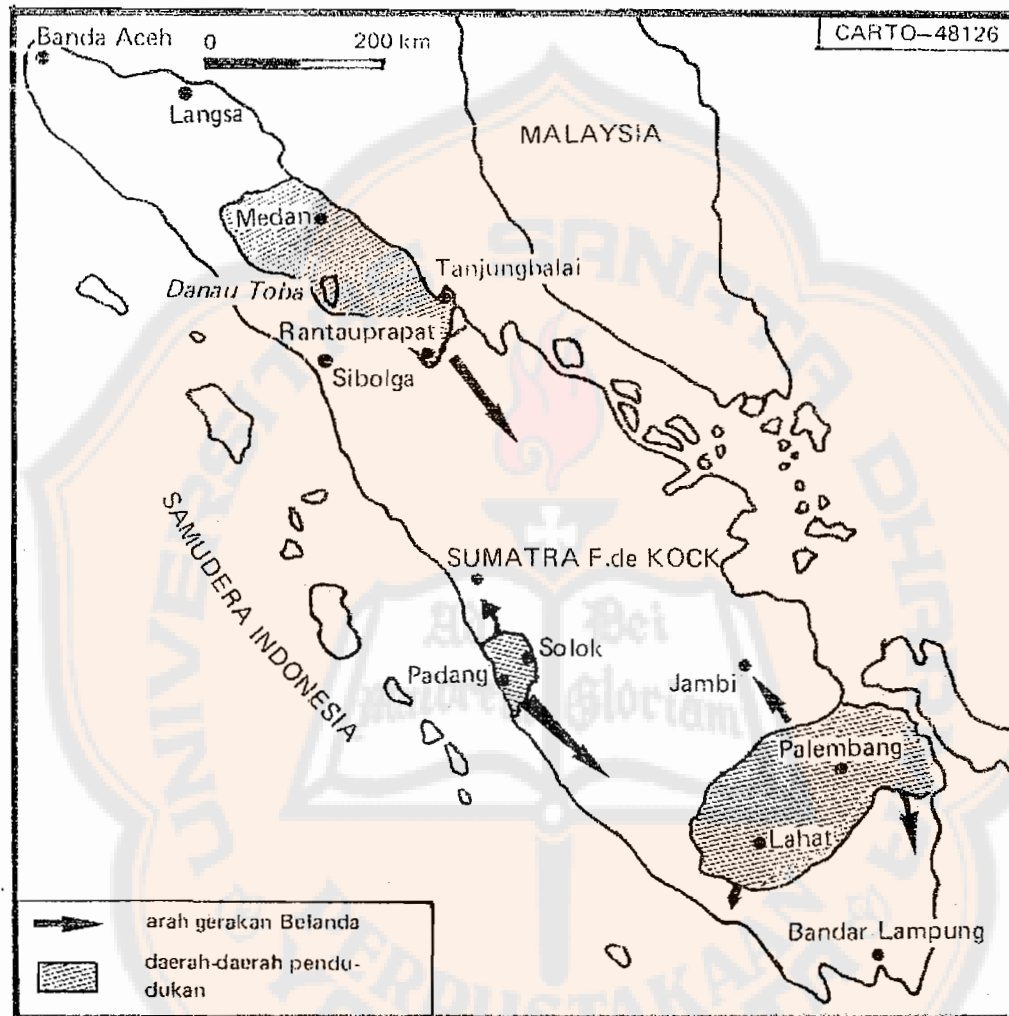
Sumber : K.M.L. Tobing, 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 48.



Gerakan Tentara Belanda ke wilayah Republik dilakukan dari enam penjur; lima melalui darat dan laut dan satu melalui udara langsung ke Yogyakarta.

Sumber : K.M.L Tobing, 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 178.

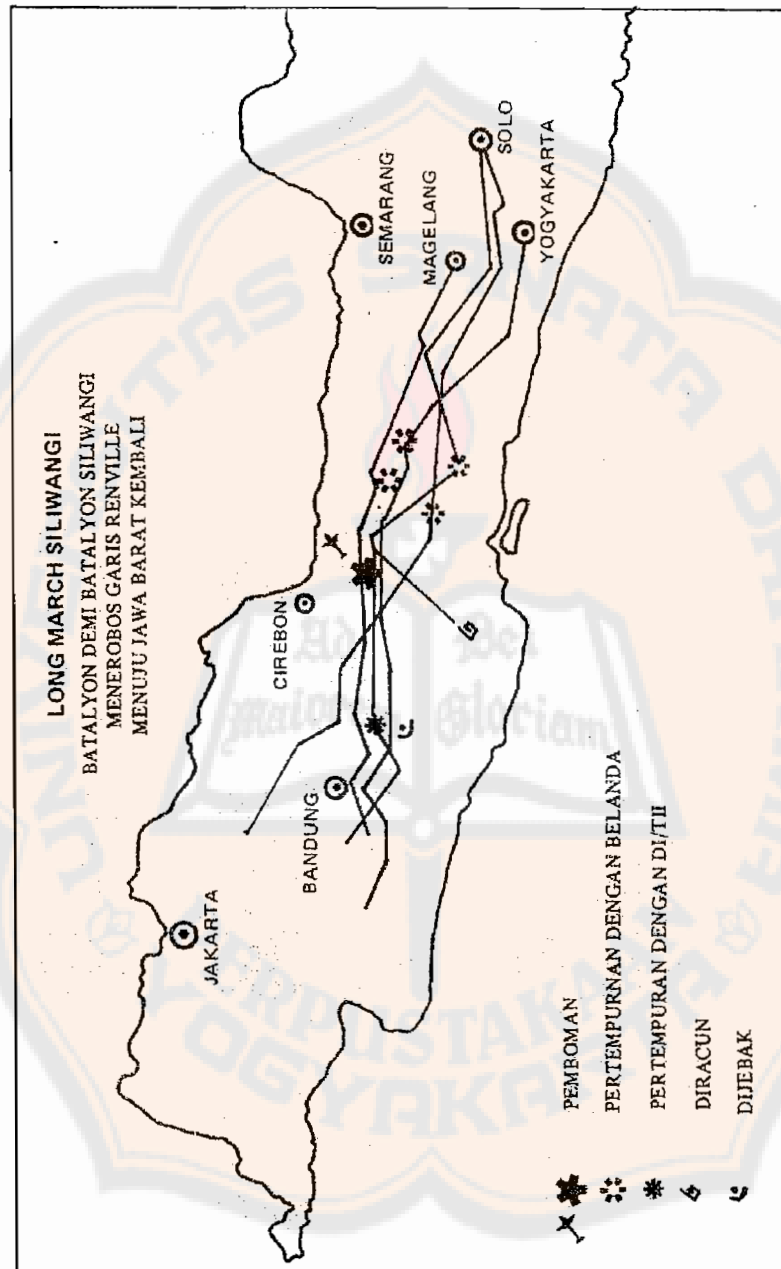
LAMPIRAN : 5



Di Sumatra, Aksi Militer II khusus diarahkan ke daerah-daerah perkebunan.

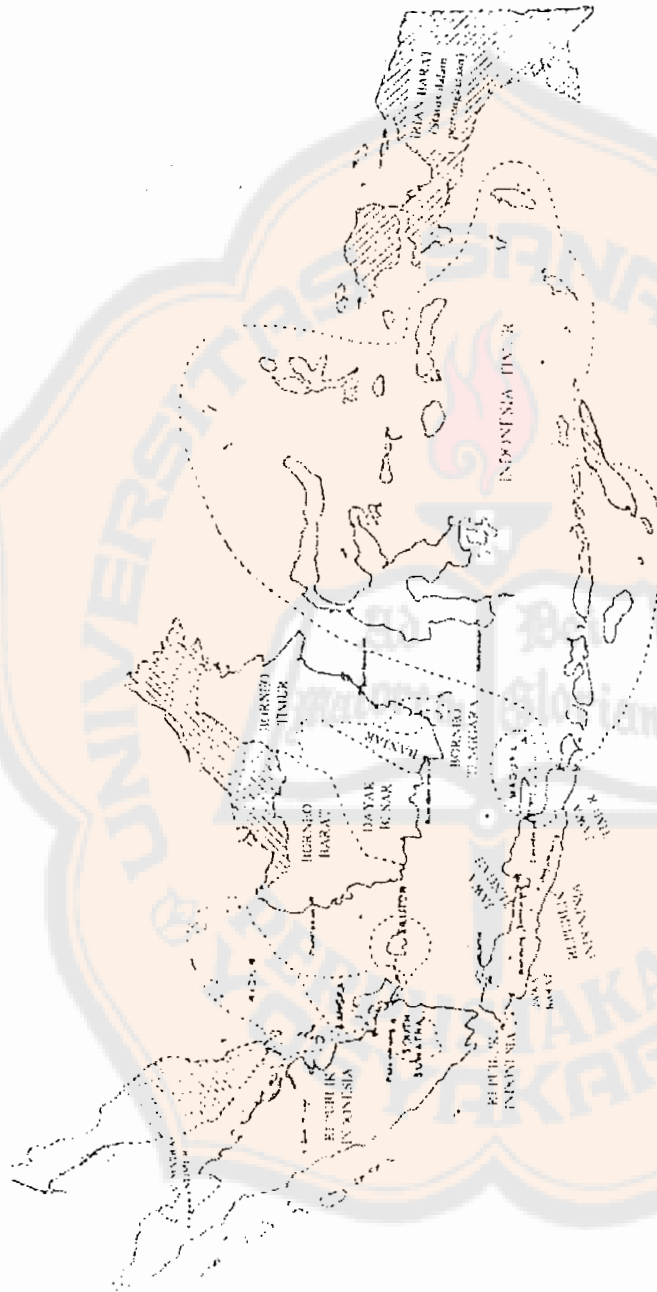
Sumber : K.M.L Tobing, 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*,
Gunung Agung, Jakarta, hlm. 180.

LAMPIRAN : 6



Sumber : K.M.L.Tobing, 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*,
 Gunung Agung, Jakarta, hlm. 184.

LAMPIRAN : 7



Peta 3. Indonesia Federal. Garis batas yang lampirkan adalah wilayah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. (Pasundan di sini ditukiskan sebagai Jawa). Dengan pengecualian Jawa Tengah yang garis batasnya sudah ada sejak bulan Maret 1949, seluruhnya adalah garis batas kira-kira empat belas bulan atau lebih sebelumnya. Pengecualiannya adalah Borneo Barat yang sudutnya sebelah barat daya untuk waktu yang singkat dipisahkan dan membentuk daerah otonomi Kota Waringin yang keberadaannya hanya dalam waktu singkat.



Sumber : George Mc Turnan Kahin, 1995, *Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 552.